

# Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia

**Sebuah Perdebatan**



**Ari A. Perdana, dkk.**

Kata Pengantar: Inaya Rakhmani



**INDO|PROGRESS**



# **KEBANGKITAN POPULISME ISLAM DI INDONESIA**

**Sebuah Perdebatan**

**Ari A. Perdana, dkk.**

**Kata Pengantar: Inaya Rakhmani**



Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia  
Sebuah Perdebatan

Kata Pengantar:  
Inaya Rakhmani

-----  
Judul: Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia Sebuah  
Perdebatan

Editor: Coen Husain Pontoh

Desain sampul: Alit Ambara

Penerbit: IndoPROGRESS, 2018

Buku Saku IndoPROGRESS No. 18

**Daftar Buku Saku terbitan  
Pustaka IndoPROGRESS**

**Membedah Tantangan Jokowi-JK**

Editor dan Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

**Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara  
(Catatan-catatan Investigasi)**

Louis Althusser

Kata Pengantar: Martin Suryajaya

**Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis**

Gerard Dumenil dan Duncan Foley

Kata Pengantar: Mohamad Zaki Hussein

**Penghematan Melawan Demokrasi Fase Otoriter  
Neoliberalisme?**

Greg Albo dan Carlo Fanelli

Kata Pengantar: Anto Sangadji

**Islam Politik Sebuah Analisis Marxis**

Deepa Kumar

Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

**Radikalisme Islam di Indonesia Menuju Suatu  
Pemahaman Sosiologis**

Vedi R. Hadiz

Kata Pengantar: Airlangga Pribadi

**Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal  
Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang**

Alfred D. Ticoalu

Kata Pengantar: Made Supriatma

**Sejarah Teori Krisis Sebuah Pengantar Analisa Marxis**

Anwar Shaikh

Kata Pengantar: Intan Suwandi

**Sukarno, Marxisme, dan Bahaya Pemfosilan**

Editor: Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar: Bonnie Triyana

**Marxisme dan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Editor: Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar: Muhammad Al-Fayyadl

**Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan:  
Kembali ke Marx**

Martha A. Gimenez

Kata Pengantar: Ruth Indiah Rahayu

**Mengajarkan Modernitas:  
PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan**

Ruth T. McVey

Kata Pengantar: John Roosa

**Marxisme dan Evolusi Manusia**

Dede Mulyanto

Kata Pengantar: Sylvia Tiwon

**Sosialisme Abad Keduapuluh Satu:  
Pengalaman Amerika Latin**

Martha Harnecker

Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

# Daftar Isi:

Kata Pengantar **1**

I. *Ari A. Perdana*, Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI **7**

II. *Muhammad Ridha*, Merebut Populisme **18**

III. *Ari A. Perdana*, Masih soal Populisme, Sedikit Tentang Huntington, dan Sosialisme: Menjawab Muhammad Ridha **22**

IV. *Abdil Mughis Mudhoffir*, Yang Patut Dikhawatirkan adalah Politik yang Rasis, bukan Populisme Islam **27**

V. *Muhammad Ridha*, Sekali Lagi Tentang “Merebut Populisme”: Tanggapan atas Tanggapan **33**

VI. *Abdil Mughis Mudhoffir*, Menjelaskan Kembali Oligarki dan Euforia Kebangkitan Islam: Tanggapan terhadap Muhammad Ridha dan Para Pluralis **39**

VII. *Ari A. Perdana*, Melanjutkan Soal Populisme, Untuk Menjaga Ke- warasan Pascapilkada **46**

VIII. *Muhammad Ridha*, Menjawab Skeptisisme **51**

IX. *Made Supriatma*, Pasang Naik Populisme Kanan? **58**

X. *Ahmad Rizky Mardhatillah Umar*, Populisme Sayap Kanan dan Transformasi Ekonomi-Politik Global: Tambahan untuk Perdebatan **76**

XI. *Abdil Mughis Mudhoffir*, Aliansi Populis Islam yang Terfragmentasi **91**

XII. *Muhammad Ridha*, Menuju Intervensi Kiri **102**

XIII. *Muhammad Fajar*, Beberapa Catatan Tentang Perdebatan Populisme **108**

Biodata Penulis **116**





# Kata Pengantar

**Inaya Rakhmani**

*"I've seen some springs that ended up being terrible winters," he said.  
"We human beings are gregarious. We can't live alone.  
For our lives to be possible, we depend on society.  
It's one thing to overturn a government or block the streets.  
But it's a different matter altogether to create and build a better society,  
one that needs organization, discipline, and long-term work.  
Let's not confuse the two of them."*

*Before I could ask my next question, Pepe interjected,  
hoping not to admonish the spirit of revolt that had guided most of his life.  
"I want to make it clear: I feel sympathetic with that youthful energy,  
but I think it's not going anywhere if it doesn't become more mature."*

*(Krishna Andavolu, Uruguay's Jose Mujica – President Chill, Vice, May 2014)*

PERKEMBANGAN sejarah dunia selama seratus tahun terakhir, membawa kita ke kondisi sosial yang diwarnai kebangkitan fundamentalisme dan soviniisme (*chauvinism*) agama dan bangsa. Fakta bahwa kebangkitan ini lahir dari rahim demokrasi adalah paradoks yang berusaha diurai begitu banyak penulis, jurnalis, akademisi, seniman, dan tidak terkecuali para kontributor buku saku ini. Dengan bercermin pada demokrasi kontemporer dan sentimen populis beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Belanda, Turki, dan Mesir; para penulis buku saku ini berdebat mengenai apa, kenapa dan bagaimana populisme menguat di Indonesia.

Jika ada satu hal yang konsisten di antara gagasan para penulis, itu adalah konseptualisasi populisme sebagai diskursus antagonistik di mana "rak-

yat” yang teropresi melawan “elite” yang korup. Ketika dimainkan aktor politik yang tepat, diskursus ini memiliki kemampuan memobilisasi rantai kekecewaan dan tuntutan orang banyak dengan mengonstruksi politik identitas. Lebih jauh lagi, politik identitas ini mengelilingi penanda yang mampu membuat sumir perbedaan kelas. Di sini agama, etnisitas, nasion, ras amat berguna untuk membangun perasaan senasib sesama yang lintas kelas. Sebabnya, atribut sosial itu pulalah yang sempat bermanfaat di masa lalu sebagai perekat melawan elite atau kekuasaan resmi di masa lampau. Kekuasaan resmi ini bisa berupa pemerintah kolonial, tuan tanah kulit putih, ras yang memperoleh privilese dagang, dan lainnya sesuai preseden sejarah.

Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi penuh kontradiksi. Misalnya, reformasi konstitusional yang membatasi kemerdekaan sipil dan menegasi semangat keterbukaan politik justru telah dicapai melalui instrumen penegakan nilai-nilai demokrasi. Mulai dari pembubaran organisasi sipil karena pencemaran nama baik hingga posisi politik media massa menjelang pemilihan. Namun pembahasan teknis mengenai demokrasi tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural yang mereproduksi konflik sosial yang, secara resiprokal, memengaruhi demokrasi.

Salah satu hal penting yang ditawarkan banyak publikasi di *IndoPROGRESS* adalah apresiasi mengenai analisis struktural-kritis. Abdil Mughis Mudhoffir,<sup>1</sup> misalnya, mencatat bagaimana populisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai ekspresi politik dengan basis utama kelas pekerja perkotaan—khususnya Peronisme di Argentina dan Vargasisme di Brazil. Meskipun tidak mendalami lebih jauh mengenai ini, ada pelajaran penting dari populisme Peronis yang dapat dipetik. Untuk beberapa waktu, pemerintah Peron dapat memediasi konflik antara para manajer dan buruh dalam model-model birokrasi korporatis yang dibangunnya secara cukup sistematis. Ketegangan antar-kelas dimoderasi dengan adanya peran pemerintah yang memihak pada proletar. Sementara, peran negara dalam populisme neoliberal yang kita alami sekarang justru menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dalam proyek-proyek pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dijustifikasi melalui narasi “kemajuan” oleh rezim pemerintahan Indonesia

---

1      Lihat bab XI dalam buku ini.

sekarang. Mau tidak mau, konstitusi kekuasaan negara pun harus berubah di tengah desakan neoliberal.

Bagi saya, kontribusi utama perdebatan mengenai populisme dalam buku saku ini adalah karena ia menempatkan munculnya diskursus populis dalam *gap* representasi politis dan dislokasi ekonomi akibat ekonomi kapitalis global. Di dalamnya terdapat kelindan rasa frustrasi banyak orang akibat, di antaranya, mahalanya biaya pendidikan dan perumahan, lemahnya institusi publik yang menyediakan jasa kesehatan dan jaminan sosial, serta media komersial yang terintegrasi dengan kontestasi elite oligarki. Benang merah lainnya adalah tumpang tindih diskursus antara rakyat yang terfragmentasi dengan elite yang berkompetisi; di mana ekspresi rasa frustrasi yang bergaung dengan orang banyak berguna untuk diadaptasi para elite agar agenda mereka sejalan dengan kapitalisme neoliberal. Proses adaptasi ini, seperti halnya semua adaptasi sosial, melibatkan ketegangan antara politik dan materi. Dan adaptasi ini lebih berguna bagi elite dalam memertahankan kekuasaan politik mereka, ketimbang aliansi politik progresif yang menyeimbangkan kekuasaan antara elite dan non-elite. Sebaliknya, yang terjadi justru populisme yang mengukuhkan polarisasi antar identitas politik—yang membuat sumir ketegangan kelas; sehingga perang antar saudara terus menguntungkan posisi elite.

Dalam hal ini, populisme tampaknya adalah hasil sampingan (*byproduct*) dari sistem demokrasi yang dibangun di atas hubungan yang timpang antar-negara, dan juga dalam hubungan sosial serta antar-kelas. Artinya, dia tidak benar-benar merasuk dalam hubungan sosial massal karena tidak dibangun secara institusional dan sistemik. Sehingga saat ini, meskipun rasanya populisme ada di mana-mana, sebenarnya ia hanya muncul dalam momen-momen politis tekanan tinggi di mana elite sedang berkompetisi. Dengan kata lain, populisme diserap dan diakomodasi oleh para elite dalam diskursus dominan untuk menjustifikasi reorganisasi politik mereka. Itulah sebabnya populisme Islam di Indonesia pun terfragmentasi: Ummah yang dibayangkan tidak benar-benar memiliki relasi sosial cukup mendalam untuk diorganisasi sebagai basis massa politis yang dapat membangun masyarakat alternatif bagi kapitalisme neoliberal, yang berlaku juga di antara mereka yang memperjuangkan agenda demokrasi.

Di sinilah letak penting pemahaman yang ditawarkan para penulis mengenai makna populisme bagi demokrasi di Indonesia, terutama yang membantu kita berpikir ulang mengenai betapa jauh lebih efektifnya oligarki mengorganisasi dirinya ketimbang aliansi antara inteligensia dan pekerja.

Jika berkaca pada tulisan buku saku ini, salah satu penyebab efektivitas mobilisasi rasa frustrasi orang banyak terletak pada lemahnya institusi publik dan negara memberi rasa aman pada warga negaranya. Dengan kata lain, demokrasi hanya akan kuat jika institusi publik memberikan jaminan sosial tanpa terkecuali. Jika segregasi sosial terbentuk melalui gentrifikasi, maka relasi sosial pun hanya bisa dibentuk secara mendalam melalui tenun sosial yang dijahit oleh institusi yang memberikan layanan kepada semua orang.

Membangun relasi sosial mendalam membutuhkan waktu dan institusi yang kuat. Ia dirajut melalui kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang adil, pemberian layanan dasar kepada semua orang tanpa diskriminasi sosial, dan juga melalui interaksi sehari-hari di taman publik, berbagi transportasi umum, dan lainnya. Warga yang merasa aman secara sosial sulit dimanipulasi kecemasannya. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman mengenai populisme dapat digunakan dalam proses dan dinamika menuju sana? Jawabannya ada di dalam perdebatan antara para penulis di buku ini. Di sini bisa kita lihat bahwa ada dua arah pandangan umum di antara para penulis, yakni yang menggaungkan merebut populisme dengan sosialisme sebagai tujuan<sup>2</sup> dan yang menganggap hal ini sia-sia<sup>3</sup>.

Meskipun para penulis tidak mufakat mengenai ini, secara mendasar semua sepakat bahwa populisme adalah instrumen antagonistik dalam demokrasi. Dan jika ia adalah sebuah instrumen dalam formasi kekuasaan seakrang, ia pun bisa digunakan sebagai instrumen konstruktif bagi demokrasi. Tentunya, hanya jika konstitusi kekuasaan dan formasi politik-material mengizinkan hal ini terjadi. Lebih jauh lagi, untuk mengetahui kapan waktu yang tepat konstelasi kekuasaan—atau kondisi material—dapat menghasilkan populisme yang menguntungkan semua tanpa

---

2        Lihat, misalnya, tulisan Muhammad Ridha dalam bab II buku ini.

3        Lihat, misalnya, tulisan Abdil Mughis Mudhoffir dalam bab VI buku ini.

diskriminasi, maka pemahaman mengenai rekonfigurasi negara merespon kapitalisme global harus terus diurai. Buku saku ini satu upaya menuju ke sana.\*\*\*

**Inaya Rakhmani** *adalah Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan associate Asia Research Centre, Murdoch University, Australia.*



# I

## Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI

**Ari A. Perdana**

KEMENANGAN Donald Trump di pemilihan umum presiden (Pilpres) AS, dan keinginan kelompok yang ingin Inggris keluar dari Uni Eropa (“Brexit”) di referendum Inggris, mengejutkan, tapi tidak aneh. Keduanya bagian dari fenomena menguatnya populisme di negara-negara demokrasi Barat. Kecenderungan serupa juga menguat di Asia; Narendra Modi dan BJP di India serta Rodrigo Duterte di Filipina adalah dua contoh terakhir. Menguatnya dukungan pada kelompok Islam konservatif di Indonesia, memiliki banyak karakteristik serupa dengan trend populisme global.

Sebelum Trump dan Brexit, politisi seperti Marine Le Pen, Geert Wilders, Norbet Hoffer dan penggagas Brexit Nigel Farage, sudah lebih dulu masuk ke ranah politik *mainstream*. Ronald Inglehart dan Pippa Norris (2016)<sup>1</sup> menyebutkan, perolehan suara partai-partai yang membawa isu populis di Eropa meningkat dari lima persen di tahun 1960an menjadi 13 persen di dekade ini, sementara perolehan kursi mereka meningkat dari empat persen menjadi 13 persen. Pengaruh partai dan politisi populis tidak terbatas pada perolehan suara, tapi juga pada diskursus yang lebih besar – di Inggris, contohnya, *United Kingdom Independent Party* (UKIP) bisa menggiring opini publik ke arah kemenangan Brexit.

### Anatomi populisme

Tidak mudah mendefinisikan populisme. Berbagai literatur yang ada tidak

---

1 Inglehart, Ronald dan Pippa Norris (2016). “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”. Faculty Research Working Paper Series No. RWP16-026, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA. URL [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2818659](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2818659)

menghasilkan konvergensi definisi.<sup>2</sup> Cas Mudde, salah satu ilmuwan politik yang studinya tentang populisme cukup banyak dirujuk, mendefinisikan populisme sebagai “posisi politik yang menempatkan ‘rakyat kebanyakan’ dan ‘elit yang korup’ dalam posisi antagonistik, dan melihat politik sebagai ekspresi dari keinginan umum rakyat kebanyakan”.<sup>3</sup>

Berbagai pemikiran lain melihat populisme sebagai ekspresi politik yang memiliki beberapa elemen. *Pertama*, anti kemapanan, dalam arti mewakili ekspresi kelompok yang merasa termarginalkan; *kedua*, adanya otoritas pemimpin, baik melalui kharisma atau figur personal maupun pesan yang bersifat apokaliptik (“Negara kita bangkrut, kita sedang menuju neraka”).<sup>4</sup> *Ketiga* perasaan *in-group* yang kuat, yang dalam banyak hal ditunjukkan dalam sentimen ‘kita vs mereka’ – garis pembatas bisa berdasarkan kelas atau status ekonomi (seperti di Thailand), penduduk vs imigran, bahkan ras dan agama.

Sebagai catatan, karena beragamnya definisi populisme, kategorisasi partai atau politisi populis juga bisa diperdebatkan. Batas antara populisme dengan klasifikasi politik tradisional (kiri-tengah-kanan atau progresif-konservatif) juga bisa kabur dan dinamis. Beberapa menganggap Bernie Sanders sebagai populis kiri, sementara ada yang mengategorikannya ke dalam kelompok progresif atau sosial demokrat. Di Amerika Latin, banyak literatur membedakan Chavez dan Morales yang populis dengan Lula dan Rouseff di Brazil atau Michelle Bachelet di Chile yang berhaluan sosial demokrat.

---

2       Gidron, Noam, dan Bart Bonikowski (2013). “Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda. Working Paper No. 13-0004, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge, MA. URL [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2459387](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2459387)

3       Mudde, Cas. 2004. ‘The Populist Zeitgeist’, *Government and Opposition*, Vol. 39(4), pp. 542–563.

4       Pidato kemenangan Trump. URL <http://www.vox.com/2016/6/7/11880448/donald-trump-victory-speech-transcript>



Artikel ini tidak akan masuk ke pembahasan yang *rigid* terkait klasifikasi. Artikel ini juga akan fokus pada fenomena populisme sayap kanan. Alasannya pragmatis: itu adalah fenomena yang terlihat saat ini. Sementara itu, pembahasan mengenai gerakan populis dan progresif kiri sudah cukup banyak, dan di lapangan belum ada hal yang baru secara signifikan.

## **Mengapa populisme menguat?**

Inglehart dan Norris menawarkan dua hipotesis: kesenjangan ekonomi dan pertentangan kultural.

Hipotesis pertama merujuk pada kenyataan bahwa menyusul krisis finansial 2008-09, perekonomian di negara-negara Barat tengah mencari keseimbangan baru. Di saat yang sama, globalisasi ekonomi membuat banyak lapangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, pindah ke Meksiko, India, bahkan Afrika. Hal yang sama juga terjadi di sektor jasa; revolusi teknologi informasi memudahkan banyak pekerjaan yang tadinya harus dilakukan di Cleveland atau Birmingham kini bisa dilakukan jarak jauh dari pekerja di Mumbai atau Manila.

Menariknya, Inglehart dan Norris berargumen bahwa hipotesis kesenjangan ekonomi bukanlah faktor utama. Keluhan dari pekerja manufaktur yang kehilangan pekerjaan mungkin menjelaskan mengapa Hillary Clinton kalah di koridor industri antara Philadelphia dan Detroit, atau gerakan “*remain*” gagal di kota-kota yang pernah menjadi sentra industri. Tapi dalam sampel yang lebih besar di negara yang lebih banyak, dukungan terhadap politisi populis ternyata tidak menunjukkan korelasi kuat dengan tingkat pengangguran, tingkat pendapatan rumah tangga atau status pekerjaan (terdidik/tidak terdidik). Dukungan terhadap populisme juga tidak berkorelasi kuat dengan perasaan subjektif tentang kerentanan ekonomi (*economic insecurity*).

Selain itu, jika argumen tekanan ekonomi menjadi faktor utama, mengapa populisme yang bangkit bukanlah yang datang dari sayap kiri (selain Syriza di Yunani), yang lebih langsung mengusung soal kesenjangan kelas?

Di sinilah mengapa hipotesis pertentangan kultural (*cultural backlash*) le-

bih menjelaskan fenomena dukungan atas populisme. Dalam tiga dekade terakhir, negara-negara Barat memang mengalami perubahan seperti makin tingginya dukungan bagi kelompok minoritas (LGBT, kulit hitam dan Hispanik, imigran), feminisme, multikulturalisme, internasionalisme, dan nilai-nilai lain yang identik dengan *political correctness*. Nilai-nilai ini mungkin didukung kuat oleh kelompok usia muda, tinggal di perkotaan dan berpendidikan tinggi.

Fareed Zakaria, mengutip Inglehart dan Norris, menambahkan bahwa nilai-nilai di atas – beberapa menyebutnya sebagai nilai-nilai “kosmopolitan liberal” – diterima oleh generasi lebih muda, tapi membuat generasi yang lebih tua merasa tidak aman.<sup>5</sup> Mereka melihatnya sebagai serangan atas peradaban dan nilai-nilai yang mereka anut selama beberapa dekade. Akibatnya, mereka memberikan dukungan pada partai atau politisi yang mereka anggap bisa menjaga nilai-nilai yang mereka anggap lebih cocok.

Itulah mengapa di AS, banyak pemilih melihat Trump, dengan berbagai kekurangannya, akan lebih tegas dalam menahan gerakan LGBT dan multikulturalisme (baca: makin besarnya komunitas Hispanik dan Islam). Pemilih laki-laki melihatnya sebagai simbol bahwa maskulinisme masih punya tempat di politik Amerika (terutama setelah musisi perempuan makin dominan di ranah musik country). Di Inggris, generasi tua yang besar ketika Inggris masih menjadi kekuatan ekonomi, politik dan militer dunia, merasa Uni Eropa mencabut semua status itu. Sementara di Eropa, gelombang imigrasi membuat benturan budaya menjadi terlihat nyata, menyebabkan banyak orang di Prancis, Jerman, Belanda, dan Skandinavia merasa tidak nyaman bahkan terancam.

## **Populisme di Asia dan Indonesia**

Fareed Zakaria juga menunjuk migrasi internasional sebagai faktor penting yang membuat dukungan atas populisme menguat. Menurutny, di

---

5 Zakaria, Fareed (2016a). “Populism on the March.” *Foreign Affairs*, Vol. 95 No. 6 (November/December). URL <http://dhanaanmedia.com/populism-on-the-march-why-the-west-is-in-trouble/>

negara maju Asia seperti Jepang dan Korea, dimana tingkat migrasi sangat kecil, populisme tidak jadi isu.<sup>6</sup>

Agaknya Zakaria lupa melihat bahwa populisme pun menunjukkan tren di Asia.<sup>7</sup> Beberapa waktu lalu, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra di Thailand membawa gerakan populisme kiri, meski berlanjut dengan konflik horizontal dan berujung pada pemerintahan militer. Narendra Modi dan BJP di India,<sup>8</sup> juga Rodrigo Duterte di Filipina,<sup>9</sup> meski mengusung narasi berbeda, memiliki banyak elemen populis yang membawa mereka memenangkan pemilu.

Narasi populis selalu jadi bagian dalam politik Indonesia. Namun, setelah dua periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih berwatak teknokratik, Pemilu 2014 menghadirkan dua kandidat yang membawa narasi populisme, meski dengan beberapa perbedaan. Prabowo Subianto adalah contoh kandidat populis *text-book*: menggambarkan sistem yang ada sebagai rusak dan ia akan memperbaiki semua, serta menyerang kepentingan asing. Joko Widodo menawarkan narasi populisme yang lebih lunak – memperbaiki dari dalam dan menggambarkan diri sebagai figur yang lebih inklusif dan tidak konfrontatif.<sup>10</sup> Dibandingkan dengan ketika

---

6 Zakaria, Fareed (2016b). "What's really pushing politics to the right? Immigration." Op-ed di The Washington Post, 8 Desember. URL <https://fareedzakaria.com/2016/12/08/the-force-behind-populism-everywhere-immigration/>

7 Stewart, Devin T. dan Jeffrey Wasserstrom (2016). "The Global Populist Surge Is More than Just a Western Story—Just Look at Asia". The Diplomat, 10 Desember. URL <http://thediplomat.com/2016/12/the-global-populist-surge-is-more-than-just-a-western-story-just-look-at-asia/>

8 "A man of some of the people." The Economist, 28 Desember 2013. URL <http://www.economist.com/news/briefing/21591599-populist-nasty-past-and-decent-economic-record-wants-run-india-man-some>

9 Perdana, Ari (2016). "Bagaimana nasib Filipina setelah Duterte?" Op-ed di Rappler Indonesia, 14 Mei. URL <http://www.rappler.com/indonesia/133038-bagaimana-nasib-filipina-setelah-duterte>

10 Mietzner, Marcus (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia*. Policy Studies No. 72. Honolulu: East-West Center. URL <http://www.eastwestcenter.org/publications/reinventing-asian-populism-jokow>

menjadi kandidat, pemerintahan Presiden Joko Widodo menggabungkan narasi populisme dengan pendekatan teknokratik.

## **Populisme Kanan dan Populisme Islam di Indonesia**

Di saat yang sama, ada bentuk populisme lain yang menguat: populisme Islam, meminjam istilah Vedi Hadiz.<sup>11</sup> Penggunaan istilah populisme Islam di artikel ini lebih merupakan cara singkat untuk mendefinisikan sebuah tren yang memiliki anatomi mirip dengan populisme (spesifiknya, populisme kanan), sekaligus membawa Islam sebagai identitas kelompok. Istilah populis Islam juga bisa digunakan untuk membedakan dengan Islam ekstrimis, atau Islam politik yang bergerak di jalur politik elektoral.

Mendefinisikan apa dan siapa itu Islam populis bukan hal mudah. Sebagai istilah baru, ini perlu dikaji serta diuji lebih lanjut. Tapi serangkaian aksi “Bela Islam” di penghujung 2016 memberikan sedikit gambaran atas kelompok Islam populis, yang lebih mirip seperti koalisi longgar antara kelompok miskin kota yang tergabung dalam grup-grup *vigilant*, kelas menengah religius, dan beberapa elit pemuka agama, tokoh politik dan bisnis.

Aksi-aksi bela Islam menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dipenjarakan karena dianggap “menistakan Islam dan Kitab Suci Al-Quran.” Tapi jika diperhatikan, kasus Ahok lebih menjadi pemicu atau alasan berkumpulnya ratusan ribu orang. Demikian juga, tuntutan untuk membawa kasus Ahok ke ranah hukum hanya merupakan tuntutan antara. Sebagai perbandingan, aksi *Tea Party* di AS dipicu setelah Obama mengeluarkan paket stabilisasi ekonomi. Tapi faktor-faktor yang menyebabkan gerakan *Tea Party* muncul sudah ada sebelumnya, dan terlepas, dari paket stabilisasi ekonomi. Dan tuntutan mereka lebih dari sekadar membatalkan kebijakan itu.

Narasi spesifik yang diangkat oleh populis Islam di Indonesia tentu berbeda dengan populis kanan di AS dan Eropa. Tapi menariknya, dalam banyak

---

is-rise-democracy-and-political-contestation-in

11 Hadiz, Vedi R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

hal mereka memiliki anatomi dan elemen yang mirip. *Pertama*, keduanya merupakan ekspresi dari kelompok yang secara demografis mayoritas tapi merasa termarjinalkan.

*Kedua*, penggunaan narasi *nativism* untuk memperkuat identitas gerakan – kelompok kulit putih Anglo-Saxon di AS, penduduk asli (vs imigran) di Eropa, umat Islam di Indonesia. Meski isu ras dan agama memang tidak diangkat secara eksplisit di aksi-aksi bela Islam, secara implisit sasaran aksi itu adalah Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Tapi di luar aksi, sentimen ras, agama dan anti-asing juga semakin sering mewarnai narasi kelompok Islam populis. Contohnya dalam isu pekerja Tionghoa dan beberapa gesekan horizontal terkait pembangunan rumah ibadah.

Kemiripan *ketiga*, baik di Indonesia, AS maupun Eropa, menguatnya populisme dibantu oleh apa yang disebut sebagai '*post-truth politics*'.<sup>12</sup> Kecepatan dan volume informasi di era digital tidak diimbangi dengan mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya berita bohong (*hoax* atau *fake news*) menjadi cara konsolidasi kelompok. Sebagian ini menjadi strategi yang dimainkan secara sistematis oleh Steve Bannon lewat *Breitbart News* di AS yang melapangkan jalan bagi kemenangan Trump, atau pola komunikasi UKIP serta pendukung Brexit yang mendistorsi fakta-fakta soal keuntungan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Tapi sebagian besar ini tetap merupakan pola komunikasi spontan yang umum di media sosial.

## Menjelaskan Tumbuhnya Populisme Islam

Sulit untuk menentukan kapan tren Islam populis dimulai. Vedi Hadiz<sup>13</sup> dan Wasisto Raharjo Jati<sup>14</sup> bahkan menarik akar populisme Islam jauh ke

12 Davies, William. "The Age of Post-Truth Politics". Op-ed di The New York Times, 24 Agustus 2016. URL [https://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?_r=0)

13 Hadiz, Vedi R. (2014). "A New Islamic Populism and the Contradictions of Development." *Journal of Contemporary Asia* Vol. 44(1). URL <http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2013.832790>

14 Jati, Wasisto Raharjo (2013). "Radicalism in the Perspective of Islamic-Popu-

era Orde Baru yang merepresi ekspresi politik kelompok Islam.

Yang jelas di awal 2000an, muncul sejumlah kelompok yang membawa identitas agama (Islam), bertindak secara *vigilante* ‘menindak’ kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam – dari diskotik hingga diskusi terkait komunisme atau LGBT. Ada beberapa kelompok, tapi yang paling populer dan berpengaruh adalah Front Pembela Islam (FPI).

FPI dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil pada awalnya lebih menggambarkan kelompok *vigilante* ketimbang gerakan ideologis. Saat itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih merepresentasikan gerakan berdasarkan ideologi dan tujuan yang jelas. Perlahan, aktivitas JI, MMI dan LJ berhasil diminimalkan, dan pendekatan keras yang mereka usung membuat basis dukungan terhadap mereka tidak pernah besar. HTI meski perlahan makin populer, aktivitas mereka masih cenderung eksklusif dan *inward-looking*.

Hingga awal dekade 2010an, narasi utama Islam Politik di Indonesia masih dipegang oleh partai-partai dan politisi Islam. Suara FPI dan semacamnya, meski cukup nyaring, secara umum tidak dilihat sebagai representasi suara Islam kebanyakan. FPI juga lebih dilihat sebagai kelompok yang beranggotakan kelompok miskin dan marginal di perkotaan. Tingginya tingkat pengangguran di kelompok laki-laki usia muda – yang mendorong pecahnya *Arab spring*<sup>15</sup> – juga menjelaskan mengapa ormas seperti FPI mudah merekrut anggota.<sup>16</sup> Dengan kata lain, mereka bergerak atas motivasi ekonomi dan mencari identitas sosial, ketimbang ideologi.

---

lism: Trajectory of Political Islam in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* Vol. 07(02), Desember. URL <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/viewFile/129/128>

15 Malik, Adeel (2011). “The Economics of Arab Spring.” *Al-Jazeera*, 13 Oktober 2011. URL <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/10/20111010142425419849.html>

16 Perdana, Ari (2012). “Penganggur Usia Muda dan Pasar Kerja.” *Majalah Tempo*, 13 Desember 2012. URL <http://koleksiartikell.blogspot.com/2012/12/penganggur-usia-muda-dan-pasar-kerja.html>

Belakangan, dukungan terhadap FPI dari kelompok kelas menengah semakin besar. Sejak 1990an, kelas menengah religius – kelas menengah yang mengidentikkan diri dengan agama (Islam) sebagai identitas – memang menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari segi jumlah maupun ekspresi sosial, politik dan budaya. Awalnya, kelas menengah religius ini tidak ingin diasosiasikan dengan Islam yang ekstrem, namun dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya di aksi-aksi bela Islam 2016, kelompok ini terlihat cukup nyaman diasosiasikan dengan, atau berada dalam satu kelompok besar bersama FPI.

Ini membuat populisme Islam di Indonesia, seperti populisme Trump, Brexit dan lainnya di Eropa, menunjukkan karakter lintas-kelas. Menjadi menarik untuk memahami lebih jauh mengapa populisme Islam juga menjadi fenomena kelas menengah. Menurut Hadiz, ini menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia juga memiliki frustrasi dan perasaan tidak aman dalam persaingan di era kapitalisme global.

Pertanyaannya, apakah frustrasi dan perasaan tidak aman itu semata terkait faktor ekonomi? Atau itu juga menunjukkan penolakan mereka atas nilai-nilai kosmopolitan liberal, seperti Inglehart dan Norris temukan di AS dan Eropa?

### **Lalu Bagaimana?**

Artikel ini lebih merupakan observasi umum ketimbang hasil riset yang mendalam. Ini bisa ditindaklanjuti dengan studi atau survey yang bisa mengonfirmasi beberapa hal. *Pertama*, seberapa tinggi sebenarnya dukungan terhadap populisme Islam (dengan *proxy* aksi-aksi bela Islam dan aktor-aktornya) di kalangan kelompok kelas menengah terdidik, dibandingkan dengan kelompok lainnya. *Kedua*, seberapa besar hipotesis kesenjangan ekonomi dan pertentangan kultural menjelaskan menguatnya tren Islam populis di Indonesia. *Ketiga*, apakah ‘koalisi’ antara kelas menengah, kelompok miskin kota yang tergabung dalam ormas-ormas agama serta elit-elit pemuka agama pada aksi-aksi bela Islam lalu bersifat cair dan hanya sesaat, atau relatif permanen?

Membandingkan fenomena yang terjadi di berbagai negara, terlihat bah-

wa ada banyak kesamaan anatomi dalam populisme Islam dan populisme kanan di Amerika serta Eropa. Ini bisa diartikan bahwa identitas Islam yang diusung di Indonesia memiliki fungsi yang mirip dengan identitas *nativist* lain. Ungkapan ‘bela Islam’ juga memiliki nada yang sama dengan ‘*make America great again*’, ‘*make Mexico pays*’ atau ‘*UK first*.’

Yang masih berbeda adalah soal kepemimpinan. Di Eropa daratan, populisme kanan dipimpin oleh politisi di jalur formal seperti Le Pen atau Wilder. Di Inggris, populisme ala Brexit digagas oleh UKIP pimpinan Nigel Farage yang sebenarnya bukan bagian dari partai-partai utama. Namun mereka bisa menggiring opini publik, dan Partai Konservatif sekalipun terbawa ke isu yang mereka angkat. Di AS, Donald Trump memang maju sebagai kandidat Partai Republik, tapi ia adalah figur di luar sistem. Tapi narasi yang ia angkat mendatangkan dukungan terutama dari kelompok *alt-right*. Ini membuat Partai Republik, yang sudah lebih dulu digoyang dari dalam oleh gerakan populis *Tea Party*, terbawa permainan yang dibuat oleh Trump dan kelompok populis.

Di Indonesia, sejauh ini peran politisi dan partai Islam terlihat minimal. Di sisi lain, figur Rizieq Shihab yang selama ini identik dengan aksi *vigilante*, mulai menjadi pimpinan *de facto* gerakan Islam populis. Fakta bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan untuk ada di panggung yang sama dengan Rizieq pada aksi 4 Desember,<sup>17</sup> dan kandidat gubernur DKI Anies Baswedan merasa perlu untuk mendatangnya saat berkampanye,<sup>18</sup> semakin memperkuat posisi itu.

Jika kecenderungan populisme Islam berlanjut dan semakin kuat, maka tren kemenangan populis kanan dalam proses elektoral di AS, Inggris, juga India, bisa berlanjut ke Indonesia. Ini tentu pukulan berat untuk mereka (kita) yang masih percaya bahwa Indonesia harus berdiri di atas penghargaan atas keberagaman. Sejarah Eropa juga menunjukkan, populisme

---

17 Perdana, Ari (2012). “Penganggur Usia Muda dan Pasar Kerja.” Majalah Tempo, 13 Desember 2012. URL <http://koleksiartikel.blogspot.com/2012/12/penganggur-usia-muda-dan-pasar-kerja.html>

18 Hikam, A. S. (2016). “Has Jokowi handed a strategic victory to radicals?” New Mandala, 5 Desember 2016. URL <http://www.newmandala.org/jokowi-hands-strategic-victory-radicals/>



yang berawal dari gerakan di luar sistem, sangat rentan berubah menjadi fasisme begitu ia mendapat mandat elektoral.<sup>19\*\*\*</sup>

Sumber:<https://indoprogress.com/2017/01/menguatnya-populisme-trump-brexite-hingga-fpi/>

---

19 Berman, Sheri. "Populism Is Not Fascism – But It Could Be a Harbinger." *Foreign Affairs* Vol. 95 No. 6 (November/December). URL <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-10-17/populism-not-fascism>

## II

# Merebut Populisme

**Muhammad Ridha**

DALAM beberapa masa ke depan, politik Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang kebangkitan populisme. Dari konteks nasional, efek dari mobilisasi populisme Islam (baca: kanan) 411 dan 212, masih akan mewarnai dinamika politik yang ada melalui balutan artikulasi Islam Politik yang sangat rasis, bahkan memiliki kecenderungan fasis. Sementara dari faktor internasional, retorika dan kebijakan politik anti imigrasi dari pemerintahan Donald Trump di AS, serta kelanjutan dari sentimen politik Brexit akan mengamplifikasi rasisme dan sektarianisme di tingkatan global. Situasi yang tentu memperdalam karakter illiberal dalam demokrasi Indonesia, dimana demokrasi kita bukan hanya ditandai dengan supremasi kekuasaan kelas kapitalis, namun juga diiringi dengan menguatnya kondisi politik yang semakin hari semakin berkecenderungan rasis.

Situasi ini tentu berbahaya. Karena itu gerakan rakyat memerlukan perspektif atas situasi yang ada. Ada beberapa proposal mengenai bagaimana sebaiknya kita melihat perkembangan yang ada. Pandangan *pertama* muncul dari argumen bahaya populisme itu sendiri. Argumen ini tampak pada artikel Ari A. Perdana<sup>20</sup> yang beranggapan bahwa populisme merupakan ancaman bagi demokrasi sekarang. Oleh karenanya populisme dilihat sebagai penyakit dari dinamika politik kontemporer yang semakin mengglobal. Mengulang posisi Huntington tentang “Benturan Peradaban”, Perdana berpendapat bahwa keterbukaan global sekarang (atau disebutnya sebagai “kosmopolitan liberal”) menciptakan ketidakamanan nilai-nilai lama. Masuknya identitas dan kebudayaan baru menyerang keberadaan nilai-nilai lama yang dianut oleh mayoritas warga. Hal ini kemudian menciptakan respon balik yang reaksioner, dimana warga mayoritas ini merasa bahwa mereka harus mengklaim ulang kepemilikan nilai-nilai masyarakat

yang ada melalui penolakan terhadap identitas baru yang dianggap *liyan* oleh mayoritas tersebut.

Sementara perspektif yang lain mencoba menempatkan kebangkitan populisme dari masalah pertarungan kepentingan dalam ranah ekonomi-politik. Di sini kalangan populis dianggap sebagai bagian dari kekuatan lama yang hendak melawan dominasi elit baru. Hal ini, setidaknya, secara implisit disampaikan oleh Bonnie Setiawan.<sup>21</sup> Bonnie menganggap bahwa elit baru (yang disebutnya sebagai “borjuis putih”) hendak mendorong agenda kapitalisme modern yang berimplikasi pada peminggiran elit-elit lama yang selama ini diuntungkan dengan modus akumulasi rente.

Walau terlihat berbeda, dua perspektif ini setidaknya berangkat dari asumsi yang sama, bahwasannya artikulasi populis yang berkembang sekarang adalah suatu kondisi patologi dari perkembangan demokrasi liberal. Bedanya terletak pada penekanan. Bagi Perdana patologi ini berasal dari ketidaksiapan sistem demokrasi terhadap perubahan relasi budaya karena globalisasi, sementara menurut Bonnie masalahnya terletak pada ‘kanker’ kekuatan lama yang masih bercokol dalam lingkaran kekuasaan yang ada.

Dua argumen ini berada dalam posisi “dua sisi dari satu koin yang sama”, yakni sama-sama memiliki keterbatasan epistemologi. Observasi Perdana secara sengaja mengabaikan peminggiran sistematis kekuatan sosial dalam masyarakat yang ada yang difasilitasi oleh institusi demokrasi itu sendiri. Peminggiran yang difasilitasi oleh kombinasi antara dominasi pengelolaan ekonomi (kapitalisme) neoliberal yang disertai dengan depolitisasi demokrasi liberal melalui pengerdilan ruang politik sebatas politik formal (pemilu dll). Peminggiran ini yang kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang sedang bertarung dengan menggunakan retorika populistis dalam rangka mendapatkan dukungan dalam ruang demokrasi yang ada. Oleh karenanya, tidak ada yang alamiah (baca: esensial) dari identitas atau kebudayaan suatu masyarakat. Asumsi Huntingtonian yang diusung Perdana perlu untuk dikubur selama-lamanya karena asumsi esensialis ini.

Sementara argumen Bonnie keliru untuk mengidentifikasi pola pertem-

---

21 Setiawan, Bonnie, “Ahok Melawan: Apa yang Sebenarnya Terjadi?” <https://indoprogress.com/2017/01/ahok-melawan-apa-yang-sebenarnya-terjadi/>

puran politik yang ada. Apa yang yang disebutnya sebagai ‘borjuasi putih’ adalah angan-angan karena ia bukanlah kategori sosial yang dapat secara berbeda dipisahkan dari kekuatan yang lama. Kekuasaan elit baru, seperti Ahok atau Jokowi, misalnya, masih sangat tergantung dengan topangan elit lama tertentu. Oleh karenanya, walau mereka terlihat mengusung agenda “modernisasi”, namun agenda ini tidak serta merta akan menantang kekuatan politik lama. Selama agenda ini tidak bertentangan dengan kepentingan langsung elit lama, agenda-agenda tersebut tentu dipersilahkan untuk diimplementasikan.<sup>22</sup> Disinilah tawaran Bonnie secara implisit justru membuat kita harus pula mendukung kekuatan lama yang ikut dalam gerbong “borjuasi putih” ini, yang dengannya justru menciptakan pertanyaan mengenai perubahan relasi kuasa.

Untuk itu, alih-alih dilihat sebagai patologi, populisme perlu ditempatkan sebagai gejala dari problem internal ekonomi-politik demokrasi yang berlaku sekarang. Karena kepentingan untuk menciptakan masyarakat pasar yang kompetitif, neoliberalisme menciptakan masyarakat yang sangat rentan karena minimalnya perlindungan Negara. Hidup yang rentan ini semakin diperparah ketika masyarakat tidak memiliki kanal ke politik Negara. Struktur Negara yang ada sudah semakin kebas dari kepentingan masyarakat yang terkena dampak kerentanan itu sendiri. Oleh karenanya politik serta capaian Negara yang ada menjadi sekadar sarana penguasaan segelintir kelompok elite. Hal inilah yang kemudian menciptakan kondisi material bagi perasaan marah dari mereka yang terpinggirkan yang menjadi bahan bakar bagi pemberontakan terhadap sistem politik yang elitis.

Yang diperlukan kemudian adalah menysar problem struktural yang dikritik dalam populisme mengenai sistem demokrasi. Depolitisasi demokrasi liberal yang membatasi proses politik pada sebatas institusi formal tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya bentuk demokrasi. Mobilisasi politik populis membuka kemungkinan untuk melawan dominasi politik elite yang secara struktural diuntungkan oleh pola pengaturan

---

22 Tidak heran jika yang disebut dengan agenda ‘modernisasi’ ini sendiri bekerja secara selektif; misalnya bisa kita lihat pada bagaimana Ahok mengangkgangi proses hukum dalam kasus penggusuran Bukit Duri, walau ia sendiri selalu gencar mempromosikan agenda penegakan hukum. Hal ini mengingat agenda penggusuran itu sangat krusial bagi kepentingan elite Jakarta itu sendiri, terlepas apakah elite tersebut berasal dari kekuatan lama atau bukan.

formal demokrasi liberal. Untuk itu politisasi lebih dalam menjadi krusial dalam perkembangan populisme sekarang.

Akan tetapi politisasi untuk politisasi itu sendiri tidak mencukupi. Kita juga harus sadar bahwa populisme yang muncul sekarang adalah buah dari politisasi faksi elite tertentu yang telah terpinggirkan dalam pertarungan politik formal. Pertanyaannya kemudian, apa agenda politik yang harus diusung agar populisme memiliki kapasitas emansipatif? Jawabannya terletak pada perjuangan politik anti kapitalisme neoliberal itu sendiri. Kerentanan sosial yang dihadapi oleh mayoritas populasi harus diatasi dengan menciptakan agenda kesejahteraan sosial yang universal atau biasa disebut dengan politik sosialis.

Perspektif ini penting karena kerentanan sosial di era neoliberal sekarang bukan hanya sekadar dialami oleh kelas pekerja, tapi juga kelas menengah. Karena terpaan kompetisi bebas yang diciptakan oleh kebijakan neoliberal, kelas menengah yang ada sekarang memiliki resiko yang sama untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Di sini kita menemukan karakter lintas kelas dari politik populis versi kiri. Mungkin selama proses pengorganisasian kita akan menemukan aspirasi yang berbeda (karena posisi kelasnya tentunya!) namun hal ini dapat diantisipasi selama artikulasi politik sosialis dibangun secara inklusif dan menyasar musuh politiknya secara konsisten, yakni kalangan elite berkuasa. Pengalaman kampanye Bernie Sanders di AS dan Jeremy Corbyn di Inggris menunjukkan bahwa metode seperti ini dapat dilakukan.

Dalam salah satu karya lawas yang sempat terlupakan, *Politics and Ideology in Marxist Theory*, Ernesto Laclau sempat berujar tentang “sosialisme sebagai tahapan tertinggi dari populisme.” Di era ketika populisme semakin memasuki relung percakapan publik kita, ujaran ini semakin kuat relevansinya sebagai agenda politik gerakan sosialis Indonesia. Untuk itu, daripada kita menghindari masalah populisme, lebih bermakna bagi kita untuk segera merebut populisme!\*\*\*

Sumber: <https://indoprogress.com/2017/01/merebut-populisme/>

### III

## **Masih soal Populisme, Sedikit Tentang Huntington, dan Sosialisme: Menjawab Muhammad Ridha**

**Ari A. Perdana**

ARTIKEL Muhammad Ridha yang berjudul *Merebut Populisme*<sup>23</sup>, yang menanggapi artikel saya *Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI*, menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut.

Saya dan Ridha sepakat pada satu hal besar: bahwa retorika populis kanan yang sekarang berkembang memiliki karakter rasis dan bisa mengarah ke fasisme. Pada akhirnya, ini adalah bahaya bagi demokrasi. Tulisan Ridha sudah maju beberapa langkah dengan mengajukan solusi dan agenda aksi. Intinya adalah bagaimana gerakan sosialisme harus merebut narasi populisme.

Ada beberapa hal dari artikel Ridha yang akan sayaanggapi balik.

*Pertama*, Ridha melihat artikel saya memiliki keterbatasan epistemologi. Saya sepakat dengan penilaian ini. Meski pertanyaannya adalah, adakah tulisan – apalagi dalam format artikel – yang tidak memiliki keterbatasan epistemologi. Bagi saya, sebuah artikel adalah satu dari banyak titik, atau satu keping dari gambar acak. Hanya setelah kita menghubungkan titik-titik itu atau menyusun kepingan-kepingan, barulah gambaran yang utuh akan didapat.

Artikel saya adalah satu dari banyak cara pandang dalam melihat fenomena seperti kemenangan Brexit, Trump. Dari cara pandang yang spesifik itu saya coba melihat kesamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia, de-

ngan bungkus yang berbeda tapi punya isi yang sama. Ketika saya memilih sebuah cara pandang, itu seperti pilihan tempat duduk di konser dimana panggung berada di tengah. Saya yang duduk di dekat pemain drum bisa menjelaskan dengan fasih seperti apa penampilan si pemain drum. Namun perspektif saya terhadap pemain gitar menjadi terbatas. Ini bukanlah perkara sengaja atau tidak, tapi konsekuensi dari posisi yang saya pilih.

Oleh karena itu, bahwa artikel saya “mengabaikan peminggiran sistematis kekuatan sosial dalam masyarakat yang ada yang difasilitasi oleh institusi demokrasi itu sendiri” seperti Ridha katakan, bukan masalah sengaja atau tidak. Ini adalah bagaimana kita melihat satu fenomena dari berbagai sudut pandang, dan bagaimana kita membandingkan berbagai sudut itu.

*Kedua*, Ridha memberi catatan bahwa tesis *cultural backlash* yang saya ajukan sebagai bingkai dalam menjelaskan menguatnya populisme adalah “mengulang posisi Huntington tentang Benturan Peradaban.” Ini tidak sepenuhnya akurat.

Kalau kita ingat, konstruksi tesis Benturan Peradaban dimulai dari preposisi bahwa ‘kultur itu penting’ (*culture matters*). Sampai di sini, dan hanya sampai di sini, artikel saya sejalan dengan Huntington. Selanjutnya Huntington berpendapat bahwa pola konflik pasca Perang Dingin akan diwarnai oleh konflik terkait kultur atau nilai-nilai. Peradaban, lanjutnya, adalah bentuk agregasi dari kultur.

Lewat beberapa eksposisi, ia lalu mengajukan tesis bahwa nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh peradaban Barat-Judeo-Kristen akan mengalami benturan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peradaban lain. Secara spesifik Huntington menyebut konflik antara peradaban Barat dan Islam akan menjadi arena konflik yang baru.

Ada banyak dukungan dan sanggahan atas tesis Huntington, yang di luar lingkup artikel saya. Tapi secara implisit, artikel saya justru menunjukkan keterbatasan dari tesis Huntington: ia mengesampingkan faktor benturan internal di dalam satu peradaban (*clash within civilization*). Di peradaban Barat sendiri, seperti saya tulis, masih ada pertentangan antara nilai-nilai konservatif dan kosmopolitan liberal. Terlihat dari perdebatan soal imi-

grasi, LGBT, feminisme, perubahan iklim, untuk menyebut beberapa isu.

Benturan nilai-nilai juga terjadi di dalam dunia Islam, meski untuk memetakan itu agak lebih rumit. Ada perseteruan abadi Sunni dan Syiah. Di dalam Sunni dan Syiah juga ada pertarungan sendiri antara liberal dan konservatif. Di Indonesia ada diskursus soal Islam kultural dan Islam politik.

Singkatnya, tidak tepat untuk menggunakan bingkai benturan peradaban untuk melihat argumen di artikel.

Meski demikian, menarik untuk mengaitkan menguatnya populisme ala Brexit dan Trump dengan buku Huntington tahun 2004, *“Who Are We?”* Di situ Huntington berpendapat bahwa Amerika adalah sebuah kual (melting pot) dimana berbagai kultur bertemu. Tapi di dalam kual itu berbagai kultur berbeda tersebut melebur dengan kultur yang selama ini menjadi penyangga identitas masyarakat Amerika yaitu Anglo Saxon Protestan. Huntington mengutarakan kekuatirannya bahwa identitas itu semakin tergerus oleh arus imigran yang mempertahankan kultur yang dibawa dan tidak berusaha melebur di kual identitas.

Buku ini mendapat reaksi keras, terutama dari kelompok liberal yang pro-imigrasi. Menurut mereka, konsep *melting pot* perlu dipertanyakan relevansinya dan Amerika mungkin lebih menyerupai mangkuk salad dimana berbagai kultur menyatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Saya masih tidak bisa setuju dengan pendapat Huntington. Tapi di sisi lain perdebatan yang terjadi di tahun 2004 itu ternyata masih terus terjadi. Bahkan menangnya Trump yang membawa ide kebijakan anti imigran bisa dibilang menjadi serangan balik atas gagasan ‘Amerika sebagai mangkuk salad’ yang terbuka pada imigran dan multikulturalisme.

*Ketiga*, Ridha menulis, “tidak ada yang alamiah (baca: esensial) dari identitas atau kebudayaan suatu masyarakat. Asumsi Huntingtonian yang diusung Ari perlu untuk dikubur selama-lamanya karena asumsi esensialis ini.” Ini perlu penjelasan lebih jauh. Asumsi (atau maksudnya tesis?) Huntingtonian mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah tesis terkait benturan peradaban, seperti saya jelaskan sebelum ini, artikel saya justru menunjukkan keterbatasan dari tesis itu.



Atau yang ditolak adalah asumsi Huntingtonian bahwa *culture matters*? Saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang Ridha maksudkan, jadi saya akan membiarkan ini sebagai sebuah pertanyaan. Hanya satu hal. Klaim bahwa sebuah asumsi atau tesis “perlu dikubur selama-lamanya” menyiratkan sebuah arogansi intelektual; atau bahkan sikap anti intelektual. Sebuah teori, hipotesis, asumsi, bahkan spekulasi, tidak perlu dikubur. Jika ia tidak relevan atau tidak teruji, ia akan terpinggirkan dengan sendirinya. Sebaliknya jika ia masih dianggap relevan, ia akan terus dibicarakan.

Yang membuat Huntington masih relevan bukanlah kebenaran prediksinya. Tapi ia memberi sebuah bangunan hipotesis yang mendorong orang terus mempertanyakan dan mengujinya. Dalam banyak hal ia keliru. Tapi kita tidak bisa tahu dia keliru atau tidak jika sejak awal kita memilih untuk mengubur pemikirannya ketimbang mempertanyakan.

*Keempat*, harus saya akui, artikel saya belum masuk ke tawaran solusi. Di sini saya sangat mengapresiasi Ridha yang sudah coba menawarkan solusi dan agenda ke depan. Ridha menyerukan untuk merebut populisme, dan mengisinya dengan artikulasi politik sosialis yang lebih inklusif.

Saya tidak dalam posisi untuk mendukung atau menyanggah tawaran itu. Tapi jika populisme hendak direbut, tentu kita perlu paham: dari siapa ia direbut, siapa yang akan merebut, dan untuk siapa? Jika ditarik ke kondisi Indonesia, kita perlu pemetaan yang lebih jelas, siapa saja yang mengungus narasi populis Islam-kanan; kelompok mana yang mendukung, dan mengapa?

Ridha merujuk pengalaman kampanye Bernie Sanders di AS dan Jeremy Corbyn di Inggris sebagai contoh penerapan artikulasi politik sosialis. Ini bisa diperluas dengan melihat bagaimana partai kiri Eropa seperti Syriza di Yunani dan Podemos di Spanyol menjadi seperti anomali di tengah menguatnya populisme kanan. Apakah mereka konsisten dan cukup berhasil membawa agenda-agenda sosialis, atau menjadi lebih pragmatis.

Jangan lupakan juga Amerika Latin. Kondisi Venezuela sekarang perlu dikaji dengan kepala dingin, apakah itu menunjukkan keberhasilan atau kegagalan eksperimen populisme kiri Chavez. Bandingkan juga dengan Mi-

chelle Bachelet di Chile dan Lula Brazil yang bisa menggabungkan retorika kiri dengan manajemen makroekonomi yang disiplin.

Artikel saya, sekali lagi, lebih merupakan observasi awal. Ada banyak perkembangan yang perlu kita ikuti ke depan untuk kita bisa lebih memahami ke mana arah menguatnya populisme kanan. Di bagian akhir artikel, saya menuliskan tiga hal yang bisa ditindaklanjuti oleh studi yang lebih mendalam. Tentu ada banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.

Untuk itulah kita perlu perspektif yang cukup beragam, tidak tunggal, untuk melihat fenomena ini.\*\*\*

Sumber: <https://indoprogress.com/2017/02/masih-soal-populisme-sedikit-tentang-huntington-dan-sosialisme-menjawab-muhammad-ridha/>

## IV

# **Yang Patut Dikhawatirkan adalah Politik yang Rasis, bukan Populisme Islam**

**Abdil Mughis Mudhoffir**

DEBAT soal populisme yang sedang berlangsung antara Ari A. Perdana<sup>24</sup> dengan Muhammad Ridha,<sup>25</sup> menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam pandangan saya, sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara apa yang dikemukakan keduanya dalam memahami fenomena populisme di beberapa tempat. Ada beberapa kesamaan pandangan di antara keduanya, misalnya mereka bersepakat, seperti diakui Perdana dalam tanggapannya,<sup>26</sup> bahwa populisme kanan baik yang menggunakan idiom keagamaan maupun nasionalisme menjadi ancaman bagi demokrasi. Sebab, bagi mereka mobilisasi sentimen identitas semacam itu memberi jalan bagi menguatnya rasisme yang pada akhirnya akan meminggirkan kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Kemenangan Donald Trump di AS dan Brexit di Inggris, merupakan contoh kasus mutakhir yang juga dirujuk oleh kedua penulis dalam rangka menopang pandangan mereka.

Perbedaan yang paling pokok di antara keduanya terletak pada titik pijak dan fokus analisis yang digunakan dalam melihat populisme. Perdana secara sengaja memusatkan analisisnya pada fenomena populisme kanan yang menguat di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa dan bagaimana populisme kanan muncul dan semakin populer belakangan ini. Sementara itu, Ridha lebih menekankan pada aspek aksiologis dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan dengan perangkat konseptual populisme dalam

---

24        Lihat bab I dalam buku ini.

25        Lihat bab II dalam buku ini.

26        Lihat bab III dalam buku ini.

merespons menguatnya populisme kanan. Karena berangkat dari titik tolak yang sama sekali berlainan, perdebatan di antara keduanya tampaknya lebih disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran antara apa yang dimaksudkan oleh penulis dan pembacanya.

Penekanan Perdana pada fenomena populisme kanan yang dianggap dapat merusak tatanan demokrasi dipahami oleh Ridha seolah pandangan itu dimaksudkan oleh Perdana berlaku secara umum untuk semua jenis populisme. Hal ini yang membuat Ridha lantas memberikan ajakan untuk tidak menghindari masalah populisme tetapi bagaimana merebutnya, meskipun soal ini tidak mendapat porsi penjelasan yang memadai dalam tulisannya. Menurut saya, Perdana jelas mengambil posisi sebaliknya. Tanggapan Perdana yang mengemukakan kesamaan posisi dalam melihat populisme kanan sebenarnya dapat menyudahi perdebatan di antara mereka. Namun, perdebatan keduanya seolah berkepanjangan karena adanya tanggapan-tanggapan yang sesungguhnya tidak perlu dikemukakan, terutama karena relevansinya terlalu jauh dari pokok diskusi. Untuk itu, saya mencukupkan komentar atas perdebatan di antara kedua penulis sampai di sini.

\*\*\*

Yang hendak saya diskusikan lebih jauh adalah bahwa kedua penulis bersepakat ihwal kemungkinan menguatnya populisme Islam di Indonesia. Ada dua alasan yang mereka kemukakan: *pertama*, terdapat tren menguatnya populisme kanan di beberapa negara termasuk yang dianggap paling demokratis sekalipun seperti di AS, yang punya amplifikasi di Indonesia. *Kedua*, adanya fenomena keberhasilan aksi “Bela Islam” dalam memobilisasi massa lintas-kelas yang sangat besar.

Menurut Perdana, pasca aksi “Bela Islam”, kepemimpinan *de facto* gerakan Islam populis saat ini terletak pada figur Rizieq Shihab yang selama ini berada di luar sistem. Baginya, sejarah Eropa telah membuktikan kemenangan populisme yang berasal “dari gerakan di luar sistem” yang “sangat rentan berubah menjadi fasisme begitu ia mendapat mandat elektoral”. Senada dengan pandangan tersebut, Ridha meyakini bahwa “politik Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang populisme” sebagai “efek

mobilisasi populisme Islam” yang rasis. Kemenangan Trump di AS dan Brexit di Inggris juga diyakini Ridha memiliki resonansi terhadap semakin populernya politik rasisme dan sektarianisme di tingkat global, termasuk diantaranya di Indonesia.

Jika menengok pada perkembangan sejarah gerakan Islam di Indonesia, apa yang dibayangkan oleh Perdana dan Ridha sesungguhnya terkesan agak berlebihan. Sejak era Suharto, sendi-sendi yang mampu menopang pengorganisasian massa di tingkat bawah telah lama rapuh akibat kebijakan politik massa mengambang dan korporatisme Islam. Sementara itu, pengusaha besar Muslim juga tumbuh sebagai produk dari kronisme Suharto dengan pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa. Hingga kini kondisi serupa masih direproduksi. Sebagaimana dikemukakan Vedi Hadiz (2016), ini yang membuat populisme Islam di Indonesia relatif kurang berhasil dibandingkan di Turki maupun dalam taraf tertentu di Mesir.

Berbagai elemen kelompok Islam, baik yang berada pada jalur politik formal maupun di luar itu, memiliki agenda yang berbeda-beda, saling bersaing satu-sama lain, bahkan menjadi bagian dalam sistem oligarki. Hingga kini juga tidak ada borjuis muslim besar yang menopang kegiatan-kegiatan sosial untuk kelas bawah, seperti pengusaha Anatolia di Turki. Akibatnya, kelompok *lumpenproletar* juga tercerai berai sementara neoliberalisme telah memangkas layanan-layanan sosial negara. Saluran politik yang mampu memberikan jaminan sosial dan ekonomi secara langsung, tersedia pada kelompok-kelompok preman terorganisir yang kerap menjadi instrumen kepentingan oligarki. Sementara di Mesir, Ikhwanul Muslimin berhasil mengorganisir sebagian besar kelas bawah melalui program-program sosialnya.

Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari perkembangan gerakan Islam belakangan ini, selain rasisme yang terus dimodifikasi untuk mendulang suara dalam pemilu. Rangkaian aksi “Bela Islam” yang berhasil memobilisasi massa lintas-kelas dalam jumlah besar, tidak serta merta memberi jalan bagi menguatnya populisme Islam di Indonesia. Harus dipahami bahwa kemampuan Front Pembela Islam (FPI) dalam memobilisasi massa dalam aksi “Bela Islam”, tidak bisa dilepaskan dari banyaknya pihak-pihak yang diuntungkan dengan penolakan Ahok

sebagai calon gubernur DKI Jakarta. FPI memperoleh momentum yang tepat di saat elite-elite ekonomi politik yang sedang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta memerlukan peran-peran tertentu yang dapat menurunkan popularitas lawan politik. Harus pula diingat, FPI adalah organisasi yang semula kurang populer karena kerap diidentikkan dengan aksi kekerasan dan main hakim sendiri.

Pertanyaannya, mengapa FPI mendadak mendapat popularitas dari kalangan kelas menengah Muslim yang sebelumnya enggan diasosiasikan dengan organisasi tersebut? Banyak pengamat menilai hal itu disebabkan oleh semakin meningkatnya konservatisme Islam di Indonesia. Penjelasan semacam itu mungkin memang tidak bisa diabaikan, tapi apa yang membuat mereka pada akhirnya mengartikulasikan kepentingan politiknya secara lebih terbuka? Jawabannya barangkali dapat ditemukan pada bagaimana negara pada era Jokowi memperlakukan kelompok Muslim konservatif tersebut. Jokowi memiliki kebijakan yang bertolakbelakang dari presiden sebelumnya, SBY, yang cenderung akomodatif terhadap kelompok Muslim konservatif. Artinya, dukungan kelas menengah Muslim konservatif terhadap aksi “Bela Islam”, bukan semata-mata karena faktor individual Rizieq atau FPI, melainkan karena adanya persinggungan berbagai kepentingan baik yang berhubungan dengan kekecewaan terhadap Negara atau yang berkaitan dengan kontestasi pilkada.

Kesuksesan FPI memobilisasi rangkaian aksi massa dalam jumlah besar, dengan demikian, sulit dikatakan sebagai simtom bangkitnya populisme Islam yang menjanjikan di Indonesia. Meskipun telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dari kelas sosial yang berbeda-beda, gerakan ini tidak dibangun berdasarkan aliansi multi-kelas, melainkan lebih sebagai aliansi kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Buktinya, kontradiksi internal dalam aliansi itu tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan kelas yang berbeda, melainkan berdasarkan kelompok-kelompok sosial yang beragam. Front Betawi Rempug (FBR), misalnya, sejak awal menunjukkan sikap tidak hendak terlibat terlalu jauh dalam aksi “Bela Islam”. Dalam aksi terakhir 21 Februari 2017 yang diprakarsai oleh Forum Umat Islam (FUI), Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir dan Ma’ruf Amin bahkan secara tegas menolak diasosiasikan dengan aksi tersebut.<sup>27</sup>

Kekhawatiran yang dikemukakan Perdana dan Ridha akan kemungkinan menguatnya populisme Islam, dengan demikian menjadi kurang beralasan. Popularitas yang diperoleh FPI pasca serangkaian aksi “Bela Islam” harus dipahami sebagai bagian dari politisasi oleh kepentingan oligarki ekonomi politik. Dalam konteks semacam ini, sulit membayangkan FPI akan memperoleh mandat elektoral yang mampu mengubah politik populis yang di luar sistem menjadi fasisme, sebagaimana dikemukakan Ari berkaca dari pengalaman Eropa. Menguatnya populisme kanan di beberapa tempat itu dengan demikian tidak menemukan resonansinya dalam konteks sosial politik di Indonesia, sebagaimana diklaim Ridha. Harus diingat bahwa FPI sejak awal bukanlah kelompok Islam yang dominan dan besar. Belakangan organisasi ini memiliki pengaruh yang luas lebih karena elite-elite oligarki berkepentingan dan diuntungkan oleh peran-peran yang dilakukan oleh FPI dalam rangka mengakumulasi dan memproteksi sumber daya ekonomi dan politik.

Serangan bertubi-tubi melalui berbagai laporan kepolisian yang dilakukan oleh pendukung Ahok dan Jokowi terhadap FPI, juga tidak berarti bahwa Negara – yang juga merepresentasikan kepentingan oligarki – mengeksklusi sepenuhnya organisasi ini. Buktinya, meskipun telah dinyatakan sebagai tersangka, Rizieq, seperti halnya Ahok, tidak juga ditahan. Tito Karnavian, Kapolri yang kerap dianggap sebagai sosok reformis dan tengah mendorong aparat kepolisian memproses secara tegas berbagai kasus hukum Rizieq, pada saat menjabat Kapolda Metro Jaya juga memberikan sanjungan kepada Rizieq sebagai tokoh Islam yang sangat menghargai perbedaan dan FPI sebagai organisasi yang toleran.<sup>28</sup> Artinya, sebagaimana telah ditunjukkan dalam sejarah sejak Orde Baru, hubungan antara kelompok-kelompok kekerasan dengan elite-elite oligarki senantiasa bersifat fluktuatif: terkadang berkawan, di saat yang lain seolah-olah disingkirkan. Dengan kata lain, euforia kebangkitan Islam nampaknya akan berakhir seiring dengan usainya Pilkada, siapapun yang terpilih. Akan tetapi, seperti halnya fobia komunisme, politik yang rasis dan sektarian dapat sela-

---

saya-larang-umat-islam-ikut-itu. <https://news.detik.com/berita/3426497/gnpf-muidan-habib-rizieq-nyatakan-tidak-ikut-aksi-212>

lu dimunculkan kembali oleh kepentingan oligarki dengan memanfaatkan kelompok-kelompok semacam FPI.\*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2017/02/yang-patut-dikhawatirkan-adalah-politik-yang-rasis-bukan-populisme-islam/>*



## V

# Sekali Lagi Tentang “Merebut Populisme”: Tanggapan atas Tanggapan

**Muhammad Ridha**

DALAM salah satu artikel klasik tahun 1930, “Wave Of Materialism” dan “Crisis of Authority,” Sang Komunis Besar asal Italia Antonio Gramsci sempat berujar; “krisis terjadi tepatnya karena yang lama sedang sekarat dan yang baru tidak dapat muncul; dalam peralihan ini berbagai gejala mengerikan muncul!” Ujaran lampau dari Gramsci ini setidaknya tengah menangkap semangat zaman kita sekarang. Krisis kapitalisme global yang tidak kunjung pulih memang mengondisikan ladang perlawanan terhadap kekuasaan kelas berkuasa. Namun perlawanan ini tidak berarti akan menciptakan alternatif baru yang progresif yang berguna bagi politik rakyat pekerja. Alih-alih situasi ini justru memunculkan bentuk-bentuk politik absurd yang tidak kalah mengerikannya dari posisi *status quo*.

Dalam kerangka inilah saya akan mencoba untuk memperjelas posisi saya perihal argumen *Merebut Populisme vis a vis* artikel Ari A. Perdana<sup>29</sup> dan Abdil Mughis Mudhoffir<sup>30</sup>. Saya berpendapat bahwa kedua argumen yang diajukan masih memiliki kelemahan dalam memahami momen populis yang muncul sekarang, yang dengannya tentu berimplikasi pada keterbatasan dalam merespon momen populis sekarang ini. Sebelumnya perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa antara artikel Perdana dan Mughis memiliki tujuan argumen yang berbeda walau keduanya sama-sama terkait dengan kritik atas wacana “merebut populisme”: Artikel Perdana hendak melakukan respon atas kritik saya, sementara Mughis melakukan kritik atas posisi saya. Untuk keperluan penjelasan, saya akan mencoba untuk merespon dua artikel ini satu persatu.

---

29        Lihat bab III dalam buku ini.

30        Lihat bab IV dalam buku ini.

## Apologi Pendekatan Kebudayaan?

Ada empat poin tanggapan dari Perdana terhadap kritik saya. Keempat poin ini meliputi: 1) perlunya melihat suatu fenomena sosial dengan membandingkan berbagai sudut pandang; 2) penyangkalan bahwa penjelasan populismenya berada dalam kerangka Huntingtonian; 3) kritik atas pernyataan saya tentang “asumsi Huntingtonian harus dikubur selama-lamanya” sebagai suatu arogansi intelektual; dan 4) klarifikasi bahwa artikel sebelumnya memang tidak diniatkan untuk menawarkan solusi.

Dari respon-respon ini, saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

*Pertama*, benar bahwa dalam menjelaskan fenomena sosial kita harus membandingkan berbagai sudut pandang. Namun bukan berarti tiap sudut pandang memiliki kebenaran yang sama. Jika itu diterima, maka kita akan terjebak dalam relativisme yang dengannya kita tidak dapat menilai apa yang benar dari suatu pernyataan tentang fenomena sosial. Untuk itu menjadi penting kemudian untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai cara pandang, apakah cara pandang yang ditawarkan memiliki kekuatan penjelasan yang dibutuhkan untuk memahami suatu peristiwa sosial secara benar.

*Kedua*, dalam kaitannya dengan klarifikasi cara pandang, di sini saya mengajukan klaim bahwa argumen *culture matters* sebagaimana yang dikemukakan Perdana adalah argumen Huntingtonian. Perdana mungkin membela diri bahwa ia justru berargumen perihal pertarungan dalam peradaban (*clash within civilization*) yang dengannya berbeda dengan Huntington (*clash of civilization*), dimana dalam kebudayaan itu sendiri ada pertarungan sub-kebudayaan. Bisa saja ini dianggap sebagai perbedaan dengan argumen Huntington. Namun yang luput dari tanggapan Perdana adalah apakah sifat dasar (*nature*) dari kebudayaan (dan tentu sub-kebudayaan)? Apakah suatu (sub) kebudayaan disebut kebudayaan hanya karena dia berbeda dari (sub) kebudayaan yang lain? Jika ini dianggap benar, bukankah kita kemudian terjebak dalam logika tautologi dimana kebudayaan ada karena perbedaan kebudayaan? Ketika Perdana tidak mengungkapkan sifat dasar ini, maka sebenarnya dia tidak beranjak ke mana-mana dari premis

pengetahuan Huntington mengingat penjelasan tentang posisi identitas dan kebudayaan ditempatkan secara a-historis. Walau mengelak, Perdana juga, sama seperti Huntington, menempatkan kebudayaan menjadi terlepas dari keseluruhan dinamika masyarakat yang menyejarah dengan struktur ekonomi-politik yang ada. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa perbedaan budaya tidak melulu menciptakan benturan budaya, kehadiran kebudayaan baru tidak melulu menciptakan ketidakamanan bagi mereka yang menganut budaya lama. Hal ini tentu sudah dibuktikan dengan adanya pengalaman asimilasi dan akulturasi antar kebudayaan dalam sejarah masyarakat. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa perbenturan kebudayaan juga dimungkinkan. Oleh karenanya kita perlu mempertanyakan lebih jauh, lalu apa yang sebenarnya mendorong terjadinya benturan suatu kebudayaan jika perbedaan kebudayaan itu tidak melulu mendorong terjadinya benturan (atau ketidakbenturan)? Jawaban ini tidak dapat ditemukan dalam penjelasan dari kebudayaan itu sendiri. Ada dimensi non budaya yang ikut memengaruhi dinamika budaya. Disinilah kita harus melihat bahwa ada dimensi non-kultural (i.e ekonomi-politik) yang harus ikut dimasukkan dalam penjelasan ketika kita hendak berbicara tentang budaya itu sendiri. Dalam kerangka ini, bagi saya, Ari secara tidak sadar justru mereproduksi argumen Huntingtonian.

*Ketiga*, Implikasi dari argumen dari poin ke dua adalah kita harus memutuskan bahwa penjelasan yang berdasarkan kebudayaan, sebagai penjelasan yang buruk yang justru mengaburkan pemahaman kita atas situasi sosial. Oleh karenanya, pernyataan “harus dikubur selama-lamanya” lebih tepat untuk ditempatkan sebagai suatu kejujuran yang vulgar dibandingkan sebagai arogansi. Saya tidak menolak akan adanya suatu argumen kebudayaan, namun sekali lagi cara pandang kebudayaan itu harus ditempatkan secara lebih komprehensif dalam kaitannya dengan konstelasi ekonomi-politik masyarakat yang menyejarah. Ketika kita tidak menempatkan penjelasan ini dalam totalitas tersebut, kita akan kesulitan untuk memahami mengapa suatu kebudayaan bereaksi dan memiliki gaung dalam suatu momen sejarah tertentu. Dan mengulang-ulang perspektif yang keliru tentu akan berbahaya bagi pengetahuan itu sendiri.

## **Populisme Islam, Keterbatasan Argumen Oligarki, dan Pentingnya Analisa Kelas**

Mughis mengkritik saya bahwa terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa populisme Islam akan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Bagi Mughis, momen populisme Islam tidak dapat dilepaskan dari konflik internal dalam tubuh oligarki Indonesia dalam memperebutkan sumber daya Negara. Oleh karenanya alih-alih dikhawatirkan, populisme Islam yang ada justru tidak lebih dari *business as usual* dari oligarki itu sendiri. Jika memang ada yang perlu dikhawatirkan tentu adalah artikulasi rasis di balik populisme Islam tersebut.

Terdapat beberapa kebenaran dalam argumen ini. Perihal adanya kontestasi antar elite oligarki yang ikut memengaruhi dinamika populisme, bukanlah sesuatu yang saya tolak. Dan itu sudah banyak dibuktikan dengan adanya beberapa analisa yang ada sebelumnya (yang membuat saya memang sengaja untuk melewatkan penjelasan tentang oligarki dan populisme Islam).

Akan tetapi yang luput dari pandangan ini adalah mengapa bisa terjadi mobilisasi massa yang besar pada saat itu? Walau harus diakui bahwa ada peranan kalangan oligarki untuk membiayai mobilisasi, kita juga tetap menemukan adanya elemen-elemen dalam mobilisasi yang secara sukarela terlibat dalam momen tersebut. Dan keterlibatan secara sukarela tersebut ikut memengaruhi tekanan politik dari mobilisasi yang ada. Kita mungkin dapat berargumen tentang terjadinya operasi “kesadaran palsu” dalam mobilisasi kemarin karena massa berhasil dimanipulasi oleh politik elit. Namun kita perlu juga melihat lebih jujur di sini bahwa dengan adanya keterlibatan sukarela, kita setidaknya menemukan bahwa ada situasi agensi yang tidak dapat dijelaskan dari kerangka oligarki semata.

Argumen Mughis semakin bermasalah ketika ia menyatakan bahwa tidak ada aliansi lintas kelas yang muncul dalam momen populisme Islam. Dalam momen 411 dan 212, sangat nyata bahwa artikulasi politiknya adalah tentang penistaan agama yang diiringi dengan ekspresi rasis yang didukung oleh kaum miskin perkotaan dan juga kelas menengah. Situasi kemarahan kaum miskin kota terhadap kebijakan penggusuran pemerintahan

Ahok dikombinasikan dengan penungggangan elite nasional tertentu yang berhasil memobilisasi sektor kelas menengah tertentu, memfasilitasi terjadinya penyatuan posisi politik ini. Vedi Hadiz (2016) berpendapat bahwa populisme harus dipahami sebagai “*suspension of class difference*” (penangguhan perbedaan kelas) dimana kepentingan-kepentingan kelas yang beragam dapat ditangguhkan dalam momen politik tertentu. Dalam kerangka ini, di sini kita menemukan adanya kontingensi penyatuan agenda politik lintas kelas di bawah narasi penistaan agama yang cenderung rasis.

Implikasi dari argumen ini adalah kita perlu waspada dengan hubungan antara populisme Islam sekarang dengan politik rasis. Benar bahwa secara analitis populisme Islam dengan rasisme tidak memiliki hubungan langsung. Namun dalam konjungtur politik yang ada, penubuhan politik rasis hanya dapat dimunculkan melalui populisme Islam. Meremehkan keterkaitan erat dalam perkembangan spesifik ini akan membuat kita tidak awas mengenai bagaimana pasca moblisasi 411 dan 212, artikulasi politik rasis mulai bermunculan dalam ekspresi politik kelas bawah. Lihat, misalnya, beberapa serikat buruh mulai menggggunakan argumen rasis tentang anti Tiongkok. Dan juga bagaimana kita menemukan semakin masifnya dakwah-dakwah yang dilakukan di masjid-masjid komunitas yang sangat berbau rasis. Menyatakan bahwa politik rasis tidak muncul dari populisme Islam sekarang adalah suatu pernyataan yang myopik (rabun) terhadap situasi.

Yang justru diperlukan sekarang adalah suatu kerangka analitis yang materialis dimana kita perlu sensitif tentang materialitas situasi dimana populisme Islam muncul sebagai suatu peristiwa sosial. Kerangka oligarki bisa menjelaskan mengapa ia bisa terjadi, namun tidak memberikan argumen mengenai mengapa ia dapat mewujud dalam bentuknya yang sekarang. Jika memang ia adalah suatu bentuk *business as usual*, tentu artikulasi populisme beserta dengan praktik mobilisasi politik yang menantang keberadaan institusi formal tidak perlu dilakukan oleh kalangan elite. Namun, nyatanya, justru hal ini dilakukan oleh mereka dan berhasil untuk memobilisasi massa. Disinilah kita perlu penjelasan yang lebih memadai untuk menjawab pertanyaan ini.\*\*\*

Sumber: <https://indoprogress.com/2017/03/sekali-lagi-tentang-merebut-pop>

Ari A. Perdana, dkk.

*ulisme-tanggapan-atas-tanggapan-1/*

## VI

# **Menjelaskan Kembali Oligarki dan Euforia Kebangkitan Islam: Tanggapan terhadap Muhammad Ridha dan Para Pluralis**

**Abdil Mughis Mudhoffir**

DALAM rangka menjawab tanggapan Muhammad Ridha<sup>31</sup> atas tulisan saya<sup>32</sup>, tesis oligarki tentang ekonomi-politik Indonesia relevan untuk kembali didiskusikan. Menurut saya, tesis ini dapat membantu menunjukkan bahwa kekhawatiran sebagian pihak akan kebangkitan populisme Islam pasca serial Aksi Bela Islam, sebagai pandangan yang kurang berdasar. Persoalannya, posisi teoretis yang saya gunakan berbeda dengan sudut pandang Ridha dalam melihat oligarki. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan kembali proposisi-proposisi pokok tesis oligarki yang saya gunakan untuk sampai pada simpulan yang pesimistis tentang kebangkitan gerakan Islam pasca Aksi Bela Islam.

Tesis oligarki yang saya gunakan bertolak dari karya Richard Robison dan Vedi Hadiz, baik dalam buku (2004) *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, maupun beberapa artikel mereka, terutama yang berjudul *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia*. Karya-karya ini menekankan oligarki sebagai suatu bentuk relasi kekuasaan produk dari perkembangan kapitalisme awal. Pengertian ini berbeda dengan konsepsi yang dikemukakan Winters (2011, 2013), yang menekankan pada aktor-aktor (oligark) yang berperan dalam politik mempertahankan kekayaan. Namun demikian, cara pandang Weberian ala Winters semacam ini justru paling banyak digunakan oleh para pengkritik tesis oligarki, termasuk yang ditujukan kepada Ro-

---

31        Lihat bab V dalam buku ini.

32        Lihat bab IV dalam buku ini.

bison dan Hadiz. Di sinilah kesalahan pertama Ridha dalam mengkritik tesis oligarki yang digunakan dalam menjelaskan gejala populisme Islam di Indonesia.

Tidak heran jika kemudian Ridha –termasuk beberapa pluralis seperti Edward Aspinall (2014, 2015), Marcus Mietzner (2014, 2015), Loren Rytter (2009) maupun Ian Wilson (2011, 2015) –menilai bahwa tesis oligarki bersifat elitis dan karena itu mengabaikan aspek agensi. Menurut Ridha, adanya beberapa elemen yang terlibat secara sukarela dalam aksi Bela Islam menunjukkan suatu “situasi agensi yang tidak dapat dijelaskan dari kerangka oligarki semata”. Dengan kata lain, Ridha hendak mengemukakan bahwa pengaruh elite oligarki tidak bersifat total dan dominan.

Argumen serupa juga telah dikemukakan Mietzner (2015) yang menilai kemenangan Jokowi pada pemilu 2014, misalnya, sebagai bukti bahwa elite populis di luar kelompok oligarki masih memiliki ruang bermanuver dalam menentukan politik Indonesia. Mietzner, dengan kata lain, juga menegaskan bahwa oligarki tidak berkuasa secara total di Indonesia. Pandangan-pandangan semacam ini, menurut saya, merupakan konsekuensi dari pilihan analisis yang menekankan pada peran aktor dan agensi (*actor-based analysis*) ketimbang pada struktur sosial. Karena itu, oligarki juga lebih dipahami sebagai aktor (elite) daripada sebagai relasi.

Analisis berbasis aktor semacam ini juga telah mendorong mereka membuat kategorisasi elite politik di Indonesia berdasarkan latar belakang ‘ideologisnya’ (lihat Metzner 2011, 2014; Aspinall 2015) menjadi elite oligarki, semi-oligarki, dan non-oligarki atau reformis. Hasilnya, politik Indonesia pasca Soeharto pada akhirnya dipahami secara moralis-normatif sebagai hasil dari pertarungan antara yang baik (kelompok reformis) dengan yang jahat (oligarki). Terpilihnya Jokowi sebagai presiden, misalnya, dipandang secara optimistis oleh Mietzner sebagai kemenangan kelompok reformis. Pertanyaannya, apakah keberhasilan Jokowi merebut kekuasaan politik formal serta-merta membuat agenda reformasi lebih diutamakan ketimbang kepentingan oligarki? Nyatanya, elite-elite yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) justru menjadi bagian dari kabinet Jokowi.



Aspinall (2015, 899) sebenarnya telah mengakui bahwa Jokowi sebagai aktor non-oligarki telah menunjukkan ketidakmampuannya melepaskan diri dari warisan demokrasi yang kolutif. Mengapa? Dalam pandangan pluralis jawaban atas pertanyaan ini dikembalikan kepada kategorisasi aktor politik yang didominasi oleh elite oligarki itu. Sementara analisis yang menekankan pada struktur sosial melihat gejala itu sebagai petunjuk adanya keterbatasan agensi yang sekaligus menegaskan kelemahan pendektakan aktor.

Dengan demikian, apakah elemen-elemen sosial yang diklaim oleh Ridha terlibat secara sukarela dalam aksi Bela Islam itu menunjukkan adanya aspek otonomi agensi terlepas dari struktur sosial? Jika oligarki dipahami sebagai aktor, maka jawaban atas pertanyaan ini adalah 'iya', sebagaimana telah dikemukakan Ridha. Artinya, elemen 'sukarela' itu berada di luar kontrol oligarki yang dipahami sebagai aktor elite. Argumen otonomi aktor semacam ini juga dapat ditemukan pada tulisan-tulisan Ian Wilson dalam menjelaskan fenomena kelompok-kelompok kekerasan semacam FPI dan FBR.

Menurut Wilson (2015, 82), kelompok-kelompok vigilante memiliki otonomi relatif terhadap elite dan karena itu mereka dapat bernegosiasi dengan elite ekonomi dan politik untuk kepentingan mereka sendiri. Otonomi relatif kelompok-kelompok kekerasan semacam itu, dalam pandangan Wilson, tidak dapat ditemukan pada era Suharto. Pada era ini, kelompok kekerasan seperti Pemuda Pancasila, merupakan instrumen kekerasan Negara yang dikendalikan oleh kalangan militer. Kondisi ini merupakan produk dari kekuasaan yang tersentralisasi di bawah kontrol Suharto. Pada konteks ini, menurut Wilson, analisis yang cenderung 'elitis' seperti tesis oligarki masih relevan digunakan. Akan tetapi, dalam konteks kekuasaan yang telah terdesentralisasi, penjelasan yang elitis menjadi kurang berguna. Dengan kata lain, menurut Wilson, otonomi relatif kelompok-kelompok vigilante merupakan produk dari karakteristik kekuasaan yang tidak lagi terpusat.

Kritik terhadap tesis oligarki sebagai analisis yang elitis barangkali memang tepat jika ditujukan kepada Winters. Namun, posisi teoretis Robison dan Hadiz, sebagaimana yang juga saya gunakan, sama sekali berbe-

da karena memahami oligarki sebagai relasi kekuasaan dan menekankan analisis pada struktur sosial. Implikasinya, agensi tidak dapat dipahami memiliki otonomi penuh atas tindakannya terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya. Salah satu ungkapan yang dapat menggambarkan posisi agensi dalam struktur sosial telah dikemukakan oleh Karl Marx (1852) dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*: *'Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the past'*.

Keadaan-keadaan yang melingkupi agensi itu yang disebut sebagai struktur sosial, dan tidak ada seorang pun yang bisa terlepas darinya. Mengandaikan tindakan individu atau suatu kelompok otonom sama saja dengan mencerabut seseorang dari lingkungan sosialnya. Struktur sosial ini, yang terbentuk dari sistem relasi kekuasaan, yang memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan dan kekuasaan serta upaya mempertahankannya atau disebut dengan oligarki. Bertolak dari tesis ini, maka aksi Bela Islam merupakan produk dari relasi kekuasaan yang oligarkis itu.

Keikutsertaan elemen-elemen sosial, terutama dari kalangan Muslim konservatif, dalam mobilisasi gerakan itu dengan demikian tidak lepas dari kerangka oligarki itu. Pada kenyataannya, aksi Bela Islam telah memfasilitasi kepentingan akumulasi kapital dan kekuasaan elite ekonomi politik tertentu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Lihat, misalnya, keterlibatan tokoh-tokoh pendukung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono dalam beberapa aksi Bela Islam yang lalu. Anies Baswedan sebagai salah satu calon kepala daerah yang lolos pada putaran pertama pilkada Jakarta bahkan secara nyata menunjukkan dukungan dan keterlibatannya dalam acara peringatan ke-51 Supersemar pada tanggal 11 Maret 2017 yang lalu bersama tokoh-tokoh Muslim konservatif, termasuk Tommy Suharto.

Dari kasus ini, apakah bisa disimpulkan bahwa beberapa kelompok sosial terlibat secara sukarela dalam aksi Bela Islam? Tentu tidak. Pilihan tindakan mereka tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang oligarkis. Membayangkan adanya elemen sosial dalam aksi Bela Islam yang memiliki kepentingan dan tujuan tersendiri terlepas dari kepentingan oligarki ada-

lah naif. Sederhananya, aksi Bela Islam tidak lain merupakan bagian dari instrumen oligarki dalam upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan dan kapital.

Pertanyaan yang sama juga dapat diajukan untuk menilai apakah Jokowi dan Ahok merupakan tokoh reformis yang independen dan otonom dari kepentingan oligarki? Tentu tidak. Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras ataupun Reklamasi, misalnya, jelas menunjukkan bagaimana Ahok juga menjadi bagian dari oligarki. Masuknya beberapa tokoh militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM serta adanya prioritas kebijakan negara di bidang infrastruktur jelas menunjukkan bahwa Jokowi juga bagian dari oligarki.

Pertanyaan selanjutnya, apakah keberhasilan aksi Bela Islam dalam memobilisasi massa dalam jumlah besar mengindikasikan masa depan gerakan Islam yang menjanjikan? Tentu juga tidak. Mengingat aksi ini tidak lain sekadar instrumen oligarki dalam kontestasi perebutan sumber daya ekonomi dan politik, sehingga keberhasilan menyatukan berbagai kelompok dalam satu gerakan hanya bersifat sementara. Seperti yang telah saya kemukakan pada tulisan sebelumnya<sup>33</sup>, euforia kebangkitan Islam ini akan semakin surut setelah pilkada usai dan kemungkinan besar akan muncul kembali dalam momen kontestasi politik lainnya. Alasannya, fondasi yang memungkinkan terbangunnya populisme Islam tidak tersedia dalam konteks ekonomi politik di Indonesia. Atas dasar ini pula saya berargumen bahwa aksi Bela Islam bukan merupakan aksi yang terbangun dari aliansi lintas kelas, melainkan sekadar aliansi kelompok-kelompok kepentingan.

Artinya, kekhawatiran akan menguatnya populisme Islam di Indonesia pasca aksi Bela Islam merupakan pandangan yang kurang berdasar. Yang patut menjadi perhatian justru euforia kebangkitan Islam itu saat ini juga tengah menjadi retorika yang digunakan oleh oligarki dalam memobilisasi simpati dan dukungan politik, atau sebaliknya digunakan untuk menyerang lawan politik dalam pilkada Jakarta.

Keadaan ini juga yang bisa menjelaskan mengapa wacana publik yang rasis dan sektarian kian merebak belakangan ini. Dengan kata lain, euforia

semu atas bangkitnya Islam telah memberi jalan bagi menguatnya rasisme dan sektarianisme dalam kontestasi politik di Indonesia. Jadi, bukan karena populisme Islam tampak menguat lantas melahirkan politik yang rasis seperti klaim Ridha. Rasisme dapat muncul meskipun euforia kebangkitan Islam tidak hadir, seperti kasus rasisme anti-cina yang mengiringi kejatuhan Suharto.

Sejauh relasi oligarkis terus direproduksi dalam kontur ekonomi-politik di Indonesia, sejauh itu pula politik yang eksklusif dengan menggunakan retorika sektarian dan sejenisnya akan tetap ada. Tawaran Ridha untuk 'merebut' populisme tanpa memberi jalan untuk keluar dari relasi oligarki, dengan demikian, hanya akan menjadi anjuran yang retorik dan sia-sia belaka.\*\*\*

### **Kepustakaan:**

Aspinall, E. 2015. 'The Surprising Democratic Behemoth: Indonesia in Comparative Asian Perspective', *Journal of Asian Studies*, 74(4): 889-902.

Hadiz, V. R. and R. Robison. 2013. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia." *Indonesia* 96 (October): 35-57.

Mietzner, M. 2014. 'Oligarchs, Politicians and Activists: Contesting Party Politics in Post-Suharto Indonesia', dalam Michele Ford and Thomas B. Pepinsky (ed.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell Southeast Asia Program Publications: Ithaca, NY, pp. 99-116.

Mietzner, M. 2015. Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. *Policy Studies* 72, East West Center: Hawaii.

Robison, R and V. R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge Curzon: New York.

Ryter, Loren. 2009. 'Their moment in the sun: the new Indonesian parliamentarians from the old OKP', dalam Gerry van Klinken and Joshua Bark-

er (eds.), *State of authority: the state in society in Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program Publications: Ithaca, NY pp. 181-218.

Wilson, I. D. 2011, 'Reconfiguring Rackets: Racket Regimes, Protection and the State in Post-New Order Indonesia', dalam Gerry van Klinken and Edward Aspinall (eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. KITLV Press: Leiden, pp. 239-260.

Wilson, I. D. 2012. 'Testing the boundaries of the state: gangs, vigilantes and violent entrepreneurs in Southeast Asia', dalam Richard Robison (ed.) *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*. Routledge: London, pp. 288-302.

Wilson, I. D. 2015. *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: coercive capital, authority and street politics*. Routledge: London.

Winters, J. 2011. *Oligarchy*. Cambridge University Press: New York.

Winters, J. 2014. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, dalam Michele Ford and Thomas B. Pepinsky (ed.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell Southeast Asia Program Publications: Ithaca, NY, pp. 11-34.

Sumber: <https://indoprogress.com/2017/03/menjelaskan-kembali-oligarki-dan-euforia-kebangkitan-islam-tanggapan-terhadap-muhamad-ridha-dan-para-pluralis/>

## VII

# Melanjutkan Soal Populisme, Untuk Menjaga Kewarasan Pascapilkada

**Ari A. Perdana**

DUA pemilihan umum di Belanda dan Prancis yang terjadi di awal 2017 memberi sedikit kelegaan. Hasil kedua pemilihan umum itu menunjukkan bahwa gelombang populisme kanan yang sukses membawa kemenangan Brexit di Inggris dan Donald Trump di AS tahun 2016 tidak berlanjut. Geertz Wilders di Belanda dan Marine Le Pen di Prancis, dua tokoh yang selama beberapa tahun terakhir membangun kampanye di atas isu nativitas dan identitas, tidak berhasil merebut suara terbanyak.

Meski demikian, hasil pemilu di kedua negara itu perlu dibaca lebih dalam dari sekadar hasil akhir. Di Belanda, *Partij voor de Vrijheid* (PVV) pimpinan Wilders mendapat 20 kursi dari 150 kursi di parlemen. Ini menjadikan PVV partai kedua terbesar di parlemen setelah *Volkspartij voor Vrijheid en Democratie* (VVD) pimpinan petahana Mark Rutte yang mendapatkan 33 kursi. Dan perolehan 20 kursi VVD adalah kenaikan sebanyak 5 kursi dari pemilu 2012.

Artinya, Wilders tidak sepenuhnya gagal. Sejak awal ia paham bahwa andaipun PVV mendapat suara terbanyak, hampir tidak ada peluang baginya untuk menjadi Perdana Menteri. Sulit bagi partai manapun di Belanda membentuk pemerintahan tanpa koalisi. Dan tidak ada partai yang berminat membangun koalisi bersama PVV. Dengan berada di luar pemerintahan, Wilders bisa leluasa terus memainkan isu populisme tanpa perlu dipusingkan dengan urusan teknis pemerintahan seperti yang dihadapi Trump dan para proponen Brexit sekarang.

Berbeda dengan pemilu Belanda dimana sistem yang ada membuat tidak ada pemenang mutlak, pemilihan presiden di Prancis adalah kontes yang

lebih ketat dan *winner takes it all*. Di putaran pertama tidak ada kontestan yang merebut suara terbanyak. Di putaran kedua, Emmanuel Macron mengalahkan Marine Le Pen dengan suara dua kali lebih banyak.

Dilihat secara terpisah, kemenangan Macron cukup fenomenal. Di usia 39 tahun dengan partai yang belum lama dibentuk, ia bisa menjadi pemimpin salah satu negara terbesar di Eropa. Meski jika dilihat secara keseluruhan, narasi utama dalam pemilu Prancis masih tetap berpusat pada Le Pen. Tepatnya, dorongan untuk tidak menjadikan Le Pen presiden. Dan fakta bahwa Le Pen masih tetap bisa mendorong pemilihan presiden hingga dua putaran, dan mendapatkan sekitar sepertiga suara, menunjukkan bahwa fenomena menguatnya populisme kanan dalam politik elektoral masih tetap perlu diperhatikan.

\* \* \*

Dalam tulisan terdahulu,<sup>34</sup> saya mencoba menyajikan dua hal. *Pertama*, penjelasan mengapa populisme kanan menguat di negara-negara Barat. *Kedua*, sejauh mana kita bisa menggunakan kerangka analisis populisme dalam melihat Pilkada DKI.

Tulisan saya kemudian mengundang tanggapan dari Muhammad Ridha<sup>35</sup> yang menyerukan perlunya merebut narasi populisme lewat politik progresif. Abdul Mughis Mudhoffir<sup>36</sup> memberikan perspektif lain; aksi-aksi bela Islam yang kita lihat dalam masa kampanye bukanlah populisme (spesifiknya, populisme Islam), melainkan perpanjangan tangan oligarki politik yang memainkan politik rasis.

Menanggapi argumen Mughis, Ridha<sup>37</sup> menuliskan bahwa “politik rasis hanya dapat dimunculkan melalui populisme Islam” dan “meremehkan keterkaitan erat dalam perkembangan spesifik ini akan membuat kita tidak

---

34        Lihat bab I dalam buku ini.

35        Lihat bab II dalam buku ini.

36        Lihat bab III dalam buku ini.

37        Lihat bab V dalam buku ini.

awas mengenai bagaimana pasca moblisasi 411 dan 212, artikulasi politik rasis mulai bermunculan dalam ekspresi politik kelas bawah.” Diskusi lalu dilanjutkan oleh Muhammad Fajar<sup>38</sup> dengan beberapa catatan teoretis terkait populisme, yang pemilihan waktunya sangat tepat untuk membuat kita mundur sejenak guna menyusun kerangka berpikir yang lebih solid.

Ridha, Mughis, dan Fajar membantu saya – dan tentunya pembaca yang lain – dalam memahami fenomena populisme dari beberapa sudut pandang. Ibarat pertandingan sepakbola, adanya tayang ulang dari sudut kamera yang berbeda membuat kita paham apa yang tengah terjadi. Harus saya akui, saya belum punya kontribusi intelektual tambahan terhadap diskusi yang berjalan.

Tapi saya ingin mundur beberapa langkah dan kembali ke motivasi tulisan saya yang pertama. Tulisan itu didorong oleh beberapa observasi terhadap menguatnya politik identitas menjelang Pilkada DKI 2017. Ini bukan hal baru sebenarnya. Politik identitas selalu ada, dan di setiap Pemilu atau Pilkada itu selalu dimainkan. Tapi Pilkada DKI 2017 adalah bentuk paling brutal dari politik identitas, melebihi Pilkada DKI 2014 dan Pemilu 2014 yang sebenarnya pun sudah cukup brutal. Ini jelas bukan yang terakhir, dan kebrutalan itu akan meningkat.

Observasi kedua, dukungan terhadap aksi-aksi bela Islam ternyata lintas kelas. Massa aksi-aksi bela Islam terdiri dari kelompok miskin kota yang identik dengan ormas-ormas keagamaan seperti FPI, juga kelompok menengah dan profesional, pengusaha, pelaku bisnis dan pasar modal.

Observasi ketiga, di tulisan saya yang pertama saya agak spesifik menggambarkan sosok Rizieq Shihab sebagai pemimpin *de facto* gerakan aksi-aksi bela Islam. Ia juga menjadi figur yang dianggap perlu untuk didekati oleh kandidat gubernur Anies Baswedan. Mughis berpendapat berbeda; baginya Rizieq Shihab tak lebih dari boneka oligarki.

Beberapa lama setelah tulisan saya yang pertama (dan tanggapan-tanggapan selanjutnya), sejumlah kasus yang membuat Rizieq berhadapan dengan hukum membuat perannya meredup. Saya mulai bisa menerima ar-



gumen Mughis bahwa Rizieq memang hanya boneka yang dimainkan oleh oligarki. Tapi tanpa Rizieq, ternyata gelombang aksi-aksi semacam terus berlanjut. Artinya, seperti tanggapan Ridha selanjutnya, unsur voluntarisme tidak bisa kita anggap remeh.

Observasi keempat, menarik untuk melihat pemenang Pilkada DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berusaha menampilkan *counter-narratives* bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan politik progresif lewat advokasi hak-hak ekonomi dan sosial (*Ecosoc rights*), bukan karena politik identitas. Tapi sulit untuk menampik bahwa di tataran pemilih akar rumput, ketika hitung cepat Pilkada berakhir, yang dominan terlihat adalah luapan ekspresi identitas keislaman. Bukan tentang akan berakhirnya pengusuran atau reklamasi.

Ada banyak observasi lain yang perlu kita kumpulkan sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak titik untuk dihubungkan.

Ini semua terjadi di periode yang kurang lebih sama dengan kemenangan Brexit dan Trump, yang juga dibangun atas isu-isu identitas. Ada banyak pola dan anatomi yang mirip. Karena itulah saya berpendapat, kerangka populisme tetap relevan untuk digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Penjelasan tentang apa yang kita lihat di Indonesia sebagian ada di AS, Inggris dan Eropa daratan, dan sebaliknya.

Jika penjelasan itu ada di sana, mungkin kita juga bisa melihat alternatif solusinya dari tempat-tempat itu, dan juga dari negara-negara lain. Apa yang menyebabkan Macron bisa mengalahkan populisme Le Pen; apa yang ditawarkan oleh VVD untuk meredam PVV di Belanda. Di saat yang sama, kita juga perlu belajar dari kegagalan populisme ala Chavez di Venezuela dan Thaksin di Thailand untuk bertahan.

Singkatnya, kita sedang ada di periode dimana populisme dan politik identitas membuat politik begitu menjengkelkan. Tapi dalam situasi ini saya teringat John Keating dalam film *Dead Poets Society*: kita perlu naik ke atas meja dan melihat “dari sudut pandang yang berbeda”. Ketika pepohonan membuat sudut pandang kita terbatas, kita perlu melihat hutan dari atas.

Itulah mengapa diskusi ini perlu berlanjut, untuk menjaga kewarasan kita setelah Pilkada yang brutal.\*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2017/05/melanjutkan-soal-populisme-untuk-menjaga-kewarasan-pascapilkada/>*

## VIII

# Menjawab Skeptisisme

**Muhammad Ridha**

TIDAK ada jalan pintas menuju ilmu pengetahuan. Begitu setidaknya menurut Karl Marx dalam magnum opusnya *Kapital*. Hal ini setidaknya juga berlaku pada proses pendidikan politik. Proses penransmisian perspektif dalam pendidikan akan selalu menemui skeptisisme. Sayangnya, pertemuan ini bukanlah pertemuan yang mudah karena dengan skeptisisme suatu perspektif selalu dapat dimentahkan. Namun dalam ketidakmudahan ini, kita perlu memahami bahwa sikap skeptis akan selalu berguna bagi pendidikan. Karena dengan skeptisisme, setiap argumen akan selalu dipaksa untuk diperjelas maksudnya. Hal ini tentu akan membantu mempertajam argumentasi kita dan lebih memungkinkan perspektif tersebut diterima oleh orang lain.

Dalam semangat yang sama, skeptisisme adalah respon yang ditemukan dari pembacaan yang saya ajukan dalam artikel<sup>39</sup> saya. Dari masalah ketidakpercayaan atas argumen yang diajukan sampai dengan adanya keterbatasan atas analisa saya, harus diakui masih banyak yang masih skeptis (baca: kritis) atas perspektif yang coba saya tawarkan. Membiarkan skeptisisme ini tidak terjawab tentu tidak masalah, tetapi dalam perkembangan politik sekarang ini dimana ruang politik demokratis terancam untuk semakin mengecil, saya merasa perlu untuk melakukan klarifikasi serta pemberian tanggapan atas skeptisisme yang ada (kritik dari Abdil Mughis Mudhoffir<sup>40</sup> serta tanggapan dari Ari A. Perdana<sup>41</sup> dan Muhamad Fajar<sup>42</sup>).

---

39        Lihat bab V dalam buku ini.

40        Lihat bab VI dalam buku ini.

41        Lihat bab VII dalam buku ini.

42        Lihat bab (XIII) dalam buku ini.

Dengan resiko melakukan banyak pengulangan, artikel ini akan menawarkan kedalaman analitis atas posisi yang coba ditawarkan.

\*\*\*

Untuk itu akan dimulai dengan apa yang sebenarnya saya maksud dengan termin “populisme”. Harus diakui bahwa tidak ada definisi yang pasti tentang populisme. Bahkan di kalangan ilmuwan politik sendiri, tidak ada kesepakatan tentang termin ini. Ini karena populisme memang tidak memiliki substansi ideologi yang tetap. Ia selalu dapat digunakan oleh kalangan kanan ataupun kiri.

Namun terlepas dengan kesulitan ini, bagi saya, populisme masih dapat digunakan sebagai termin untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada. Kapasitas penjelas itu terletak pada sensitivitas termin ini pada momen dinamis dari situasi politik yang ada (kontingensi). Populisme biasa digunakan untuk meneropong perkembangan politik modern tertentu dimana dalam tatanan negara yang ada, kelas yang berkuasa mengalami tantangan legitimasi. Tantangan ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor, seperti, misalnya, krisis ekonomi atau konflik yang akut antar elite itu sendiri. Imbas dari tantangan legitimasi itu selalu berbuah pada munculnya pertanyaan atas keberadaan kelas yang berkuasa itu sendiri.

Dalam kerangka populisme, munculnya pertanyaan ini membuka ruang kemungkinan bagi ketidakpercayaan politik yang berujung pada perlawanan terhadap kelas yang berkuasa. Akan tetapi kita perlu lebih spesifik di sini karena pertanyaan terhadap kemampuan elite tidak secara otomatis akan menciptakan ketidakpercayaan yang berujung pada perlawanan terhadap elite tersebut. Hal itu hanya bisa terjadi sejauh terdapat momen retorika dimana terdapat agensi politik yang melakukan persuasi terhadap masyarakat mengenai kemampuan berkuasa dari kelas yang berkuasa itu sendiri. Dari sini kita lalu menemukan suatu proses konstruksi dimana dalam ranah sosial terjadi pembelahan atas posisi mereka yang berkuasa, yang dikenal sebagai “elite”, dengan mereka yang tidak berkuasa, yang kemudian dikenal sebagai “rakyat.” “Elite” ditempatkan pada posisi yang sepenuhnya antagonistik dengan keberadaan “rakyat.” Di sini, bagi saya, populisme dapat ditempatkan dalam perkembangan momen-momen poli-

tik yang ada.

\*\*\*

Problemnya kemudian, keberadaan “elite sebagai musuh rakyat” dalam populisme tidak dengan sendirinya merupakan perkembangan politik yang progresif. Sebab konstruksi akan “musuh” akan ditentukan oleh posisi retorik apa yang berhasil mempersuasi serta memenangkan agendanya. Mereka yang berhasil memenangkan posisi retoriknya adalah mereka yang memiliki kapasitas politik tertentu dalam memengaruhi massa secara lebih luas. Di sini, menurut saya, momen populisme selalu beriringan secara kuat dengan praktik hegemoni dalam perjuangan kelas. Dalam kerangka Gramscian, hegemoni dapat dipahami sebagai upaya kelas sosial tertentu untuk memimpin/mendominasi kelas sosial yang lain dengan menggunakan ajakan serta kesepakatan (*consent*) yang disokong oleh keberadaan instrumen paksaan (*coerce*) politik tertentu. Oleh karenanya, penerimaan atas suatu posisi retorika tertentu tidak terjadi karena kehebatan dari retorika itu sendiri, namun juga karena adanya faktor pemaksa yang berada di balik retorika tersebut.

Implikasinya tentu dalam momen populis, selalu terdapat blok historis (*historical bloc*) yang terdiri dari berbagai macam kelas sosial. Sebagai suatu aliansi, blok historis ini dipimpin oleh kelas sosial tertentu. Walau begitu, kelas sosial yang dipimpin dalam blok tersebut bukanlah subjek pasif yang hanya sebatas mengikuti saja, mereka juga mampu untuk mereproduksi posisi politik mereka dalam kerangka kepentingan yang sudah ditentukan oleh kelas yang memimpin. Disinilah kemudian kita menemukan proses interpelasi ala Althusser (panggilan) dimana kelas sosial yang dipimpin juga memiliki agensi yang secara relatif otonom dari posisi kelas yang memimpin.

Kerangka ini tepat untuk menjawab kritik yang diajukan Abdul Mughis kepada saya dalam melihat fenomena gerakan Islam selama beberapa waktu belakangan. Mughis menuduh saya tengah berpikir layaknya seorang pluralis, yang menempatkan relasi kuasa antar kelas-kelas sosial sebagai setara. Menurut Mughis, alih-alih setara, justru gerakan Islam yang ada merupakan keberlanjutan dari relasi oligarki yang dominan, karenanya

artikulasi politik yang muncul merupakan artikulasi politik *a la* oligarki. Tentu tidak ada yang membantah bahwa mobilisasi besar gerakan Islam yang terjadi selama beberapa waktu lalu didukung oleh agenda oligarki. Tentu juga kita menemui bagaimana konflik antar elit yang terjadi di tingkatan Negara sangat mewarnai proses perkembangan gerakan Islam tersebut. Banyak elite islam yang sempat diakomodasi oleh Negara di era SBY melakukan perlawanan terhadap “marjinalisasi” politik yang terjadi dalam administrasi kekuasaan Jokowi (dan juga Ahok tentunya). Tidak ada yang membantah signifikansi dari argumen ini.

Akan tetapi kita perlu lebih jeli di sini: Jika memang ini adalah konflik kepentingan antar oligarki sebagaimana biasanya, tentu ekspresi politik yang muncul sulit mengikutsertakan mobilisasi massa. Kita tentu mengetahui bahwasanya pasca 65, politik Indonesia selalu ditandai dengan keberadaan kalangan elite yang tidak memiliki keterkaitan dengan massa. Lalu apa yang membuat, misalnya dalam momen 212, 200 ribu orang yang mengaku “membela Islam” berdemonstrasi melakukan penuntutan tertentu terhadap Negara? Apakah karena 200 ribu massa ini berhasil tunduk terhadap perintah organisasi preman beragama yang memiliki kaitan kuat dengan oligarki, seperti FPI? Jika tidak, maka apa penjelasannya? Disinilah saya memerlukan penjelasan yang lain di luar argumen oligarki.

\*\*\*

Saya berpendapat bahwa mobilisasi massif ini memiliki prakondisi material tertentu dalam perkembangan kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Kapitalisme neoliberal mensyaratkan bahwa ekonomi pasar (global) harus menjadi acuan utama dalam proses akumulasi. Namun proses ini bukan sesuatu yang mudah mengingat imperatif akan ekonomi pasar harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang termaktub dalam negara. Untuk mengatasi masalah ini, kelas yang berkuasa perlu melakukan pemindahan atau dislokasi politik melalui depolitisasi negara. Dengan hal ini proses demokrasi mengalami formalisasi dimana tidak dimungkinkan adanya keterlibatan politik dari masyarakat yang dapat mengganggu kepentingan kelancaran ekonomi pasar. Masalah muncul ketika ekonomi neoliberal mengalami krisis sosial yang ditandai dengan peningkatan ketimpangan walau terjadi pertumbuhan ekonomi. Disinilah kemudian ter-

jadi proses peminggiran atas mayoritas populasi yang sebagian besar terdiri dari rakyat pekerja. Kondisi inilah yang kemudian melatari munculnya pertanyaan terhadap konsensus elite sekitar neoliberalisme.

Namun tentu marjinalisasi atas kelas pekerja ini tidak mencukupi dengan sendirinya. Diperlukan penyebaran gagasan tertentu agar marjinalisasi ini membuahkan kemarahan terhadap elite yang berkuasa. Bagi saya, kita dapat memasukkan analisa oligarki ke dalam bingkai penjelasan. Penyebaran gagasan politik Islam sektarian-rasis yang didukung oleh organisasi preman seperti FPI, merupakan bagian dari diseminasi retorika faksi elite tertentu untuk mendapatkan dukungan dari rakyat pekerja yang dipinggirkan. Belum lagi konteks pertarungan elite dengan spesifik spasial (seperti di perkotaan Jakarta) turut menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Namun kita perlu bertanya lebih lanjut, mengapa politik Islam yang dipilih? Menurut saya karena organisasi Islam yang sektarian ini yang berada dekat dalam pengalaman keseharian rakyat pekerja. Organisasi ini menjadi instrumen penting dalam menggaet kalangan miskin perkotaan untuk menjadi bagian dari kekuasaan negara. Alasan keberadaan organisasi Islam garis keras ini merupakan bagian dari upaya kekuasaan negara untuk melakukan pukulan politik terhadap perlawanan rakyat. Walau begitu, keberadaannya sangat tergantung dengan kepentingan elit politik dimana pada kondisi sekarang mereka juga mengalami peminggiran. Komposisi antara faksi elite borjuasi yang tidak puas, keberadaan organisasi Islam garis keras yang dipinggirkan, serta kemarahan rakyat pekerja perkotaan yang kebanyakan adalah kalangan miskin kota terhadap operasi neoliberalisme menjadi bahan baku utama dari suatu aliansi lintas kelas yang kemudian saya sebut sebagai populisme Islam.

Dengan ini saya menolak pernyataan Mughis bahwa saya adalah seorang pluralis yang abai tentang kekuasaan yang dominan. Mughis selalu berbicara bahwa semua kepentingan oligarki yang beroperasi di balik gerakan Islam saat ini adalah kepentingan akan akumulasi kapital. Akan tetapi Mughis secara tidak sadar (atau mungkin tidak peduli) sama sekali absen dalam menjelaskan keberadaan relasi sosial yang kontradiktif di balik proses akumulasi, yakni kontradiksi antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Dalam hal ini, tentunya ketika kita berbicara mengenai perkembangan kapitalisme, maka kita harus mengungkapkan kontradiksi ini secara ek-

split dalam analisa. Implikasinya tentu dalam kapitalisme itu sendiri dinamika kekuasaan yang ada selalu mensyaratkan keberadaan entitas yang lebih dari satu. Walau terdapat suatu kekuatan dalam struktur yang ada, dominasi ini harus ditempatkan secara relasional dimana kekuatan suatu kelas tertentu akan bersifat relatif dengan kelas sosial yang lain. Di sini akhirnya, bagi saya, tesis oligarki mengabaikan dinamika relasional kelas dalam menjelaskan proses kapitalisme.

Hal lain yang juga perlu ditanggapi adalah mengenai status “kesukarelaan” (sebagaimana yang diargumenkan oleh Ari Perdana, Abdil Mughis dan Muhammad Fajar tentang artikel saya). Tentu adalah suatu kekeliruan yang fatal bagi setiap pembelajar ilmu sosial untuk mengatakan tindakan agensi sebagai sesuatu yang nir-struktur. Namun kita harus ingat bahwasanya dalam proses hegemoni, terjadi proses persuasi kelas yang dapat berimplikasi pada terjadinya reproduksi gagasan kelas yang memimpin terhadap kelas yang dipimpin. Reproduksi ini membuat kelas yang dipimpin (baca: rakyat pekerja) menginterpretasikan gagasan tersebut dalam artikulasi serta ekspresi mereka sehari-hari. Di sini letak “kesukarelaan”-nya. Karena banyak elemen rakyat pekerja ini secara praktis menggunakan gagasan kelas berkuasa untuk memahami realitas yang dihadapi mereka. Hal ini menjadi mungkin karena adanya perkembangan tingkat religiusitas di masyarakat kita dimana nilai serta gagasan agama (khususnya Islam) tersosialisasi secara massif dan terus menerus. Sehingga ketika ada gagasan Islam tertentu yang berhasil menang ditingkatan wacana yang muncul dalam perkembangan neoliberalisme yang meminggirkan, gagasan itulah yang kemudian digunakan secara “sukarela” oleh rakyat pekerja sebagai artikulasi kemarahan mereka.

Bagi saya, posisi ini memiliki implikasi praktik yang penting. Yang pertama, rezim Jokowi yang berkuasa sekarang sangat rentan terhadap politisasi. Praktik brutal neoliberalisme sudah menciptakan disilusi pada banyak segmen populasi rakyat pekerja. Masalahnya kemudian kemarahan ini hanya dapat dikanalisasi ke organisasi Islam garis keras yang kebetulan juga dirugikan oleh rezim kekuasaan Jokowi. Jika memang hendak mengatasi masalah masyarakat yang semakin intoleran seperti sekarang ini, maka harus ada upaya untuk memperbesar kapasitas organisasi gerakan kiri sekarang, sebagai instrumen utama dan tradisional dari rakyat pekerja. Yang



*kedua*, kita harus mengakui efektivitas politik dari pemanfaatan agenda politik Islam oleh faksi-faksi elite dalam memengaruhi kekuasaan negara yang ada. Untuk itu perlu bagi kita memahami apa pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman populisme ini. Saya akan mencoba menawarkan refleksi pembelajaran (sekaligus kemungkinan) ini untuk membangun argumen tentang strategi “merebut populisme” dalam artikel selanjutnya.\*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2017/08/sekali-lagi-tentang-merebut-populisme-bagian-2/>*

## IX

# Pasang Naik Populisme Kanan?

**Made Supriatma**

PEMILIHAN gubernur DKI Jakarta 2017, menandakan sebuah perubahan yang signifikan dalam politik Indonesia. Pemilihan yang menghasilkan terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2017-2022 itu, tidak saja memunculkan aktor-aktor dengan kekuatan politik barunya, namun juga mengindikasikan terjadinya perubahan mendasar dalam masyarakat Indonesia.

Pertarungan merebut kursi kekuasaan di DKI Jakarta itu diwarnai oleh pertarungan kampanye politik paling brutal dalam sejarah pemilihan di negeri ini. Taktik kampanye yang dipakai untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menjadi petahana, lebih tepat dikatakan politik bumi hangus (*earth scorched politics*). Hasilnya adalah pembelahan politik (*political division*) yang akan berlangsung sangat lama dan sulit untuk disembuhkan. Pertarungan ini akan membawa dampak sosial dan politik yang berkepanjangan.

Para ahli dan komentator politik mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terjadi karena munculnya politik populis. Memang, hal terpenting yang muncul dari pemilihan gubernur ini adalah bahwa dia memunculkan gerakan populis. Gerakan ini berkembang sangat cepat dalam masyarakat Indonesia, pun jika Anies Baswedan tidak terpilih menjadi gubernur.

Gerakan ini pulalah yang berhasil mengangkat organisasi-organisasi yang selama ini dianggap sebagai organisasi pinggiran (*fringe organizations*) menjadi kekuatan arus utama (*mainstream*). Front Pembela Islam (FPI), misalnya, sebelumnya dianggap sebagai organisasi marjinal, sekarang sudah diperhitungkan sebagai organisasi mapan. FPI adalah organisasi yang

menjadi motor demonstrasi besar pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Demikian pula organisasi semi resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang pada awalnya hanyalah organisasi yang tugasnya menuntun umat Islam dengan fatwa, tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan. Fatwanya tidak lagi hanya sekadar tafsir teologis tentang moral dan hidup sehari-hari umat Islam. Fatwa-fatwa MUI kini sudah memiliki bobot politis dan bahkan ideologis.

Apakah sesungguhnya gerakan populis ini? Apakah pemilihan gubernur DKI 2017 ini benar-benar menjadi penanda terjadinya perubahan sosial yang punya implikasi politik di Indonesia di masa depan? Apa yang menyebabkan bangkitnya populisme, yang dalam semua hal menunjukkan kecenderungan kanan dan konservatif itu?

### **Demo 212: Sebuah Awal?**

Saya kebetulan hadir dan menyaksikan langsung demonstrasi besar 2 Desember 2016, yang sekarang terkenal dengan sebutan 212 itu. Satu hal yang paling mengesankan untuk saya adalah partisipan demo ini. Cukup banyak dari para peserta demo adalah kelas menengah Indonesia. Dari gaya berpakaian dan perlengkapan yang mereka bawa, tampak jelas bahwa kebanyakan peserta bukanlah berasal dari kelas bawah masyarakat kita. Cukup banyak dari mereka adalah kelas menengah profesional Indonesia.

Mereka tidak canggung untuk masuk ke gerai kopi internasional *Starbuck*. Mereka juga memadati rumah makan cepat saji Amerika, McDonald's. Telepon genggam mereka kebanyakan adalah Samsung atau iPhone dan umumnya keluaran terbaru. Banyak dari yang pria memelihara janggut, berbaju gamis dan bercelana di atas mata kaki. Seluruh perempuan berbuisana muslim namun mereka memakai atribut-atribut khas yang menunjukkan kemakmuran kelas menengah perkotaan Indonesia.

Tidak sedikit dari mereka adalah para profesional seperti bankir dan pekerja sektor keuangan yang lain. Sebagian adalah para profesional dengan keahlian khusus yang sangat diperlukan dalam kehidupan mutakhir, seperti programer komputer dan para ahli informatika. Orang-orang seperti

ini juga banyak bisa dijumpai di media-media sosial. Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan memanfaatkan teknologi (*tech-savvy*).

Di media sosial, saya pernah berjumpa dengan seorang insinyur teknik yang bekerja di sebuah bank nasional. Dia sedang menyelesaikan studinya di program Master of Business Administration (MBA) di sebuah universitas Katolik terkemuka di Amerika. Namun itu tidak menghalanginya untuk memuja Rizieq Shihab sebagai satu-satunya orang yang berani ‘membela Islam.’

Fenomena ini bukan sesuatu yang aneh. Seorang komikus<sup>43</sup> yang bekerja untuk perusahaan komik multinasional tidak bisa menyembunyikan ‘keagumannya’ pada demonstrasi 212, sehingga menyisipkan pesan-pesannya ke dalam komik Marvel yang digambarnya. Seorang teknokrat, yang juga seorang akademisi, yang terkenal tidak memiliki perhatian khusus kepada agama kemudian menjadi organisator untuk sebuah gerakan koperasi dengan nama Koperasi 212.

Kehadiran kelas bawah dalam Demo 212 memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Mereka juga hadir. Namun, sangat tampak bahwa mereka hadir semata sebagai partisipan. Sangat kentara bahwa demo ini dikontrol oleh kelas menengah. Sangat jelas terlihat bahwa demo itu terorganisir dengan rapi. Semuanya direncanakan dengan baik.

Dalam banyak hal, Demo 212 tampak jauh lebih tertib dan rapi dibandingkan dengan demo tahun 1998 yang menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru dari kekuasaan. Jalur logistik mengalir rapi. Tidak tampak peserta demo yang kelaparan atau kehabisan makanan. Nasi kotak dan minuman melimpah ruah. Demikian pula penganan, jajan, air minum kemasan, bahkan obat-obatan untuk sakit ringan.

Yang tentu juga mengesankan adalah soal kebersihan. Kantong plastik sampah berwarna hitam dengan ukuran beragam ada di mana-mana. Sungguh kontras dengan keseharian masyarakat Indonesia yang biasa saya lihat. Dalam Demo 212, orang sungguh mengamalkan kebersihan

---

43      Ging Ginanjar, “Mengapa komikus Indonesia menyusupkan Al Maidah dan aksi 212 di komik Marvel?”, <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39544592>

adalah bagian dari iman.

Tidak bisa disangkal bahwa Demo 212 adalah parade kecintaan pada agama. Mereka yang hadir benar-benar ingin mengekspresikan penolakan mereka terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menghina Islam ketika mengutip surah Al Maidah 51. Mereka juga mengungkapkan penolakan untuk dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak seiman dengan mereka. Apa yang terjadi dalam Demo 212 adalah sebuah *pernyataan* politik yang berdasarkan keyakinan keagamaan.

### **Dari Demo ke Kampanye**

Yang juga tidak dapat disangkal adalah bahwa kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kemudian mampu mengapitalisasi Demo 212 ini menjadi suara pemilih. Kampanye pasangan ini tampaknya disusun oleh strategi dua tombak (*two-pronged strategy*). Yang *pertama* adalah kampanye resmi. Di sini Anies-Sandi berusaha tampil bersih. Anies Baswedan berusaha tampil seperti apa yang sejak awal dicitrakan sebagai Anies Baswedan – pluralis, toleran, santun, dan jauh dari rasisme.

Tombak *kedua* adalah kampanye yang sangat terorganisir rapi lewat jejaring kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok inilah yang melakukan semua pekerjaan, baik bersih maupun kotor, untuk melapangkan jalan Anies-Sandi ke kursi gubernur. Kelompok-kelompok ini melakukan mobilisasi lewat pengajian-pengajian serta pengorganisasian lewat mushala dan masjid-masjid. Kelompok-kelompok ini juga aktif melakukan demonstrasi untuk menuntut agar gubernur petahana dijebloskan ke dalam penjara karena kasus penistaan agama.

Kelompok ini juga melakukan perisakan sosial (*social bullying*) dan intimidasi terhadap pemilih, khususnya terhadap pemilih Muslim. Kampanye yang memenangkan Anies Baswedan telah berhasil mendefinisikan antara ‘Muslim sejati’ versus ‘kaum munafik.’ Kaum Muslim yang memihak Basuki Tjahaja Purnama adalah kaum munafik. Di beberapa tempat bahkan terjadi insiden bahwa pengurus masjid menolak untuk menshalatkan mereka yang diidentifikasi sebagai pendukung gubernur Basuki.

Strategi seperti ini persis seperti yang disebutkan oleh ilmuwan sosial Uganda kelahiran India, Mahmood Mamdani dalam perang melawan terorisme. Negara-negara Barat, menurut Mamdani, berusaha untuk memisahkan antara ‘Muslim yang baik’ (*good Muslims*) dengan ‘Muslim yang buruk’ (*bad Muslims*) dan menciptakan kesan seolah-olah ada perang saudara di kalangan komunitas Muslim antara keduanya. Negara-negara Barat beserta sekutu-sekutunya memaksakan kategori yang mereka bikin sendiri terhadap kaum Muslimin. ‘Muslim yang baik’ adalah mereka yang menjadi Barat, berpikir ala Barat, dan mau menerima semua nilai-nilai Barat. Sementara ‘Muslim yang buruk’ adalah mereka yang menentang Barat dan tidak mau tunduk pada nilai dan kebudayaan Barat. Orang dalam kategori kedua inilah yang dicap sebagai orang yang berbeda (*the other*), sempalan (*fringes*), dan otomatis bukan kebanyakan (*mainstream*). Jika mereka dicap berbahaya maka mereka akan disebut sebagai teroris.

Tombak yang kedua inilah yang sesungguhnya sangat menentukan kemenangan kampanye Anies-Sandi. Kelompok-kelompok yang menjalankan strategi kedua ini lebih bebas melakukan aksi karena mereka seolah-olah partikel bebas yang tidak terkait dengan kampanye resmi. Sehingga kita melihat provokasi, intimidasi, hingga ke perisakan (*bullying*). Penolakan untuk menshalahkan jenazah mereka yang diketahui mendukung gubernur petahana, misalnya, dalam standar keadaban yang normal sangat sulit untuk diterima. Namun itulah yang terjadi.

Kampanye resmi Anies-Sandi tidak pernah mengutuk atau menyalahkan tindakan-tindakan seperti itu. Namun kampanye ini juga tidak pernah mengakuinya secara resmi bahwa kelompok-kelompok ini adalah bagian dari strategi kemenangan mereka. Sekalipun demikian, seorang pengatur strategi kampanye Anies *toh* mengakui pemakaian masjid untuk kampanye kemenangan dalam sebuah ceramah yang videonya beredar luas. Dia mengaku bahwa strategi ini dia tiru dari partai Front Islamique du Salut (FIS)<sup>44</sup> atau Front Keselamatan Islam di Aljazair.

Strategi dua tombak ini juga membawa dua narasi berbeda. Yang satu narasi berbunga-bunga tenun kebangsaan. Ia bicara tentang pluralisme, toleransi, dan kemudian keadilan serta pemihakan kepada yang miskin.

Sementara ujung tombak yang kedua lebih banyak berbicara tentang Jakarta yang eksklusif untuk Muslim. Dua hal yang sesungguhnya sangat kontradiktif ini bisa berjalan berdampingan sebagai sebuah strategi politik. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Gubernur Anies Baswedan akan memenuhi janji-janji yang telah diucapkan kelompok-kelompok garis keras ini kepada konstituen yang memilihnya? Bagaimanapun juga, para pemilih ini memilih Anies Baswedan karena pertama-tama dia adalah ‘gubernur Muslim.’ Benarkah dia akan menjadi ‘gubernur Muslim’?

Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan hubungan antara Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok Muslim ini. Anies Baswedan jelas bukan pencipta kelompok ini. Dia juga bukan “pemiliknya.” Dia hanya kebetulan berada di medan pertarungan persis ketika kekuatan ini bangkit. Anies juga tidak mengendalikan kelompok ini. Dia hanyalah seorang politisi yang melihat kesempatan dan memanfaatkannya.

Kekuatan yang menjadi tombak kedua dalam kemenangan kampanye Anies Baswedan ini adalah kekuatan yang saya sebut dengan istilah “populisme Muslim.” Mereka memang memakai Islam sebagai *jargon* untuk melakukan mobilisasi atau pengorganisasian. Islam juga dimunculkan sebagai alat untuk melakukan klaim politik. Namun gerakan ini bukanlah gerakan Islam semata. Didalamnya memang ada kelompok seperti Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dan beberapa kelompok lain yang ingin menegakkan kekhalifahan Islam. Namun jumlah mereka tidak demikian besar. Sehingga saya lebih suka menyebut seluruh gerakan ini sebagai gerakan populisme Muslim. Ini karena saya ingin menekankan bobot *agency* dari populisme ini.

Saya tidak menyebutnya sebagai populisme Islam karena alasan yang sederhana saja. Islam menawarkan sebuah ideologi, sama seperti ideologi-ideologi lainnya di dunia. Untuk mereka yang meyakini, Islam menawarkan sebuah sistem kemasyarakatan dimana ekonomi, politik, dan hubungan sosial diatur. Sementara, populisme adalah sebuah gerakan yang sama sekali tidak ideologis. Kita akan mengkaji persoalan populisme ini lebih jauh di bawah.

Kita perlu menjernihkan terlebih dahulu pengertian populisme dan

bagaimana kaum Muslim di Indonesia, khususnya kelas menengah profesional, mendukung gerakan ini. Apa yang terjadi pada kelas menengah Muslim Indonesia? Mengapa mereka mendukung gerakan populis ini?

### **Populisme: Tanpa Kelas, Tanpa Ideologi**

Seperti di banyak negara, Indonesia juga mengalami pasang naik populisme. Pemilihan gubernur DKI Jakarta disinyalir menjadi awal dari sebuah keberhasilan politik dari gerakan populis ini. Keberhasilan ini mungkin akan secara signifikan memengaruhi politik Indonesia ke depan. Gerakan ini juga akan ditiru di daerah lain dan kemungkinan besar juga akan dipraktikkan dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Sangat jelas bahwa pemakaian gerakan populis sebagai sebuah strategi politik tidak akan berhenti di sini. Ia hanyalah sebuah awal.

Populisme bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah gerakan politik dari rakyat biasa untuk melawan kaum elite yang mapan (*the establishment*). John B. Judis<sup>45</sup> menyebut populisme sebagai sebuah ‘logika politik,’ sebuah cara berpikir tentang politik, dan bukan sebuah ideologi. Dia mengutip sejarawan Michael Kazin, yang menggambarkan populisme sebagai sebuah “bahasa yang pengujarnya adalah sekumpulan orang-orang biasa, yang tidak semata-mata diikat oleh solidaritas kelas; yang melihat para elite yang menjadi lawannya sebagai (golongan) yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak demokratis, serta berusaha memobilisasi yang pertama melawan yang kedua.”<sup>46</sup>

Dalam pengertian yang sederhana, populisme adalah gerakan massa-rakyat yang tidak berdasarkan kelas, melawan segelintir elite penguasa mapan dan korup. Penguasa yang tidak demokratis serta hanya mementingkan diri sendiri.

Dalam spektrum ideologis, populisme ada baik di kiri maupun di kanan.

---

45 John B. Judis, “Us v Them: the birth of populism”, <https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/13/birth-of-populism-donald-trump>

46 Lihat juga John B. Judis (2016), *The Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics*, New York: Columbia Global Report. p. 14.



Populisme kiri, menurut John B. Judis<sup>47</sup>, biasanya membenturkan rakyat dengan kaum elite. Politik mereka adalah politik vertikal, memainkan antagonism kelas bawah serta kelas menengah dengan kelas atas atau elite penguasa. Populisme kiri berbeda dengan sosialisme atau gerakan sosial demokratik karena tidak menganjurkan penghapusan kapitalisme. Dia juga berbeda dengan gerakan liberal kiri atau progresif yang biasanya berusaha menyelaraskan kepentingan berbagai kelas dan golongan. Judis menyebut populisme kiri sebagai *dyadic* karena hanya mengeksploitasi pertentangan antara massa-rakyat dengan kaum elite.

Sementara, populisme kanan lebih bersifat *triadic* karena disamping mengeksploitasi pertentangan antara massa-rakyat dengan elite, mereka juga menuduh para elite ini berkolusi dengan pihak ketiga. Para populis kanan membikin narasi bahwa pihak ketiga atau '*the others*' sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala kesusahan dan kesulitan hidup yang menimpa rakyat kebanyakan. Pihak ketiga itu bisa imigran dan kalangan minoritas lainnya. Populis kanan ini disebut *triadic* karena selain "melawan ke atas, juga ke samping, ke kelompok-kelompok horisontal."

Kadang ada juga yang menyamakan kaum populis kanan dengan kaum konservatif. Namun ada perbedaan besar antara keduanya. Konservatisme ada sebuah ideologi yang mendukung kebebasan pasar (kapitalisme) dan menentang peranan negara yang besar dalam mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat. Populisme tidak keberatan dengan peranan negara – dan justru memandang bahwa negaralah yang harus direbut karena telah dikangkangi para elite. Populisme juga berbeda dengan konservatisme otoriter (seperti Naziisme) yang berusaha menelikung demokrasi secara subversif. Populisme selalu berjalan dalam kerangka demokrasi. Sekalipun hasilnya mungkin akan meruntuhkan demokrasi itu sendiri.

Populisme adalah gerakan yang ironis. Sementara ia mengutuki para elite mapan, gerakan ini biasanya dimotori oleh kaum elite juga. Mereka memobilisasi massa dengan janji-janji akan meruntuhkan kekuasaan kaum mapan. Mereka menuduh elite yang mapan itu sebagai penghisap kaum kebanyakan. Tidak jarang mereka menjanjikan sebuah 'revolusi' untuk menghancurkan kemapanan.

Tidak ada contoh yang paling baik untuk menggambarkan ini selain Donald J. Trump. Dia lahir dengan kelimpahruahan. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Apalagi hidup dalam kemiskinan. Sungguh diragukan bahwa dia pernah mengetatkan sekrup atau mengerti bagaimana sebuah obeng berfungsi. Namun, dengan tiba-tiba dia menjadi pahlawan kelas buruh. Dia yang sama sekali buta bahwa roti yang disuap ke mulutnya itu perlu puluhan tahapan dari bibit gandum menjadi roti, mendadak menjadi pahlawan kaum tani.

Itu hanya bisa dilakukan dengan retorika dan janji-janji hebat seperti ‘mengeringkan rawa-rawa’ (*draining the swamps*) di Washington D.C., memberikan suara kepada kaum tak bersuara (*the silent majority*), atau menyembuhkan penyakit masyarakat dari penghisap-penghisap yang bercokol di Wall Street, pusat keuangan Amerika dan dunia. Mereka berjanji akan memberi keadilan bagi yang tertindas, pekerjaan untuk para pengangguran, dan tanah untuk petani tuna kisma.

Namun sebagian besar retorika-retorika dahsyat ini berhenti hanya sebagai retorika. Populisme adalah radikalisme tanpa ide-ide radikal. Kemarahan tanpa imajinasi. Ia berjanji untuk menghancurkan sistem yang ada. Namun ia tidak menawarkan sebuah bangunan yang lebih baik untuk menggantikannya. Ia adalah gerakan tanpa visi. Kampanye tanpa program. Atau, perang tanpa jalan keluar.

Tidak seperti sosialisme, populisme tidak menawarkan sebuah masyarakat tanpa kelas dimana semua orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Juga dia tidak menawarkan semua orang punya hak untuk mengejar kebahagiaan (*pursuing happiness*) dengan bekerja secara giat dan kreatif seperti yang ditawarkan oleh kapitalisme. Tidak pula dia menawarkan sebuah masyarakat yang adil dan bahagia di dunia maupun akhirat seperti yang diberikan oleh ideologi agama-agama.

Itu semua terjadi karena populisme adalah gerakan tanpa ideologi. Ia tidak menawarkan ide atau imajinasi tentang bagaimana masyarakat yang sempurna itu. Lalu apa yang membuat orang-orang biasa tertarik pada jargon-jargon populis dan mau menjadi pengikut para pemimpin populis?

Populisme adalah tipuan yang tampak radikal namun tanpa isi dan visi sama sekali. Politisi populis dengan sangat cerdik mengeksploitasi kemarahan dan rasa frustrasi dalam masyarakat tapi tidak mampu menawarkan solusi. Mereka menyalurkan kemarahan ini menjadi kebencian kepada ‘yang lain.’ Alih-alih memberikan imajinasi tentang kebahagiaan dari sebuah masyarakat ideal, para politisi populis memainkan perasaan terancam (*insecurity*) dari rakyat kebanyakan. Mereka menanamkan ketakutan, bukan harapan. Mereka menyemai kemarahan, bukan kemauan untuk berjuang secara serius. Orang seperti Donald Trump (Amerika Serikat), Neil Farrage (Inggris), atau Geert Wilders (Belanda) sangat pandai memprovokasi kemarahan dan rasa frustrasi masyarakat namun tidak menawarkan ide apapun untuk keluar dari persoalan yang membuat rasa takut dan frustrasi itu.

Satu-satunya yang mereka tawarkan adalah kebencian, terutama untuk membenci mereka yang berbeda. Itulah sebabnya, para politisi populis sangat mahir memainkan politik identitas. Sebagaimana kita lihat di Eropa, politisi populis menunggang gelombang anti-imigran yang berkembang di masyarakat. Di Amerika, Trump menang dengan jargon-jargon anti-Latino dan anti-Muslim.

Populisme adalah kuman yang menjadi penyakit untuk ideologi-ideologi besar. Ia menjadi kuman untuk kapitalisme seperti yang dilakukan Trump terhadap kapitalisme Amerika. Ia juga bisa menjadi penyakit untuk sosialisme seperti yang dilakukan oleh Jenderal Juan Peron di Argentina dan di beberapa negara Amerika Latin. Ia mencemari ideologi agama-agama seperti membangun semacam populisme Islam<sup>48</sup>.

### **Mengapa Populisme Muncul?**

Secara singkat, populisme muncul lebih karena perubahan-perubahan dalam hubungan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Tentu klaim seperti ini sangat umum, walaupun memiliki implikasi yang teramat luas. Namun, mau tidak mau, kita harus melihat bahwa perubahan-perubahan mendasar memang telah terjadi pada masyarakat, baik di negara-negara

---

48 Vedi Hadiz, “The New Islamic Populism”, <http://isa-global-dialogue.net/the-new-islamic-populism/>

industri maju dan akibatnya pada bagian dunia yang lain.

Ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi di sini. *Pertama*, sejak runtuhnya Uni Sovyet tahun 1989, ada klaim bahwa sejarah telah berakhir dan kapitalisme adalah pemenangnya. Deklarasi Francis Fukuyama<sup>49</sup> tersebut ternyata membawa implikasi yang sama sekali lain. Uni Sovyet memang runtuh namun kapitalisme pun berubah karenanya.

Kapitalisme modern yang kita miliki saat ini sangat berbeda dengan kapitalisme yang kita kenal pada abad ke-20. Struktur kapitalisme saat ini sangat berbeda dengan yang ada pada abad-abad sebelumnya. Negara-negara yang kita kenal sebagai negara industri pada abad ke-20, telah kehilangan sebagian besar industri manufakturnya. Ekonomi negara-negara ini lebih bergerak ke arah jasa dan sektor keuangan.

Implikasi sosial dan politiknya sangat besar. Mereka yang dahulu bekerja di sektor-sektor manufaktur dengan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kota-kota industri, seperti Detroit, menjadi kota yang bangkrut. Pekerjaan manufaktur beralih ke negara-negara dengan upah buruh yang murah dan terus bergerak mencari cara memproduksi semurah-murahnya.

*Kedua*, akibat perubahan ini adalah menghilangnya kelas buruh dan, sebagai konsekuensinya, melemahnya serikat-serikat pekerja. Hal ini sangat tampak di Amerika dan Inggris. Ketika kelas buruh menghilang maka kelas menengah pun menghilang. Amerika saat ini dipenuhi oleh cerita-cerita tentang hilangnya 'the middle America', yakni mereka yang dulu bekerja di sektor manufaktur dan industri ekstraktif (seperti misalnya pertambangan), menurunnya keanggotaan serikat buruh, dan kebingungan para pemilih partai Demokrat. Pada umumnya, yang terkena adalah mereka yang berkulit putih dan berdiam di wilayah tengah Amerika. Orang-orang inilah yang pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu bertanggungjawab dalam menaikkan Donald Trump ke kekuasaan.

*Ketiga*, struktur perusahaan pada kapitalisme modern tidak sama seperti perusahaan abad ke-20. Jika dahulu modal dan produksi berjalan secara

---

49 <https://www.democraziapura.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/1992-Fukuyama.pdf>

bersamaan, maka pada perusahaan kapitalisme mutakhir modal dan produksi dijalankan secara terpisah. Model produksi seperti Fordisme, dimana pemodal juga menjadi pemilik pabrik, sudah tidak ada lagi. Modal saat ini dikendalikan oleh *venture capitalists*. Mereka yang memiliki modal, menyebar penanaman modalnya ke banyak tempat dan menuntut *return* yang setinggi-tingginya.

Dari model ini lahir kelas manajerial yang berusaha untuk berhemat sebesar-besarnya. Para manajer menjadi aset pemodal yang terpenting; bukan para buruh dengan segala macam keterampilannya itu. Para manajer ini, dalam usahanya mengefisienkan produksi, mendorong investasi di bidang teknologi. Mereka juga memindahkan usaha ke wilayah-wilayah dimana ongkos produksi lebih rendah. Upah buruh dan regulasi (termasuk regulasi lingkungan) menjadi faktor penting dalam melakukan efisiensi. Sehingga tidak heran jika gaji manajer bisa berlipat ratusan kali, sementara upah buruh stagnan atau malah menurun dalam zaman kapitalisme mutakhir.

Semua perubahan ini tidak bisa dihindari di negara-negara maju, baik di Amerika maupun Eropa. Di samping upah yang stagnan, kelas buruh yang mengecil, serikat buruh yang melemah, kita juga melihat ketimpangan pendapatan (*income inequality*) yang semakin menganga.

Semua kondisi ini menyumbang pada lahirnya populisme. Mereka yang 'kalah' (*the losers*) pada perkembangan kapitalisme mutakhir sangat gampang menjadi mangsa retorik dari para politisi populis. Pada awalnya, mereka mengarahkan kemarahannya kepada kaum elit, kepada kaum penguasa-penguasa modal di Wall Street, dan kepada para politisi yang berkolusi dengan pemodal. Namun kemarahan-kemarahan itu tidak menampakkan hasil yang nyata. Akibatnya, para politisi populis kemudian masuk dan mengisi kemarahan ini dengan menysar kepada imigran atau kaum-kaum minoritas lainnya. Rasisme tumbuh dengan subur. Demikian pula narasi-narasi yang nativistik dan bahkan tribalistik. Pada momen inilah populisme kanan mendapatkan ruang gerak politikanya.

### **Populisme Kanan di Indonesia?**

Pada titik ini kita perlu bertanya, apakah populisme dalam spektrum-

nya yang kanan telah bertumbuh di Indonesia? Secara samar-samar kita memang melihat karakter-karakter yang dimiliki oleh populisme kanan juga telah hadir di Indonesia. Retorika-retorika dengan nada yang sama, yang telah memunculkan populisme kanan di Amerika atau Eropa, juga telah muncul di Indonesia. Secara khusus, ide-ide nativistik seperti pemakaian jargon-jargon ‘pribumi’ dan anti- ‘asing dan aseng’ juga telah menguat.

Seperti yang telah kita lihat, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2016 telah menyumbang secara signifikan pada kemunculan populisme kanan ini. Namun, menurut saya, populisme kanan di Indonesia tidak muncul karena sebab-sebab yang terjadi di negara-negara maju. Kapitalisme Indonesia masihlah kapitalisme jenis *erzats* (semu), seperti yang pernah diulas oleh Kunio Yoshihara (1988). Kapitalisme jenis ini mengalami rintangan baik secara eksternal (keterbatasan transfer teknologi dan kapital) serta internal (lemahnya dukungan negara, kebijakan *affirmative action*, kroniisme, *rent-seeking behavior*, dan dominasi para spekulator). Akibatnya, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara tidak mampu menjadi ‘negara pembangun’ (*developmental states*) seperti tetangganya di Asia Timur – terutama Jepang dan Korea.

Di sisi yang lain, Indonesia yang berkelimpahan tenaga kerja juga menjadi pemanfaat dari perpindahan industri-industri manufaktur dari negara-negara maju. Pada tahun 1980-90an, Indonesia menjadi negara industri ‘tukang jahit’ dengan spesialisasi produksi menjahitkan tekstil serta perakitan aneka ragam produk. Sekarang pun Indonesia masih memiliki industri ini, sekalipun banyak industri sejenis yang membutuhkan teknologi lebih rendah telah pindah ke negara-negara yang menawarkan upah buruh lebih murah seperti Kamboja atau Bangladesh.

Indonesia juga tidak sepenuhnya bergantung pada industri jasa. Sementara, pola industri pun masih lebih ‘tradisional’ ketimbang di negara-negara maju. *Venture capitalists* memang sudah mulai hadir (ratusan, kalau tidak ribuan, nama pengusaha Indonesia bisa dijumpai dalam *Panama Papers*, bukan?). Namun ada kecenderungan tradisional bahwa perusahaan atau konglomerasi perusahaan tetap di tangan pemodal individual beserta keluarganya.

Seperti yang kita lihat bahwa populisme kanan di Indonesia digerakkan oleh kelas menengah bahkan oleh kelas menengah profesional. Populisme ini tidak digerakkan oleh kelas buruh dan kelas menengah yang 'kalah' oleh bentuk baru industri seperti di negara-negara maju. Jelas kelas menengah Indonesia bukan kelas yang kalah. Populisme kanan justru didukung oleh kelas yang menang dalam ekonomi. Saya melihat tidak sedikit para pemain di sektor keuangan menjadi pendukung yang setia bahkan fanatik figur populis seperti Rizieq Shihab.

Mengapa ini terjadi?

Perlu penelitian yang mendalam untuk memahami tingkah laku politik kelas menengah Indonesia saat ini. Namun, saya kira kita bisa berspekulasi (atau: berhipotesa) tentang hal ini. Untuk saya, ini semua dimulai dengan pembentukan kelas menengah perkotaan dan profesional di Indonesia.

Dugaan saya adalah bahwa kelas ini diciptakan oleh perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui latar belakang mereka yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi terkemuka itu antara tahun 1970 hingga tahun 2000. Rentang waktu selama tiga puluh tahun ini cukup untuk mengetahui latar belakang sosiologis kelas menengah Indonesia.

Beberapa literatur tentang kelas menengah Indonesia selalu menunjukkan peran negara yang besar dalam menciptakan kelas menengah. Artinya, negaralah yang menciptakan kelas menengah. Hipotesis ini tidak pernah benar-benar diuji secara empirik. Namun, saya kira logika yang ada didalamnya tidak sepenuhnya salah. Saya memperkirakan sekitar 50-60 persen dari mereka yang memasuki perguruan tinggi terkemuka di Indonesia antara tahun 1970-2000 adalah anak-anak PNS atau ABRI (TNI/Polri) atau singkatnya pegawai negeri sipil atau PNS.

Jika dugaan ini benar, maka implikasi sosial dan politiknya sangat besar. Pegawai negeri adalah buruh negara. Di masa Orde Baru, buruh negara adalah buruh yang mendapatkan tunjangan (*benefits*) dan kesejahteraan (*welfare*) yang paling terjamin. Mereka mendapat asuransi kesehatan, pensiun, bahkan jatah beras dan uang lauk-pauk. Semua tunjangan dan kese-

jahteraan ini tidak dinikmati oleh buruh yang bekerja di sektor manufaktur, apalagi dinikmati oleh petani.

Namun pegawai negara ini adalah juga golongan yang paling dikontrol oleh Orde Baru. Mereka hanya boleh menjadi anggota satu partai politik (Golkar). Keanggotaan pegawai negeri sangat ketat diawasi. Para pegawai negeri ini tidak boleh memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi yang dimiliki oleh rezim Orde Baru. Sekalipun mereka dikontrol secara ketat, mereka memiliki akses langsung ke dalam kekuasaan lewat Golkar. Mereka bisa menduduki jabatan-jabatan politik (seorang kolonel bisa menjadi bupati; seorang Sekda bisa menjadi anggota DPR atau DPRD, dan lain sebagainya).

Para pegawai negeri inilah, yang jumlahnya bervariasi antara 4-6 juta orang, yang menjadi tulang punggung kelas menengah Indonesia. Sesungguhnya mereka adalah ***'the protected class.'*** Negara Orde Baru memberikan kepada mereka semua jaminan sosial dan politik. Mereka harus loyal kepada ideologi Orde Baru dan loyalitas ini akan diganjar dengan aneka macam jabatan – dan dari jabatan-jabatan itulah mereka melakukan akumulasi kekayaan, seringkali dengan jalan illegal. Mereka juga dilindungi dari ancaman kelas bawah, khususnya kelas buruh, yang sering 'memberontak' untuk menuntut upah yang layak. Keanggotaan kelas menengah PNS ini diseleksi dengan ketat. Tidak ada orang dengan ide-ide revolusioner yang bisa masuk ke dalamnya. Setiap orang di-screen untuk mengetahui apakah dia 'bersih lingkungan' dan tidak ada keluarganya yang menjadi anggota atau simpatisan PKI. Kebijakan diskriminatif pun dilakukan. Tidak ada orang komunis yang boleh menjadi PNS. Demikian pula, tidak ada keturunan Cina yang bisa menjadi PNS.

Anak dan keturunan para pegawai negeri inilah yang sebagian besar masuk ke perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Jaminan dan kesejahteraan dari negara telah memungkinkan 'kelas menengah PNS' ini memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak ini pun mampu masuk ke perguruan-perguruan tinggi lewat persaingan ketat untuk masuk ke dalamnya.

Ketika tamat dari perguruan tinggi, anak-anak kelas menengah PNS ini



telah dilempangkan jalannya entah dengan menjadi pegawai negeri atau menjadi professional di perusahaan-perusahaan nasional maupun asing. Status mereka tetaplah 'protected class.' Eksklusivisme keanggotaan mereka tetap terjamin.

Semuanya baik-baik saja hingga terjadi reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tentu, sebagian dari anggota 'the protected class' ini ikut serta dalam menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru-nya. Namun segera setelah reformasi diinstitusionalisasikan dengan sistem demokrasi, para anggota kelas menengah PNS ini langsung merasakan bahwa proteksi yang selama ini mereka nikmati dari negara juga menghilang. Dulu, negara menjamin bahwa jika Anda bisa menjadi seorang kolonel di dalam ABRI, paling tidak karir Anda akan berakhir menjadi anggota DPRD. Kini, untuk menjadi anggota DPRD, Anda harus masuk partai dan harus mengumpulkan banyak uang untuk 'membeli kendaraan' partai.

Tidak terlalu mengherankan kelas menengah yang dulunya selalu dilindungi oleh negara ini dengan segera merasakan kebingungan sosial dan politik (*social and political anxiety*). Mereka dikalahkan oleh sistem politik demokratis ini. Merekalah yang paling rajin mengeluhkan kegaduhan dari sistem demokrasi ini. Namun mereka juga tidak berdaya untuk meruntuhkannya karena mereka tahu persis bahwa di dalam sistem ini, rakyat yang memiliki suara (sekalipun suara itu bisa dibeli!). Di samping itu, tidak ada yang mampu menyatukan mereka seperti dulu Soeharto memanipulasi militer untuk menjadi kekuatan perekat dan kontrol untuk rezim Orde Barunya.

Dalam kondisi ini, satu-satunya yang mereka andalkan adalah agama. Untuk para kelas menengah ini, agama tidak saja menjadi semacam pelarian (*escapism*) namun juga kekuatan. Seperti pernah dikatakan Presiden Obama tentang orang-orang 'middle America' yang mengalami kebingungan sosial sehingga mereka menjadi pemeluk teguh agama mereka (*cling to their religion*).

Untuk kasus Indonesia, masuk akal bahwa situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh politisi populis kanan. Merekalah yang mengisi kebingungan ini dengan kemarahan dan kefrustrasian. Jika diperhatikan, sebagian besar

retorika para agitator populis kanan ini selalu berusaha menumbuhkan perasaan sebagai korban dari para pendengarnya. Perasaan sebagai korban ini memperdalam kefrustrasian dan kemarahan pendengarnya.

Sama seperti di tempat-tempat lain, para politisi dan agitator populis kanan tidak menawarkan ide atau imajinasi apapun untuk keluar dari rasa frustrasi dan kemarahan ini. Jika diperhatikan dengan seksama, ada hal-hal mendasar yang hilang. Seperti misalnya, soal keadilan sosial sama sekali absen dari retorika kaum populis kanan.

Pada masa Orde Baru, misalnya, orang akan bicara keadilan sosial dengan berbicara tentang kekuasaan para konglomerat. Dari sini akan terbentuk pembicaraan tentang kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menyekutukan para konglomerat ini dengan keluarga Soeharto. Di masa sekarang ini, yang muncul pada retorika para politisi dan agitator populis kanan adalah '*aseng*,' sebuah sebutan yang sangat umum (*general*) dan menghina (*derogative*) kepada golongan Cina Indonesia.

## Penutup

Akankah gerakan populisme kanan ini berhasil menjadi kekuatan politik arus utama di Indonesia? Saya tidak terlalu optimis. Kalau boleh membuat perkiraan, saya kira, persoalan kelas menengah PNS yang dulu sangat dilindungi ini adalah persoalan sebuah generasi. Sialnya, generasi itu adalah generasi saya – generasi yang lahir, besar, dididik, dan bekerja sepenuhnya di bawah perlindungan Orde Baru. Saya kira, problem ini akan menghilang seiring dengan punahnya generasi saya ini.

Ke depan yang muncul adalah sebuah generasi milenial dengan kehidupan sosial dan persoalan-persoalannya sendiri. Tentu mereka akan membikin *landscape* sosial dan politik yang berbeda.

Terakhir, apakah strategi populisme kanan seperti yang terlihat di Jakarta bisa direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia? Dalam hal ini, saya juga tidak terlalu optimis. Jakarta pada pemilihan umum tahun 1950an (periode Demokrasi Liberal) dikuasai oleh partai-partai Islam. Pada jaman Orde Baru, partai Islam yang berbendera PPP (Partai Persatuan Pemba-

ngunan) menang di Jakarta.

Namun bukan berarti populisme kanan akan enyah dari politik Indonesia. Saat ini, para politisi sedang mengasah isu-isu 'pribumi' sebagai isu politik masa depan. Tentu kita tunggu 'kreativitas' mereka dalam menggodok imajinasi pribumi dan menerjemahkannya menjadi isu politik. \*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2017/12/pasang-naik-populisme-kanan/>*

## X

# Populisme Sayap Kanan dan Transformasi Ekonomi-Politik Global: Tambahan untuk Perdebatan

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

POPULISME “sayap kanan” sedang bangkit. *IndoPROGRESS* memuat perdebatan tentang ‘populisme’ di Indonesia ini pada beberapa artikel yang ditulis oleh Ari Perdana<sup>50</sup>, Muhammad Ridha<sup>51</sup>, Abdil Mughis Mudhoffir<sup>52</sup>, Muhammad Fajar<sup>53</sup>, dan artikel tanggapan dari penulis-penulis tersebut. Meskipun polemik tersebut menyumbang beberapa argumen menarik untuk memahami populisme Islam dan gerakan-gerakan “sayap kanan” di berbagai belahan dunia, mereka melupakan satu fenomena penting: dimensi “global” dari gelombang gerakan ini.

Artikel Made Toni Supriatma<sup>54</sup> memberikan pintu masuk yang cukup bagus untuk memahami hal ini, dengan memberikan analisis bahwa populisme adalah bagian dari perubahan-perubahan ekonomi-politik di negara maju yang menyebar ke negara-negara berkembang. Argumennya, populisme adalah bentuk dari pergeseran ‘kelas’ –yang diyakini terjadi ketika neoliberalisasi di negara-negara maju membuat komposisi kelas berubah, melahirkan orang-orang yang ‘kalah’ (yang biasanya juga disertai oleh gerakan progresif yang tidak kuat) dan membuat ruang gerak bagi politisi

---

50        Lihat bab I dalam buku ini.

51        Lihat bab II dalam buku ini.

52        Lihat bab IV dalam buku ini.

53        Lihat bab (XIII) dalam buku ini.

54        Lihat bab IX dalam buku ini.

populis menjadi semakin luas.

Meskipun argumen ini cukup menarik untuk membaca asal-usul populisme sayap kanan secara global (dan tidak hanya terbatas hanya dalam konteks ‘212’ di Indonesia), argumen Supriatma punya satu kelemahan mendasar: ia belum mengulas perubahan struktur politik global kontemporer yang memungkinkan munculnya ‘gelombang populisme sayap kanan’. Argumen pergeseran komposisi kelas yang ditawarkan oleh *Bli Made*, meskipun cukup menjelaskan populisme sayap-kanan di Amerika Utara dan Eropa yang cenderung ‘rasis’ –serta berkembangnya kelas menengah profesional di Indonesia sebagai ‘kelas yang dilindungi’ (*protected class*) oleh negara Orde Baru yang galau ketika struktur ekonomi-politik di kawasan berubah—masih belum menjelaskan fenomena apa yang membuat komposisi kelas itu kemudian berubah.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, memahami kemunculan 212 hanya sekadar sebagai efek dari transisi demokrasi yang memungkinkan para *protected class* kehilangan tempat istimewa dalam politik Indonesia –serta menggunakan sentimen ‘agama’, akan cenderung melupakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia juga merupakan efek dari perubahan struktural setelah krisis finansial Asia 1997-1998. Selain itu, argumen ini juga kesulitan untuk menjelaskan, misalnya, mengapa populisme sayap kanan semacam 212 memiliki karakteristik yang cukup mirip (termasuk dalam hal narasi yang digunakan) dengan sentimen-sentimen anti-etnis tertentu di Malaysia, atau (misalnya, secara berkebalikan) sentimen-sentimen anti-Islam dan anti-Yahudi yang berkembang (atau pernah berkembang) di Eropa dan Amerika Utara.

Sehingga, memahami populisme sayap kanan, baik yang bernafaskan agama, sentimen rasial, atau hanya mengedepankan chauvinisme identitas tertentu, perlu dilakukan dengan memahami *transformasi ekonomi politik global kontemporer* yang menyebar ke negara-negara lain karena struktur ekonomi-politik internasional neoliberal yang ‘ timpang ’ (*uneven*) tapi terkombinasi oleh jejaring-jejaring institusi keuangan global. Kita bisa bertanya, misalnya: fenomena global apa yang memungkinkan gelombang populisme sayap kanan di Asia, Eropa, dan Amerika? Bagaimana ia menyebar dan apa implikasinya bagi politik domestik? Apa dampaknya bagi ge-

rakan-gerakan progresif di kawasan tersebut?

Melalui tulisan ini, saya ingin membangun dua argumen utama. *Pertama*, populisme sayap kanan adalah tanda-tanda dari “krisis” sekaligus konsolidasi ulang dari kapitalisme global. Secara lebih spesifik, ia merupakan efek dari krisis kapitalisme *neoliberal*, yang mulai terjadi sejak krisis finansial global tahun 2008 yang efeknya masih terasa sampai sekarang di Eropa dan Amerika. *Kedua*, populisme sayap kanan juga merupakan pertanda dari transformasi tatanan politik di tingkat domestik yang terdampak dari transformasi di tingkat global, ditandai oleh runtuhnya rezim-rezim sosial demokrat dan liberal di Eropa, Asia, dan Amerika yang membuka celah munculnya populisme sayap kanan yang membangun narasi politiknya melalui sentimen-sentimen ketakutan dan kebencian.

### **Mendefinisikan Ulang Populisme Sayap Kanan**

Dalam bukunya yang mengupas asal-usul populisme sayap kanan di Eropa, Ruth Wodak<sup>55</sup> memberikan satu jawaban: populisme sayap kanan dipicu oleh reproduksi “politik ketakutan”. Menurut Wodak, kemunculan politik sayap kanan sangat erat kaitannya dengan dua hal: (1) politik identitas, dalam konteks ini upaya untuk menjadikan identitas lain sebagai *The Other* dan dengan cara ini melegitimasi tindak kekerasan mereka terhadap kelompok tersebut; serta (2) politik masa lalu, yakni dengan menjadikan romantisme keagungan masa lalu sebagai referensi untuk menyerang kegagalan rezim politik yang ada.

Analisis Wodak terhadap munculnya partai-partai ultranasionalis di Eropa (Golden Dawn di Yunani, Five Star Movement di Italia, Front Nasional di Perancis, BNP dan UKIP di Inggris, atau kelompok Euroskeptis di Parlemen Eropa) sangat terkait dengan sentimen ini. Mereka, sebagai contoh, menyalahkan imigran sebagai penyebab resesi ekonomi yang menimpa Eropa dan di saat yang bersamaan juga mengagung-agungkan kejayaan masa lalu ‘Eropa’ yang tidak boleh dikotori oleh gelombang imigran (da-

---

55 [https://www.researchgate.net/publication/315175655\\_The\\_politics\\_of\\_fear\\_by\\_Ruth\\_Wodak](https://www.researchgate.net/publication/315175655_The_politics_of_fear_by_Ruth_Wodak)

lam beberapa hal, ini merujuk pada identitas ‘Timur Tengah’ dan ‘Muslim’ yang banyak berada di Eropa).

Menariknya, kelompok-kelompok ini menampilkan strategi-strategi diskursif yang bermacam-macam. Dalam pembacaan Wodak, politisi-politisi sayap kanan di Eropa menggunakan ‘perlindungan atas batas negara’ sebagai dalih untuk menolak ‘imigran’ –yang secara rasial sering ditujukan pada komunitas Muslim. Definisi yang mereka pakai adalah ‘nativisme’ – orang lokal yang dianggap sebagai penghuni ‘sah’ dan lebih hebat dari minoritas– serta menjadikan Eropa sebagai ‘tanah air’ yang harus dilindungi dari orang asing. Menariknya, politisi sayap kanan ini juga menggunakan *common sense* dan keserampangan dalam berpendapat, serta menggunakan argumen-argumen yang sangat simplistik untuk melegitimasi pendapat mereka. Hal yang, dalam banyak hal, dilakukan oleh banyak politikus Indonesia ketika bicara tentang minoritas Syiah atau Komunisme.

Sentimen-sentimen nasionalisme dimanifestasikan dalam ‘politik keba-hasaan’. Hal ini lagi-lagi terjadi di Eropa Timur, ketika ‘bahasa’ menjadi semacam penanda untuk membedakan *kita* dan *mereka*. Politik keba-hasaan ini menciptakan identitas *Finnishness*, *Hungarian*, dan semacamnya yang tentu saja sangat bias (sebab, identitas pada dasarnya selalu berkembang dari masa ke masa). Referensinya adalah ‘nativisme’ dan imajinasi tentang identitas masa lalu yang dibawa ke masa kini. Sentimen antisemitisme dibangun di atas penyangkalan dan, sebagaimana dilakukan oleh Nazi, penipaan kesalahan pada identitas ‘Yahudi’ (ironisnya, hal yang sama sebetulnya juga dilakukan oleh kelompok ultra-nasionalis Yahudi ketika bicara soal Palestina). Penyangkalan terhadap ‘holocaust’ menjadi tema sentral (Wodak mencontohkannya pada apa yang dilakukan oleh Partai Kebebasan Austria).

Di saat yang bersamaan, kelompok sayap kanan juga menyalahkan Yahudi atas dominasi ekonominya di Eropa, terutama dalam konteks krisis ekonomi. Hal serupa juga muncul melalui artikulasi PEGIDA di Jerman, yang menyalahkan kelas menengah muslim atas persoalan ekonomi yang ada sembari menyangkal apa yang mereka lakukan di Perang Dunia II.

Politisi sayap kanan juga mereproduksi strategi Populisme Hitler di awal

kemunculannya dulu: melakukan politisasi ‘diri’ dan memainkan kharisma yang ia miliki. Ketokohan sangat dimunculkan dalam wacana politik Sayap Kanan di Eropa dan Amerika. Fenomena Jens Gatter di Jerman, Benjamin Nentanjahu di Israel, atau Jurgen Haider di Austria merefleksikan simbolisasi personal semacam ini. Referensinya biasanya adalah ‘kharisma’ masa lalu –sebagaimana Hitler di Jerman atau David Ben Gurion di Israel. Kemurnian identitas menjadi semangat yang dibawa dari politik semacam ini.

Pembacaan Wodak berakhir dengan sebuah kesimpulan: “politik sayap kanan” pada dasarnya mencoba untuk menggunakan ‘ketakutan’ atas identitas tertentu sebagai cara untuk mengeksklusi, bila perlu dengan kekerasan, identitas yang lain. Penciptaan ketakutan ini terlihat dari berbagai cara: takut terhadap gelombang imigrasi, ‘orang asing’, ‘Yahudi’/identitas rasial-agama, hingga wanita. Penciptaan ketakutan ini, melalui berbagai strategi, dinormalisasi dalam kehidupan politik-kultural sehari-hari.

Analisis Wodak tentang populisme sayap kanan ini cukup berguna untuk memahami bagaimana gerakan ini muncul setelah tahun 2008. Secara komparatif, cukup menarik untuk melihat keparalelan munculnya populisme kanan ini dengan fenomena yang terjadi sekitar malaise 1929, yang menimpa Eropa masa itu. Gerakan-gerakan ini tidak secara langsung menyasar kaum kapitalis atau institusi keuangan sebagaimana gerakan-gerakan kiri dan sosial-demokrat; mereka justru mengambang-hitamkan identitas tertentu sebagai penyebab krisis.

Di tahun 1930an, kambing hitamnya adalah bankir-bankir Yahudi yang memang menguasai lembaga-lembaga keuangan mereka masa itu. Di tahun 2010an, kambing hitamnya adalah imigran dan orang-orang miskin kota yang dianggap mengambil “jatah” orang-orang “asli Eropa”. Implikasinya adalah fasisme, yang kemudian mengobarkan sentimen pasca-Perang Dunia I untuk membangkitkan kembali memori ‘perang’. Di Indonesia, kelompok pemilik modal dari etnis Tionghoa seringkali menjadi kambing hitam ketimpangan dan terpinggirkannya kelas menengah pribumi –yang semakin menjadi-jadi setelah krisis ekonomi global tidak hanya meluluhlantakkan arsitektur keuangan di Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga menghantam negara-negara di Asia dan Afrika karena an-



jlaknya harga barang komoditas tambang di pasar global.

Namun, berbeda dengan Wodak, artikel ini akan berargumen bahwa populisme bukan hanya sekadar simptom dari *kebencian terhadap identitas tertentu*. Mengikuti argumen Made Supriatma, saya akan lebih cenderung untuk melihat sentimen ‘kebencian terhadap identitas tersebut sebagai representasi dari perubahan ekonomi-politik yang muncul di satu negara dan –karena struktur politik internasional yang *uneven* (tersebar secara tidak merata) tetapi ‘terkombinasi’ (dihubungkan oleh interaksi antara satu negara dengan negara yang lain), populisme sayap kanan tersebut menyebar dan menjadi fenomena global.<sup>56</sup>

Penting, dengan demikian, untuk melihat relasi antara struktur politik internasional dan struktur politik domestik. Di sini, saya berargumen bahwa apa yang terjadi secara ‘internasional’ akan memberikan dampak besar bagi politik domestik karena struktur politik internasional pada dasarnya terbangun dari *interaksi* antara negara dan aktor-aktor yang berbeda, yang pada dasarnya punya struktur dan preferensi politik domestik yang berbeda tetapi terhubung karena proses interaksi tersebut.

Sebagai contoh, populisme Islam di Indonesia (sebagaimana dianalisis dengan baik oleh Vedi R. Hadiz), memiliki jejaring dan proses interaktif dengan gerakan populis Islam di Mesir dan Turki. Kita tidak bisa melihat PKS, misalnya, semata sebagai artikulasi politik kaum Islamis di Indonesia yang terbangun dari Masyumi di Orde Lama –ia juga bagian dari jejaring Ikhwanul Muslimin (IM) yang terentang secara transnasional dan banyak

---

56 Istilah ini saya kembangkan dari argumen Leon Trotsky tentang asal-usul Revolusi Rusia yang bersifat *uneven and combined development*, yaitu bahwa revolusi Rusia tidak muncul hanya dari perubahan internal akibat modernisasi di abad ke-19, tetapi juga dari ‘privilege atas ketertinggalan historis’ dan ‘lecutan kebutuhan eksternal (untuk mengejar ketertinggalan tersebut) dari perkembangan di dua negara Eropa Barat, yaitu Jerman dan Inggris. Hasilnya, menurut Trotsky, bukanlah proses modernisasi yang ‘meniru’ dua negara tersebut, tetapi justru negara Rusia modern yang berpijak pada kelas proletariat yang termarginalkan dan tuan-tanah yang masih berkuasa. “Keunikan” ini, menurut Trotsky, membuka jalan bagi Revolusi Rusia 1917. Perspektif Trotsky ini banyak dikembangkan dalam kajian Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. Lihat tulisan dari Justin Rosenberg, Ben Selwyn, dan Alexander Anievas dan Kerem Nisancioglu.

diuntungkan oleh politik neoliberalisme di Mesir pasca-Sadat, yang memungkinkan mereka mengisi kursi-kursi kelas menengah profesional dan intelektual di Mesir. Begitu juga, misalnya, dengan kemunculan Bharatiya Janata Party (BJP) yang muncul dari perkembangan politik di Asia Selatan –dengan eskalasi konflik India-Pakistan yang mengemuka tahun 1950an.

Sehingga, jika melihat munculnya fenomena populisme sayap kanan di Indonesia, terlihat bahwa prekursor dari fenomena ini tidak serta-merta muncul sekadar dari ekspresi ‘pergeseran komposisi kelas’ dan struktur politik yang mempertahankannya di Indonesia. Populisme Islam juga bagian dari transformasi politik global. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terdampak dari krisis finansial global, ia juga tergantung pada satu faktor ekonomi lain: harga komoditas ekstraktif yang tidak stabil. Sebagai negara yang bersandar pada industri ekstraktif, jatuhnya beberapa komoditas ekstraktif seperti minyak dan batubara (serta bangkitnya industri manufaktur Cina dalam percaturan ekonomi politik global) mengakibatkan kelas-kelas pemilik modal di Indonesia terdampak. Hal-hal semacam ini membuka jalan bagi sentimen anti-etnis tertentu di Indonesia, yang dieskalasikan dengan sangat baik oleh para pengusaha politik di politik lokal.

Dengan demikian, kebangkitan populisme sayap kanan bukan sekadar ekspresi identitas. Ia juga merupakan sinyal dari *krisis tatanan ekonomi politik tertentu* yang diikuti oleh rekonsolidasi tatanan politik lain. Untuk menjelaskannya analisis dua-tingkat menjadi penting dengan melihat dampak krisis finansial global serta instabilitas harga komoditas ekstraktif terhadap perubahan politik domestik dan munculnya gerakan-gerakan populis sayap kanan yang bekerja dalam politik elektoral demokratis.

### **Krisis Kapitalisme dan Penataan Ulang Ekonomi Politik Internasional**

Di tahun 2008, gelombang pasang krisis ekonomi menghantam Eropa dan Amerika. Dimulai dari krisis kredit perumahan di AS, yang berujung pada krisis perbankan di Eropa dan AS akibat bangkrutnya Lehmann Brothers –perusahaan jasa keuangan nomor wahid yang berbasis di AS– arsitektur keuangan global segera mengalami guncangan. Industri perbankan di

Inggris, AS, dan sebagian negara Eropa ambruk. Jasa finansial lesu. Pengangguran meningkat dan inflasi tak terkontrol, terutama di Inggris dan AS – tulang punggung arsitektur keuangan global dan proponent utama neoliberalisme.

Krisis keuangan segera bertransformasi menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Bangkrutnya beberapa Bank dan penyedia jasa keuangan utama membuat negara semacam Inggris dan Amerika Serikat harus menyediakan *bailout* (dana talangan). Otoritas jasa keuangan dan Bank Sentral memang segera bertindak. Setelah serangkaian negosiasi yang alot, Gubernur-gubernur Bank Sentral menyetujui Konsensus Basel yang memperkenalkan kembali regulasi makprudensial dalam kebijakan keuangan nasional. Intinya, sistem keuangan yang disetir oleh negara (guna menghindari apa yang disebut oleh Andrew Haldane, *Chief Economist* Bank of England, sebagai “dampak sistemik”) diperkenalkan kembali. Di Indonesia, Boediono dan Sri Mulyani mengadaptasi konsensus ini melalui beberapa paket kebijakan “penyelamatan” untuk memitigasi krisis ekonomi di Indonesia, salah satunya melalui *bailout*.

Efeknya memang cukup “mematikan” di Eropa dan AS. Di Inggris, setelah periode pertumbuhan yang cukup stabil selama satu dekade (di bawah kepemimpinan Tony Blair), krisis membuat pemerintah cukup *kewalahan* untuk menghadapi lesunya pasar, baik pasar finansial maupun tenaga kerja. Kembalinya rezim Konservatif di bawah David Cameron memperkenalkan kebijakan pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran-anggaran publik (yang dikenal sebagai *austerity regime*). Negara-negara seperti Yunani bahkan harus bergantung pada utang untuk menstabilisasi ekonomi mereka. Amerika Serikat harus bergulat dengan pengangguran dan krisis sosial yang lebih luas.

Krisis ekonomi global di tahun 2007-2008 tidak hanya menandai krisis dalam arsitektur global. Lebih luas, krisis ekonomi global juga menandai perubahan perlahan dari logika ekonomi neoliberal –yang percaya bahwa mekanisme pasar adalah *soko guru* dari perekonomian dan peran negara tidak diperlukan– menuju ekonomi yang lebih “statis”. Tentu saja hal ini bersifat dinamis. Namun demikian, beberapa transformasi dalam institusi-institusi ekonomi global menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran yang

tak terelakkan dalam merespons krisis, yang beberapa perkembangan diantaranya menunjukkan “kembalinya negara” dalam perekonomian.

Perkembangan dalam *global financial governance*, misalnya, menunjukkan kecenderungan ini. Kajian Andrew Baker memperlihatkan bahwa kebijakan kebanksentralan di negara-negara Anglo-Amerika, justru meninggalkan kepercayaan tradisional mereka pada “pasar (keuangan) yang mampu mengatur dirinya sendiri”. Kepercayaan ini, yang muncul di akhir 1970an ketika negara-negara maju membangun konsensus untuk meninggalkan standard emas dalam pengaturan mata uang, terbukti gagal memprediksi krisis ekonomi di tahun 2008. Dalam pertemuan di Basel, Agustus 2008, para Gubernur Bank Sentral melahirkan konsensus baru yang memperkenalkan kembali “kerangka regulatoris” dalam manajemen sistem keuangan nasional dengan 3 pilar utama: transparansi yang lebih besar, *disclosure*, dan manajemen risiko yang lebih kompleks. Negara berperan kembali menjadi regulator dalam sistem keuangan global yang baru.

Namun demikian, krisis finansial global jelas bukan satu-satunya fenomena yang berkembang di awal abad ke-21. Ada satu fenomena lain: jatuhnya harga komoditas ekstraktif di Indonesia yang beriringan dengan munculnya Cina dengan kekuatan manufakturnya<sup>57</sup>. Data dari *Indonesia Investment*, yang diolah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, memperlihatkan bahwa walaupun tren produksi dan ekspor cukup memperlihatkan peningkatan, harga komoditas ekstraktif cenderung mengalami fluktuasi, bahkan penurunan.

**Tabel 1.**  
**Fluktualitas Industri Batubara Indonesia 2007-2015**  
(sumber: *Indonesia Investment*)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produksi</b> (dalam Jutaan ton)	217	240	254	275	353	412	474	458	461
<b>Ekspor</b> (dalam Jutaan ton)	163	191	198	210	287	345	402	382	366

57 Nithin Coca, “Asia and the Fall of Coal”, <https://thediplomat.com/2017/06/asia-and-the-fall-of-coal/>

<b>Domestik</b> (dalam Jutaan ton)	61	49	56	65	66	67	72	76	87
<b>Harga (HBA)</b> (dalam USD/ ton)	n.a	n.a	70.7	91.7	118.4	95.5	82.9	72.6	60.1

Fenomena ini tidak khas Indonesia. Di negara-negara lain yang bersandar pada industri ekstraktif dan minyak, krisis menjadi tak terelakkan. Brunei, misalnya, mengalami perlambatan ekonomi sejak tahun 2012 dan negara-negara di Timur Tengah (termasuk Arab Saudi) harus berhadapan dengan krisis –yang memaksa mereka untuk beralih ke industri finansial dan jasa. Negara-negara Amerika Latin terkena dampak paling parah dengan krisis berkepanjangan di Brazil dan Venezuela, yang berimbas pada krisis politik.

Konsekuensi dari perubahan tatanan ekonomi politik global ini adalah munculnya perubahan cara baru dalam wacana pembangunan internasional. Di tahun 2011, Justin Yifu Lin, *Chief Economist* Bank Dunia, memperkenalkan *New Structural Economics* sebagai kerangka kerja baru dalam transformasi ekonomi dunia. Sadar dengan pelajaran yang diambil ketika krisis ekonomi global 2007-2008, Lin mengkritik beberapa asumsi ekonomi neoklasik yang terlalu percaya pada stabilitas pertumbuhan dan mekanisme pasar dan mendorong sebuah ‘fusi’ dengan pendekatan strukturalis yang berbasis pada industri. Menurutnya, negara perlu kembali menjalankan peran regulatoris untuk mendorong industrialisasi, inovasi teknologi, dan mengatur struktur ekonomi nasional dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan. Pendekatannya segera menuai perdebatan, namun menjadi satu penanda utama pergeseran kebijakan Bank Dunia, terutama dalam pendekatan mereka dengan negara-negara Dunia Ketiga yang memerlukan asistensi pembangunan.

Apa artinya? Era neoliberalisme memang mengalami krisis, namun ini tidak berarti kapitalisme global berada di titik nafas penghabisan. Kapitalisme selalu punya jalannya sendiri untuk ‘hidup kembali’. Di titik ini, gerakan-gerakan populisme membuka jalan bagi rekonsolidasi kapitalisme global dengan wajahnya yang baru tersebut. Hal ini bisa dianalisis dari kebangkitan politik populis sayap kanan dalam politik domestik, yang mengambil celah dari krisis rezim-rezim liberal dan sosialisme-demokrat

setelah krisis finansial global 2008 (dan jatuhnya harga komoditas ekstraktif tahun 2012).

### **Pergeseran Tataan Politik Domestik dan ‘Populisme yang Berkontestasi’**

Saya sepakat dengan kesimpulan Ari Perdana bahwa gerakan-gerakan ini mungkin tidak secara langsung dipicu oleh kesenjangan ekonomi akibat krisis ekonomi global. Namun demikian, tidak diragukan lagi bahwa *momentum* kemunculan partai dan gerakan ini dipicu oleh perubahan tataan ekonomi global yang berpijak pada dua elemen penting: perlambatan ekonomi di negara-negara Eropa, AS, dan beberapa negara lain; serta kegagalan partai-partai sosial-demokrat (atau partai liberal yang mengusung ideologi ‘sentris’) untuk merespons krisis dan mengembalikan stabilitas ekonomi. Kedua hal tersebut membuka jalan bagi munculnya partai-partai “sayap kanan” yang segera mengambil momentum untuk merebut kekuasaan melalui Pemilu.

Mengapa krisis ekonomi politik global dan instabilitas harga komoditas ekstraktif ini membuka jalan bagi munculnya populisme sayap kanan? Pada titik ini analisis dua-tingkat menjadi penting. Apa yang terjadi dalam politik global (krisis ekonomi) memberikan jalan bagi perubahan politik di tingkat domestik. Beberapa contoh bisa jadi ilustrasi. Di Inggris, menguatnya UKIP dan kelompok-kelompok sayap kanan berjalan beriringan dengan kegagalan *New Labour* dalam melakukan *recovery* pasca-krisis 2008, serta menguatnya kelompok *Euroskeptic* di tubuh partai Konservatif. Di Prancis, kegagalan Partai Sosialis memberikan jalan bagi menguatnya *Front National* secara elektoral (sebelum munculnya Emmanuel Macron dan gerakan sayap tengahnya). Di Jerman, Partai Sosial Demokrat ‘dihukum’ secara elektoral karena kegagalannya membangun tawaran dan program politik yang jelas sebagai alternatif dari CDU-CSU, sehingga memberikan jalan bagi menguatnya partai sayap-kanan AfD di Pemilu Federal lalu.

Di negara-negara yang menggantungkan diri dari komoditas ekstraktif, hal ini juga punya dampak. Brazil dan Venezuela di Amerika Latin terkena dampak paling parah karena krisis ekonomi yang gagal diatasi dan ber-

imbas pada krisis sosial-politik. Beberapa argumen juga melihat bahwa munculnya ISIS juga tak lepas dari krisis ekonomi ini –terutama di Iraq. Di Malaysia, krisis ekonomi, pengangguran, dan kerugian yang dialami oleh Petronas akibat harga komoditas yang tidak stabil membuat negara itu juga kehilangan stabilitas ekonominya. Etnis Tionghoa menjadi “kambing hitam” empuk karena merekalah yang banyak berkiperah dalam sistem keuangan nasional (tentu saja, dengan melupakan fakta bahwa struktur politik nasional didominasi oleh Barisan Nasional).

Konsekuensi dari krisis legitimasi dari partai-partai liberal dan sosial demokrat ini adalah munculnya populisme sayap kanan yang berkecimpung melalui kontestasi elektoral. Kita bisa melihat bahwa krisis global, yang berdampak pada politik domestik karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis, melahirkan ketidakpuasan politik di tingkat domestik. Sehingga, ketimpangan yang dihasilkan oleh rezim-rezim neo-liberal di Eropa segera ‘digoreng’ untuk menjadi komoditas politik kelompok populis sayap kanan semacam ini. Menguatnya *Front National* di Prancis atau UKIP di Inggris, bisa dijelaskan dari frame ini –dengan kegagalan Partai Buruh dan Partai Sosialis di masing-masing negara untuk melakukan *recovery* dari krisis.

Yang menjadi penting untuk dilihat adalah efeknya. Gerakan-gerakan semacam ini tidak menysasar problem atau simptom utama dari krisis, yaitu kapitalisme global atau masalah-masalah ekonomi yang dihasilkannya seperti ketimpangan dan kemiskinan. Justru, mereka menysasar masalah identitas yang sangat rentan menjadi permainan elite-elite yang ingin merebut kekuasaan. Akibatnya, gerakan-gerakan populisme ini justru menjadi alat bagi kelompok Konservatif yang tidak begitu percaya dengan demokrasi dan ingin mengembalikan otoritarianisme –dengan berbagai variasi– di tingkat nasional.

Di negara-negara Asia, gerakan-gerakan populisme mengambil momentumnya pada politik elektoral dan berkontribusi pada naiknya pemerintahan populis sayap-kanan di beberapa negara, seperti India, Korea Selatan, dan Filipina. Pemerintahan-pemerintahan Konservatif ini membawa kebijakan ekonomi yang berbasis pada negara yang kuat, kepercayaan pada teknokrasi, dan mengandalkan dukungan massa untuk mempertahankan

kekuasaan. Dampak buruknya adalah oposisi yang semakin direpresi dan ruang-ruang artikulasi demokratis yang kian memudar. Hal ini terutama terjadi di Filipina dan India, dimana oposisi progresif dibungkam melalui aparaturnya koersif negara dan mobilisasi massa di akar-rumput.

Indonesia, dalam beberapa hal, menunjukkan kecenderungan ke arah sini. Di Pemilu 2014, pertanda kembalinya “kapitalisme negara” sudah muncul dengan menguatnya sentimen nasionalisme walau dengan dua wajah yang berbeda (Jokowi dan Prabowo). Kebijakan ekonomi Jokowi yang berbasis pada proyek “developmentalisme baru” – meminjam istilah akademisi Australia Eve Warburton – via proyek-proyek infrastruktur mengonfirmasi hal ini. Kendati Jokowi juga memprioritaskan upaya untuk mengatasi ketimpangan spasial (dengan pembangunan di Indonesia Timur, misalnya) kecenderungan teknokratis yang sangat kuat memperlihatkan kembalinya negara – dalam batas tertentu – dalam proyek-proyek ‘developmentalis’ yang cenderung untuk tidak memperhatikan protes dan *dissent* (misalnya, dalam kasus NYIA di Kulon Progo atau industri Semen di pantai utara pulau Jawa).

Menariknya, kecenderungan serupa juga muncul dalam bentuk-bentuk gerakan “populisme Islam” semacam Gerakan 212. Alih-alih mengkritisi kapitalisme negara dalam bentuknya yang represif terhadap partisipasi masyarakat, gerakan semacam 212 justru menggunakan sentimen identitas untuk ‘meliyankan’ artikulasi politik tertentu. Sehingga, menurut Vedi Hadiz dan Richard Robison, yang terjadi adalah ‘populisme yang saling berkompetisi’ antara ‘populis Islam’ dengan ‘populis nasionalis-sekular’. Keduanya menggunakan ‘ketakutan’ untuk menjatuhkan lawan politik yang lain. Populisme semacam ini jelas sama sekali tidak progresif. Ia tidak menggubris faktor struktural yang riil – misalnya, masalah pembangunan yang timpang atau penggusuran lahan. Bahkan, ia mereproduksi politik ketakutan untuk hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dan tidak relevan saat ini, semisal dengan membangkitkan ‘hantu komunis’.

Populisme sayap kanan, dengan demikian, terhubung secara tidak langsung dengan penataan ulang ekonomi-politik internasional. Krisis finansial global dan volatilitas harga komoditas ekstraktif membuat baik rezim-rezim (neo)liberal maupun rezim-rezim ekstraktif kehilangan pijakan politik-



nya. Konsekuensinya, politik domestik membuka ruang bagi kebangkitan politisi-politisi populis yang menghidupkan sentimen “politik ketakutan” untuk melanggengkan posisi politiknya secara elektoral. Populisme, dengan demikian, menjadi instrumen elektoral untuk mengonsolidasikan kekuatan politik secara domestik sekaligus juga instrumen ekonomi-politik untuk menata ulang formasi kelas dan kapitalisme di tingkat global.

Melalui kebangkitan populisme sayap kanan, baik yang berwatak developmentalis, agamis, maupun ultranasionalis, kita menyaksikan proses lambat perubahan ekonomi-politik global. Neoliberalisme sudah berada di masa pensiun. Namun, ketimpangan dan *chaos* yang dihasilkannya di banyak negara tidak bisa diatasi. Akibatnya, ‘negara kuat’ dan ‘otoriter’ kembali hadir, yang biasanya tidak diikuti oleh kabar baik bagi gerakan-gerakan oposisi maupun masyarakat sipil.

### **Tantangan bagi Gerakan Progresif Indonesia**

Apakah munculnya gerakan “populisme sayap kanan” sama dengan membunyikan lonceng kematian bagi gerakan kiri dan aliansi-aliansi progresif di Eropa, Asia, dan Amerika? Tentu saja kesimpulan demikian sangat terburu-buru. Memang, partai-partai sosial-demokrat di Eropa ‘tumbang’ satu per satu oleh gelombang politik sayap kanan ini. Namun demikian, alternatif lain tetap muncul dalam berbagai variannya –Bernie Sanders di Amerika Serikat, *Momentum* dan Jeremy Corbyn di Inggris, Podemos di Spanyol, maupun veteran Jean-Luc Melenchon di Pemilu Prancis beberapa waktu yang lalu.

“Populisme alternatif” semacam ini memang bersifat jangka-pendek. Namun demikian, dalam kasus Inggris, kita bisa melihat secerah harapan: mulai menguatnya kembali Serikat-Serikat Buruh yang progresif setelah sekian lama direpresi oleh rezim neoliberal Margaret Thatcher hingga Tony Blair. Di India, kegagalan Partai Kongres kemudian membangkitkan gerakan-gerakan masyarakat sipil progresif yang mulai melakukan perlawanan terhadap rezim sayap-kanan Narendra Modi.

Memang, nafas panjang masih dibutuhkan untuk menghadapi populisme sayap kanan semacam ini. Di Indonesia, jalan masih panjang untuk

mentransformasikan politik populis 212 menjadi 'Islam Progresif' –yang sudah dimulai langkahnya oleh beberapa aktivis progresif Islam. Untuk itu, penting bagi gerakan-gerakan kiri dan progresif di Indonesia untuk memahami ekonomi politik global dan menysasar aspek-aspek kebijakan tinimbang identitas. Hal ini membutuhkan penguasaan informasi, pengetahuan, dan literasi kebijakan yang mumpuni, agar gerakan perlawanan terhadap kapitalisme (global) tidak hanya mengambil warna dan wajah yang sesempit gerakan-gerakan populisme sayap kanan.\*\*

\*) *Versi awal dari tulisan ini dimuat di Tabloid LEMBUR, Edisi November 2017, terbitan Trade Union Rights Centre (TURC) Jakarta dan dalam bentuk review buku di Jurnal IndoPROGRESS 2016.*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2017/12/populisme-sayap-kanan-dan-transformasi-ekonomi-politik-global-tambahan-untuk-perdebatan/>*

## XI

# Aliansi Populis Islam yang Terfragmentasi

**Abdil Mughis Mudhoffir**

MOBILISASI massa dalam serial Aksi Bela Islam yang mewarnai dinamika pemilihan gubernur di Jakarta dua tahun silam, menyisakan perdebatan yang berpijak pada dua pertanyaan utama hingga kini, termasuk yang dibahas oleh beberapa penulis *IndoPROGRESS*. Pertanyaan itu meliputi *pertama*, aspek apa saja yang memungkinkan terjadinya demonstrasi massa berbasis keagamaan terbesar di Indonesia? *Kedua*, apakah gerakan tersebut merupakan indikator kebangkitan aliansi populis Islam di Indonesia yang beresonansi dengan fenomena menguatnya populisme kanan di berbagai belahan dunia?

Beberapa studi menekankan aspek kultural, sementara yang lain melihat ketimpangan ekonomi sebagai penyebab utama terjadinya Aksi Bela Islam 212, yang juga menandai kebangkitan populisme kanan di Indonesia. Setuju dengan Vedi Hadiz dan Inaya Rakhmani (2017)<sup>58</sup>, rangkaian protes aliansi populis Islam dua tahun silam lebih disebabkan oleh kombinasi kedua aspek itu. Namun, tulisan terbaru mereka tidak menjelaskan mengapa bentuk populisme Islam, bukan yang lainnya, yang artikulasikan.

Tulisan ini melengkapi penjelasan Hadiz dan Rakhmani yang sebenarnya juga telah dikemukakan oleh Hadiz dalam bukunya *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (2017), terkait karakteristik alternatif pengorganisasian lain selain Islam. Dengan demikian, ada dua aspek penting yang menjadi pokok bahasan dalam memahami fenomena populisme Islam di Indonesia, yaitu menyelidiki atas basis sosial aliansi ini serta kondisi yang memungkinkan artikulasi identitas tertentu. Aspek-aspek ini penting dikemukakan sebagai kerangka analisis karena dua hal. *Pertama* untuk

---

58 Vedi Hadiz and Inaya Rakhmani, "Marketing morality in Indonesia's democracy", <http://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/>

menjelaskan keterkaitan menguatnya populisme kanan di banyak tempat dengan yang terjadi di Indonesia, mengingat beberapa analisis yang diterbitkan oleh *IndoPROGRESS* tampak belum terlalu berhasil melakukannya. *Kedua*, untuk menunjukkan bahwa masa depan populisme kanan (Islam) di Indonesia tidak semenjanjikan seperti yang dibayangkan banyak pengamat maupun pelaku Aksi Bela Islam, karena ciri utamanya yang amat terfragmentasi. Namun, meski terfragmentasi ia tetap menyediakan amunisi bagi artikulasi politik yang rasialis.

## Beberapa Penjelasan

Dengan mengutip Inglehart dan Norris, Ari Perdana (2017)<sup>59</sup> berpendapat bahwa pertentangan kultural lebih masuk akal menjadi penyebab menguatnya populisme kanan. Buktinya, menurut Perdana, jika kerentanan ekonomi yang utama, mengapa bukan populisme kiri –agen utama penguasung isu ketidakadilan sosial –yang menguat? Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi (2017)<sup>60</sup> yang meyakini bahwa sentimen keagamaan berperan lebih menonjol dalam menjelaskan mobilisasi kelompok Islam yang menyebabkan kekalahan Ahok dalam pilkada Jakarta. Menurut mereka, temuan 30,1 persen sampel survei yang puas dengan kebijakan Ahok tetapi menolak memilihnya dalam pilkada adalah anomali yang mengonfirmasi aspek sentimen keagamaan sebagai kunci kemenangan Anies. Argumen kultural ini telah dibantah oleh penjelasan yang menekankan aspek kesenjangan ekonomi.

Ian Wilson<sup>61</sup>, misalnya, yang mengusung tesis kesenjangan ekonomi, menjelaskan bahwa kaum miskin kota yang merupakan korban utama kebijakan penggusuran menjadi basis yang menentukan besarnya mobilisasi massa anti Ahok di Jakarta. Jika penjelasan Wilson sangat spesifik terha-

---

59        Lihat bab I dalam buku ini.

60        Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, “Ahok’s satisfied non-voters: an anatomy”, <http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/>

61        Ian Wilson, “Making enemies out of friends”, <http://www.newmandala.org/making-enemies-friends/>

dap kasus Ahok tanpa berpretensi memperluas diskusi, beberapa penulis lainnya melihat gelombang aksi protes ini sebagai fenomena menguatnya populisme kanan di Indonesia seperti yang terjadi di tempat lain. Para penulis ini umumnya cukup mahir menjelaskan fenomena di negara lain, tapi tampak gagap menerangkan apa yang terjadi selama dan pasca pilkada Jakarta. Sebab, beberapa aspek yang dianggap masuk akal dalam menerangkan fenomena global tampak tidak kompatibel sebagai penjelas fenomena serupa di Indonesia.

Made Supriatma (2017)<sup>62</sup>, misalnya, mengakui bahwa “populisme kanan di Indonesia tidak muncul karena sebab-sebab yang terjadi di negara-negara maju”. Perbedaan itu terutama, menurutnya, terletak pada corak kapitalismenya yang berbeda. Supriatma berpendapat bahwa kapitalisme di Indonesia adalah semu, tidak seperti di tempat lain yang melahirkan populisme kanan dengan corak kapitalisme yang lebih matang dan modern. Ia juga berargumen bahwa sektor jasa juga tidak berkembang seperti di tempat lain, sementara kelas menengah yang menjadi basis populisme kanan di Indonesia juga adalah kelas menengah yang menang, bukan yang kalah seperti di Eropa.

Di sisi lain, Supriatma ternyata malah menegasikan pernyataannya sendiri dengan mengatakan bahwa basis sosial populisme kanan adalah kelas menengah yang “dikalahkan” oleh demokrasi, setelah sebelumnya dimanjakan oleh Orde Baru sebagai *the protected class*, yakni mereka yang bekerja sebagai birokrat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS). Pernyataan ini, dengan kata lain, mengonfirmasi kondisi kelas yang mengalami kekalahan, kekecewaan serta kecemasan yang memungkinkan kelas menengah maupun kelas bawah mencari jawaban dengan mengorganisasikan dirinya ke dalam aliansi populis Islam, seperti yang dikemukakan oleh Hadiz dan Rakhmani.

Berikutnya, argumen demografis Supriatma juga tidak terlalu menjanjikan dengan mengatakan bahwa persoalan populisme di Indonesia adalah masalah generasi yang “lahir, besar, dididik dan bekerja sepenuhnya di bawah perlindungan Orde Baru”, dan menurutnya masalah populisme akan berakhir seiring dengan punahnya generasi ini. Mereduksi penjelasan

dengan argumen demografis seperti ini mengabaikan struktur kelas sosial dalam masyarakat yang memiliki kondisi kerentanan sosial-ekonomi berbeda-beda. Padahal sangat mudah diamati bahwa kelas bawah generasi tahun 1980-an mengalami kerentanan serupa dengan kelas bawah generasi 2000-an, demikian juga kelas menengahnya.

Namun demikian, jika memang populisme adalah masalah generasi yang dikalahkan oleh sistem politik demokratis, mengapa ekspresi kekecewaan dengan menggunakan sentimen keagamaan baru muncul setelah hampir dua dasawarsa demokratisasi? Di samping itu, mengapa pilihan salurannya adalah ekspresi keagamaan, bukan yang lain? Bukankah respons atas populisme Islam ini juga melahirkan sentimen politik identitas yang lain (ekstrem tengah, ultra-nasionalis) yang juga ditopang oleh kelas menengah dari generasi yang sama, seperti yang terlihat dari para pendukung Ahok dan Jokowi? Argumen demografis juga mengabaikan struktur ekonomi politik, aspek yang sebenarnya banyak dibahas oleh Supriatma termasuk soal corak kapitalisme, tapi ditinggalkan begitu saja karena dianggap tidak kompatibel dan lebih memilih berspekulasi dengan masalah generasi. Dengan kata lain, tulisan Supriatma lebih banyak berisi spekulasi ketimbang analisis yang mendalam tentang populisme kanan di Indonesia.

Hal yang sama juga dapat diamati dari tulisan Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (2017)<sup>63</sup>. Di awal tulisannya, ia berpendapat bahwa populisme sayap kanan merupakan “pertanda dari transformasi tatanan politik di tingkat domestik yang terdampak dari transformasi di tingkat global, yang ditandai runtuhnya rezim-rezim sosial demokrat dan liberal di Eropa, Asia dan Amerika”. Pada uraian berikutnya, Umar lebih banyak menjelaskan fenomena Eropa dan Amerika, ketimbang Asia, dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan menguatnya populisme kanan. Momen terpenting bagi Umar yang menandai lahirnya fenomena itu adalah krisis kapitalisme neoliberal tahun 2008. Padahal, fenomena populisme kanan di berbagai tempat sudah muncul jauh sebelum krisis 2008, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Di samping itu, apa yang Umar sebut sebagai runtuhnya rezim sosial demokrat lebih sebagai fenomena Eropa ketimbang Asia, termasuk di

Indonesia, yang tidak memiliki partai buruh yang kuat, termasuk tidak memiliki pengalaman sebagai negara kesejahteraan. Uraian tentang Asia dan Indonesia juga lebih banyak bercerita tentang ekspresi populisme kanannya yang serupa dengan di Eropa dan Amerika, tetapi mengabaikan penjelasan kondisi-kondisi yang melahirkan bentuk politik populis sayap kanan itu. Seperti Supriatma, kecenderungan penjelasan Umar semacam itu menunjukkan kegagalan dalam menggunakan pisau analisis yang dianggap masuk akal untuk memahami fenomena global, tapi ternyata tidak terlalu selaras dengan yang diamati dalam konteks lokal. Ia tampaknya juga membuat simpulan yang terkesan sekenanya dengan mengatakan bahwa populisme Islam di Indonesia memiliki jejaring dan proses interaktif dengan gerakan populis Islam di Mesir dan Turki, hanya karena Vedi Hadiz (2016) membuat analisis perbandingan tiga negara itu.

### **Bagaimana Memahami Populisme Kanan di Indonesia?**

Uraian bagian ini merujuk terutama pada tulisan saya bersama Diatyka Yasih dan Luqman nul Hakim di Jurnal *Prisma*.<sup>64</sup> Di sini saya memahami fenomena populisme kanan di Indonesia beresonansi dengan yang terjadi di tempat lain karena gejala serupa disebabkan oleh kondisi-kondisi umum yang kurang lebih sama. Sebelum menjelaskan lebih jauh, mesti dipahami bahwa bentuk politik yang populis bukanlah fenomena baru, apalagi sebagai produk krisis ekonomi tahun 2008 seperti dikatakan Umar. Jauh sebelum itu, pada awal abad ke-20, populisme juga sudah menjadi ekspresi politik yang dominan terutama di Amerika Latin, yang basis utamanya adalah kelas pekerja di perkotaan, seperti Juan Domingo Peron di Argentina dan Getulio Vargas di Brazil. Di Indonesia, sebagaimana dikemukakan Hadiz (2016, 3), fenomena populisme Islam juga sudah dapat diamati pada era kolonial yang basis utamanya pada masyarakat perkotaan tradisional dan borjuis kecil di pedesaan atau tuan tanah. Perkembangan politik populis kontemporer, amat dipengaruhi oleh perubahan bentuk marginalisasi baru yang melahirkan wujud konstruksi “rakyat” yang juga baru, tidak lagi didasarkan pada kelas sosial tertentu tetapi cenderung lebih kompleks yang melibatkan basis sosial lintas kelas.

---

64 A. M. Mudhoffir, D.W.P. Yasih dan L.N. Hakim. 2017. “Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia”, *Prisma* Vol. 36 (3): 48-59.

Ada dua aspek pokok yang patut dikemukakan di sini dalam menjelaskan fenomena populisme kanan kontemporer baik di tingkat lokal maupun global. *Pertama* adalah kondisi kelas pekerja yang semakin terfragmentasi sebagai produk rezim pasar kerja fleksibel sejak tahun 1980-an. Keadaan ini menyediakan basis sosial utama populisme kanan di berbagai tempat. Di Eropa, kebijakan neoliberalisme sekaligus menandai kebangkrutan negara kesejahteraan akibat lemahnya organisasi pekerja maupun partai Kiri serta berkurangnya aneka layanan sosial negara. Neoliberalisme juga memperluas situasi *anomie* serta berbagai bentuk kecemasan sosial dan ekonomi akibat meningkatnya ketidakpastian kerja, tidak hanya dialami kelas bawah tetapi juga kelas menengah terdidik. Kerentanan yang dialami kelas menengah menunjukkan apa yang disebut oleh Hadiz (2017) sebagai *the broken promise of modernity*.

Di Indonesia, kelas menengah produk industrialisasi Orde Baru memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, namun hal itu tidak lantas membuat kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik, bahkan senantiasa berada dalam ketidakpastian masa depan pekerjaan; suatu kondisi kerentanan yang serupa dengan yang dialami kelas bawah. Berbagai kerentanan yang dihadapi ini melahirkan kecemasan, termasuk dalam kaitannya dengan kemungkinan melakukan mobilitas sosial vertikal atau untuk mempertahankan posisi kelasnya.

Kelas menengah dari kalangan birokrat juga mengalami kecemasan serupa. Meskipun memiliki status pekerjaan yang lebih pasti, tidak seperti pekerja industri sektor manufaktur atau jasa, serta tersedianya akses atas jaminan kesehatan hingga purna kerja, penghasilan mereka cenderung stagnan dan terhitung kecil dibandingkan tingkat konsumsi serta kenaikan harga barang. Keadaan itu memang bukan hal baru, akan tetapi rezim neoliberalisme memperparah kerentanan akibat berkurangnya layanan-layanan publik serta berbagai subsidi kebutuhan dasar, termasuk membuat ongkos pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi serta kebutuhan-kebutuhan hiburan yang kian meningkat. Dengan kata lain, porsi terbesar kelas menengah di Indonesia sesungguhnya berada pada batas bawah yang rentan jatuh menjadi kelas bawah.

Pada konteks ini, solidaritas keagamaan adalah medium untuk menya-



lurkan kekecewaan itu. Hadiz dan Rakhmani telah menunjukkan bahwa yang mampu menangkap dan memberi jawaban atas kekecewaan itu adalah kelompok-kelompok Islam konservatif, pendukung utama demonstrasi anti Ahok. Argumen ini untuk menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam aksi 212 tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi yang non-rasional berkaitan dengan sentimen keagamaan seperti dikemukakan perspektif kulturalis, melainkan juga bersinggungan dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis terkait kondisi sosial dan ekonomi. Penjelasan serupa juga dapat digunakan untuk memahami kasus di Eropa. Menguatnya artikulasi identitas yang eksklusiver dan rasialis beresonansi dengan upaya berbagai kelompok masyarakat menyalurkan beragam keceemasan dan kekecewaan akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin buruk karena berkurangnya berbagai layanan sosial serta meningkatnya ketidakpastian kerja produk neoliberalisme. Namun, sebagaimana telah disinggung di awal, tulisan Hadiz dan Rakhmani tidak menjelaskan mengapa Islam tertentu yang menjadi pilihan artikulasi politik dalam menyalurkan kekecewaan masyarakat lintas kelas.

Oleh karena itu, aspek kedua yang penting untuk dikemukakan adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan solidaritas keagamaan menjadi saluran kekecewaan kelas bawah dan menengah. Kondisi ini, terutama terkait dengan lemahnya pengorganisasian gerakan politik yang progresif, yang memberi perhatian pada soal redistribusi sumber daya. Di Eropa, hal itu adalah konsekuensi dari bangkrutnya negara kesejahteraan akibat berkurangnya jaminan sosial di satu sisi serta membengkaknya demografi kelas menengah non-produktif di sisi lain. Merespons situasi itu, partai-partai sosialis bergeser ke tengah menempuh “jalan ketiga” ala Giddens, mengafirmasi agenda-agenda neoliberalisme yang lebih mengutamakan kepentingan kelas menengah. Akibatnya, kepentingan kelas pekerja yang merupakan konstituen utama partai Kiri tersisih, sedangkan kecemasan yang berhubungan dengan ketidakpastian kerja juga meningkat. Sementara itu, partai liberal juga tidak mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok ini. Situasi ini menandai terjadinya krisis representasi, yakni saat wadah politik elektoral tidak lagi dianggap memadai dalam menyalurkan berbagai aspirasi dan tuntutan warga. Kecemasan kelas pekerja ini yang kemudian ditangkap oleh para demagog dengan menandakan bahwa berbagai keterpurukan yang mereka hadapi disebabkan oleh

para imigran.

Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara pasca-kolonial, lemahnya artikulasi agenda politik yang progresif berakar dari sejarah yang lebih panjang. Jika di Eropa hal itu disebabkan oleh bangkrutnya negara kesejahteraan dan hegemoni neoliberalisme, di negara-negara pasca-kolonial termasuk di Indonesia, partai komunis telah lama direpresi secara keji oleh rezim otoriter era Perang Dingin.<sup>65</sup> Gerakan Islam politik juga turut direpresi oleh Orde Baru, tetapi tidak benar-benar dihabisi seperti partai komunis, sehingga masih menyediakan ruang artikulasi berbagai bentuk kekecewaan. Orde Baru bahkan sempat menjadikan kelompok Islam konservatif sebagai aliansi utamanya dalam menghadapi friksi dengan tentara yang sekaligus melapangkan jalan bagi artikulasi Islam dalam ruang politik secara lebih terbuka. Sementara itu, gerakan politik liberal juga tersegmentasi dalam isu sektoral seperti yang diusung oleh kelompok-kelompok NGO sejak era Orde Baru. Ini membuat Islam menjadi satu-satunya alternatif artikulasi politik di tengah-tengah meningkatnya kesalehan Muslim sejak tahun 1990-an, selain melalui sentimen nasionalisme warisan Orde Baru. Maka tidak heran, polarisasi politik selama dan pasca pilkada Jakarta menghasilkan tegangan antara ekstrem kanan dengan ekstrem tengah.

Di sisi lain, warisan depolitisasi dan kebijakan massa mengambang era Orde Baru tidak hanya membuat masyarakat menjadi cenderung apolitis, tetapi juga telah memutus saluran partai politik dengan basis sosialnya. Artikulasi partai politik Islam juga tidak sambung dengan basis umat yang semakin Islami, selain tidak ditopang oleh kelas borjuasi yang kuat. Dampaknya, mobilisasi suara dalam pemilu pada era demokrasi memerlukan ongkos yang sangat mahal, tidak hanya melalui politik uang dan kekerasan, tetapi juga dengan mengkapitalisasi sentimen-sentimen rasialis, seperti dapat diamati pada kasus pilkada Jakarta maupun pada kasus terbitnya peraturan-peraturan bernuansa syariah di berbagai daerah.

### **Fragmentasi Aliansi Populis Islam**

Apakah kemenangan Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta menandai kebangkitan gerakan Islam populistis? Apakah kemampuan kelompok-kelom-

---

65      *Ibid.* 52

pok Islam melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar menunjukkan masa depan aliansi populis Islam yang lebih menjanjikan tetapi sekaligus menjadi ancaman bagi demokrasi liberal? Uraian bagian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa fragmentasi lebih menjadi ciri yang menonjol pada aliansi populis Islam, ketimbang koherensi dan soliditas. Fragmentasi itu dapat diamati dari beragam saluran artikulasi Islam yang bahkan dapat saling bertentangan satu sama lain, antara yang menggunakan jalur kekerasan baik terorisme maupun vigilantisme, jalur politik formal, maupun yang mengartikulasikannya sebagai ekspresi kultural. Buruknya capaian partai politik Islam dalam pemilu di tengah meningkatnya ekspresi kesalehan masyarakat juga menandai fragmentasi itu. Menurut Hadiz (2016), keadaan ini disebabkan oleh ketidakmampuan aliansi populis Islam membangun basis pengorgansasian yang kuat serta tidak adanya kelas borjuasi Muslim yang kuat yang menopang aliansi itu akibat dominasi pengusaha Tionghoa.

Artinya, meskipun secara sosiologis kita dapat mengamati adanya ekspresi keislaman yang menguat, partai politik Islam tidak dianggap sebagai saluran politik yang representatif bagi mereka. Ini terutama karena banyak penting partai Islam terlibat korupsi maupun berbagai praktik predatorisme politik lainnya, sehingga tidak ada bedanya dengan partai politik lainnya. Alhasil, umat yang makin Islami itu tidak terorganisir serta tidak memiliki saluran politik yang otonom, tetapi menyediakan basis mobilisasi bagi para politisi sekuler yang oportunis dengan mengklaim bahwa ia dapat merepresentasikan atau menyalurkan kepentingan politik umat. Maka tidak heran, Prabowo Subianto yang bukan representasi tokoh Muslim dengan partai Gerindra-nya yang juga tidak menggunakan platform Islam, dapat menjadi elemen utama aliansi Islam 212. Lahirnya peraturan daerah bernuansa syariah di berbagai daerah juga sebagian besar diusung oleh partai politik yang tidak menggunakan platform Islam. Simpang siur<sup>66</sup> pernyataan beberapa pihak terkait hubungan antara alumni Aksi Bela Islam 212 dengan Partai Gerindra, terkait rekomendasi calon maupun mahar yang diperlukan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018, juga kembali menegaskan bahwa aliansi populis Islam tidak sesolid yang dibayangkan oleh banyak pihak, bukan hanya karena pernyataan to-

---

66 <https://news.detik.com/berita/d-3813467/pernyataan-resmi-presid-um-212-soal-la-nyalla-dan-politik-praktis>

koh 212 yang saling kontradiktif tetapi juga terlihat dari lemahnya posisi tawar serta besarnya ketergantungan aliansi ini pada partai dan politisi sekuler yang memiliki sumber daya lebih besar. Sejak awal setelah terpilih sebagai gubernur, tim pemenangan Anies<sup>67</sup> juga telah menegaskan bahwa mereka tidak membangun kontrak politik dengan elemen-elemen 212 serta tidak berupaya mendorong formalisasi Islam dalam pemerintahan. Artinya, aliansi populis Islam hanya bermakna dalam kompetisi elektoral, tetapi tidak menjadi subjek politik penting yang menentukan kebijakan publik.<sup>68</sup>

Ini menegaskan bahwa mobilisasi aksi 212 terjadi bukan karena menguatnya sentimen identitas keagamaan yang konservatif dan intoleran, tetapi lebih dimungkinkan oleh adanya kondisi kecemasan berbagai lapisan sosial masyarakat yang meningkat yang menemukan bentuk Islam konservatif sebagai artikulasi yang paling representatif dalam menyalurkan kepentingannya yang bersinggungan dengan kepentingan pragmatis politisi sekuler untuk memperoleh dukungan dari kelompok masyarakat yang makin Islami. Namun, patut dicatat bahwa menguatnya artikulasi Islam konservatif itu juga dimungkinkan dalam konteks absennya artikulasi politik yang lain, selain dalam bentuk nasionalisme berlebih. Argumen ini merupakan kritik terhadap analisis yang menekankan semata-mata pada aspek kultural atau ekonomi dalam menjelaskan fenomena mobilisasi sentimen keagamaan yang tampak menguat, sekaligus melengkapi pendapat yang melihat adanya persinggungan kedua hal itu. Tulisan ini juga menawarkan kerangka analisis –yang menekankan pengamatan pada basis sosial serta kondisi yang memungkinkan artikulasi politik tertentu –yang dapat digunakan untuk memahami gejala di tingkat lokal dengan fenomena menguatnya populisme kanan di berbagai tempat. Pembacaan menggunakan kerangka analisis ini dapat menunjukkan bahwa alih-alih menguat dan koheren, populisme Islam di Indonesia lebih sebagai aliansi yang cair dan terfragmentasi karena tidak ditopang oleh basis sosial dan kelas kapitalis yang kuat. Aliansi ini tidak dapat menjadi agensi yang otonom dan otoritatif dalam mengusung agenda formalisasi Islam, tetapi

---

67 <https://en.tempo.co/read/news/2017/04/21/057868381/Anies-Baswedan-Denies-Plans-to-Issue-Sharia-Bylaws>

68 Ibid. 49

ia menyediakan basis dan amunisi mobilisasi sentimen rasialis bagi para politisi oportunis. Artinya, menguatnya penggunaan sentimen keagamaan yang rasialis bukan masalah generasi kelas menengah didikan Orde Baru yang kehilangan berbagai privilese, juga bukan karena meningkatnya intoleransi, tetapi karena adanya relasi sosial yang menghendaki artikulasi identitas yang rasialis sebagai basis aliansi populis Islam dengan politisi oportunis, yang menguat terutama dalam kontestasi elektoral.\*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2018/01/aliansi-populis-islam-yang-terfragmentasi/>*

## XII

### Menuju Intervensi Kiri

**Muhammad Ridha**

YANG membedakan analisa Marxis dengan analisa-analisa lainnya yang berangkat dari tradisi pencerahan adalah komitmennya terhadap perubahan. Analisa tidak pernah ditempatkan untuk dirinya sendiri, namun sebagai upaya untuk melihat realitas yang lain yang tersingkap dalam penelusuran atas masalah yang dianalisa itu sendiri, yang kemudin dapat berguna untuk memajukan agenda kelas pekerja. Gagasan utama dari banyak tulisan tentang “merebut populisme” mencoba untuk selaras dengan prinsip ini. Pada kesempatan kali ini, artikel ini akan berupaya untuk mengajukan apa implikasi praktis dari posisi “merebut populisme” sekaligus menyimpulkan konsekuensi strategis politik kiri Indonesia sekarang.

#### **Kelas itu Penting!**

Dalam banyak pendiskusian tentang populisme, masih banyak kalangan yang melihat bahwa kita dapat mengabaikan dinamika kelas dalam melihat populisme. Supriatma (2017), misalnya, berpendapat bahwa populisme harus ditempatkan dalam gerakan tanpa identifikasi kepentingan kelas tertentu, tanpa artikulasi ideologi tertentu. Sebagai fakta empiris hal ini tentu tidak terhindarkan mengingat populisme sebagai peristiwa politik selalu muncul melalui penangguhan perbedaan kelas (*suspension of class difference*, lihat Hadiz 2016). Namun perhatian yang berlebihan terhadap “penangguhan” akan membuat kita abai bahwasanya populisme justru selalu muncul dalam relasi kelas yang selalu penuh tensi, yang mana konfigurasi kekuasaan yang ada (alias *status quo*) harus selalu melakukan respon atas tensi tersebut.

Sebagai ekspresi politik, populisme tentu terbuka bagi manipulasi kelas berkuasa. Suatu hal yang lumrah dalam kenyataan politik yang karakter-

istik utamanya adalah tentang pertarungan kekuasaan. Akan tetapi kita perlu merefleksikan lebih dalam bahwa keefektifan tekanan dari populisme selalu mensyaratkan adanya politisasi kemarahan kelas pekerja. Tanpa adanya artikulasi dari kelas pekerja, penggunaan retorika populis menjadi tidak ada artinya. Konstruksi politik yang antagonistik antara elit vis a vis rakyat kecil dalam retorika populis bisa menjadi tidak berguna ketika posisi tertentu dari kelas pekerja diabaikan dalam konstruksi tersebut.

Bagi saya, pembacaan ini kongruen dengan asal muasal sosial kemunculan gerakan populis itu sendiri. Dalam sejarahnya, gerakan awal populisme dapat dirujuk pada pengalaman gerakan solidaritas petani dan pekerja industrial di wilayah selatan dan barat Amerika Serikat tahun 1877, dalam rangka menentang kebijakan penurunan harga bibit dan nilai mata uang sembari mendukung tuntutan pekerja industrial (Jager 2018). Demikian juga pengalaman *Narodnaya Volya*, yaitu gerakan populis Rusia awal abad 19, yang menjadi inspirasi awal bagi munculnya gerakan revolusioner ber-gariskan politik Marxisme.

Pembacaan seperti ini tentu tidak meyangkal fakta bahwa gerakan populis tidak sama dengan gerakan politik yang berbasis kelas. Ketidakjelasan ideologi serta kaburnya program politik yang hendak ditawarkan oleh gerakan populis itu sendiri adalah umum dan nyata. Apa yang hendak ditekankan di sini adalah kita perlu menyadari bahwa momen populis perlu dibaca dalam hubungannya dengan perkembangan tertentu dari dinamika perjuangan kelas. Tanpa menghubungkannya dengan dinamika perjuangan kelas, kita akan kehilangan kekuatan penjelasan tentang mengapa populisme bisa muncul dan berlaku efektif dalam situasi politik yang ada.

### **Populisme dan Problem Politik Demokrasi Elektoral**

Pada kesempatan sebelumnya, saya berpendapat bahwa kemunculan populisme belakangan ini tidak dapat dipisahkan dari problem ekonomi politik, khususnya terkait dengan kontradiksi terkini dari perkembangan kapitalisme era Jokowi. Namun jika diperkenankan untuk melakukan otokritik, pembacaan ini masih terlalu umum dalam memahami keberadaan populisme. Hal ini mengingat kontradiksi kapitalisme tidak melulu menciptakan respon politik populis. Di sini kita perlu mengelaborasi lebih lanjut

kondisi politik khusus yang mendorong kemunculan populisme.

Bagi saya, ada sesuatu yang unik dari ekspresi politik populis sebagai sebagai bentuk gerakan yang tidak terpisahkan dari perkembangan politik negara modern. Suatu politik dapat dikatakan bersifat populis jika ia memenuhi, setidaknya, tiga kriteria ini:

1. Penggunaan retorika anti elite dengan prasangka yang bersifat lintas kelas
2. Penekanan pada strategi politik non insitusional/formal
3. Berorientasi pada perubahan representasi politik dalam sistem demokrasi yang ada

Ketiga kriteria tersebut sangat terkait dengan problem demokrasi elektoral sebagai suatu sistem representasi politik. Retorika populis yang sangat anti elite dapat muncul dari keterputusan representasi antara wakil dengan konstituennya dalam sistem demokrasi yang ada. Keterputusan ini menciptakan bagi-bagi prasangka lintas kelas karena pengalaman “terputus” dari para wakil dapat terjadi oleh siapapun terlepas dari posisi kelasnya. Keterputusan representasi ini menciptakan kondisi untuk menciptakan persepsi tentang kegagalan institusi yang ada yang memberikan pembenaran bagi gerakan populis untuk melakukan dorongan politik di luar institusi formal.

Khusus pada kriteria nomor tiga, penekanan pada “perubahan representasi” mengacu pada kenyataan bahwa walau politik populis memobilisasi ekspresi anti-elite dan anti-sistem, para aktor populis selalu berorientasi pada penguasaan negara. Politik populis selalu berupaya untuk mengubah relasi representasi politik yang berlaku dalam sistem demokrasi elektoral dimana kekuatan populis harus masuk ke dalamnya. Tidak heran jika kemudian walau para populis memiliki ketidakpercayaan terhadap sistem elektoral, mereka akan tetap berkompetisi dalam langgam sistem politik yang tersedia. Disinilah politik populis justru mengoptimalisasi (alias mengeksploitasi) langgam politik elektoral yang ada untuk memenangkan agenda mereka.



Pembacaan ini dapat membantu kita untuk memahami situasi kebangkitan populisme sekarang dan respon terhadapnya. Dalam kondisi krisis representasi elektoral seperti ini, kelompok Islamlah yang dapat mengoptimalkan keadaan untuk kepentingan mereka. Peminggiran yang dilakukan Jokowi terhadap kelompok Islam berbanding terbalik dengan akomodasi luas pada era kekuasaan SBY. Hal inilah yang menciptakan basis politik bagi kemunculan populisme Islam. Akan tetapi setelah mobilisasi populis 212 dilakukan terdapat relasi politik yang resiprokal antara rezim Jokowi dengan populis Islam. Rezim Jokowi meluncurkan wacana populisme nasionalis untuk menandingi kemunculan populisme Islam. Pada momen ini kita menemukan pembelahan politik terkini dalam masyarakat.

Melalui pembacaan ini pula kita bisa keluar dari kebingungan yang massif karena dalamnya pembelahan politik yang ada sekarang. Relasi “bolak-balik” antara aktor populis Islam dengan rezim politik Jokowi sekarang harus dilihat sebagai bagian dari pertarungan representasi dalam sistem yang ada. Alih-alih melihat kondisi sekarang sebagai konflik antara narasi politik Populisme Islam melawan Populisme Nasionalis, kita justru perlu memerhatikan bagaimana upaya akomodasi (dan disakomodasi) terjadi di balik pertarungan narasi ini. Tidak heran jika kemudian dalam kondisi aktual, kalangan Islamis dan rezim Jokowi tidak terlalu larut dengan koherensi wacana mereka. Kalangan Islamis dapat mengusung wacana “NKRI Bersyariah,” sementara di ujung sana kalangan nasionalis dapat mewartakan “Islam Toleran.” Apapun wacananya, proses inilah yang menyebabkan kemarahan massa kelas bawah yang muncul dalam momen populis akan dianalisis dalam proses negosiasi antar mereka (baca: elite) yang bertarung.

### **Menuju Intervensi Politik Kiri**

Sudah sangat Jelas bahwa dalam relasi “bolak-balik” ini, massa kelas bawah yang termobilisasi dalam gerakan populis yang ada hanya menjadi instrumen politik kekuasaan elite. Akan tetapi sepenuhnya tergantung dalam posisi ini mengabaikan kenyataan sosial mengenai politisasi kemarahan kelas bawah. Di sini sebuah diskusi yang lebih mendalam diperlukan.

Dalam penjabaran yang saya ajukan dalam kesempatan sebelumnya, saya

berargumen bahwa kunci untuk menghentikan populisme sekarang adalah dengan merebut akar populisme itu sendiri, yakni basis sosial kelas pekerja dan kelas bawah. Merebut populisme dengan kata lain adalah merebut dukungan dari kelas pekerja dan kelas bawah itu sendiri. Sebab populisme tidak akan dapat beroperasi sebagai populisme jika elemen dari kelas bawahnya berhasil dibongkar.

Dalam upaya merebut dukungan ini, gerakan Kiri mesti mengusung agenda populismenya sendiri. Namun pekerjaan rumah yang lebih pelik, menurut saya, adalah mengenai kapasitas politik dari gerakan Kiri untuk mengintervensi kesadaran kelas bawah yang termobilisasi oleh populisme yang berkembang. Harus diakui bahwa gerakan Kiri sebagai politik yang terorganisir masih banyak memiliki keterbatasan. Namun dengan kemunculan politisasi kemarahan kelas pekerja sekarang ini, maka menjadi penting untuk membicarakan intervensi politik dengan memperhatikan keterbatasan yang ada.

Harus diakui juga bahwa sampai sekarang instrumen untuk intervensi, yakni partai peserta pemilu yang dibangun oleh gerakan Kiri, belumlah ada. Namun demikian masih terdapat kemungkinan politik yang dapat didorong melalui upaya mengajukan agenda politik Kiri secara terbatas dalam ruang politik yang ada. Dalam momen elektoral 2019 nanti, gerakan Kiri perlu mendiskusikan secara serius untuk mengusung program politik kelas dengan menggunakan kendaraan partai yang nanti bertarung dalam pemilu. Terdengar seperti proses politik oportunistik karena sudah pasti program politik kelas akan mudah larut dalam politik partai yang korup. Namun hal ini dapat diantisipasi jika gerakan Kiri itu sendiri mampu mengorganisasikan proses intervensinya secara terpimpin dan terkoordinasi. Disinilah diperlukan pendiskusian mendalam mengenai strategi serta taktik intervensi pemilu. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang penting bagi pertumbuhan gerakan Kiri untuk membuat dirinya tetap relevan dalam era populisme sekarang, sembari mempersiapkan diri untuk membangun partai untuk pemilu 2024 nanti. \*\*\*

*Sumber: <https://indoprogress.com/2018/03/sekali-lagi-tentang-merebut-populisme-bagian-3-selesai/>*

## XIII

## Beberapa Catatan Tentang Perdebatan Populisme

**Muhammad Fajar**

PERDEBATAN idealnya menuntun ke arah pemahaman yang lebih baik dalam berbagai aspek (e.g., teori, metodologi, data). Sayangnya tulisan ini tidak mampu memenuhi misi itu. Untuk sampai ke sana, kita memerlukan konfirmasi antara teori dan data empirik yang berkualitas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di sini. Tulisan ini hanya ingin meminjam diskursus teoritik yang berkaitan dengan perdebatan antara Ari A. Perdana, Muhammad Ridha dan Abdil Mughis Mudhoffir (selanjutnya disebut Perdebatan Populisme). Pembahasan teoritik ini berguna sebatas memperluas kerangka pemahaman kita tentang isu-isu yang mungkin luput dalam Perdebatan Populisme.

Beragamnya tema perdebatan antara keempat orang tersebut memaksa tulisan ini untuk fokus hanya pada dua isu. *Pertama*, karena kata populisme memulai dan terus-menerus hadir di dalam perdebatan, maka sudah sewajarnya kalau tulisan ini membahasnya terlebih dahulu. *Kedua*, karena isu mengenai mobilisasi cukup mencuat, maka bagian kedua tulisan ini mencoba menyelidiki hal tersebut.

### Populisme

Tentang populisme, ilmuwan sosial sudah berusaha mendefinisikan konsep ini sejak dua-tiga dekade lalu. Seperti ilmuwan sosial pada umumnya, usaha pendefinisian suatu fenomena menjadi penting karena ia memiliki konsekuensi metodologis seperti pemilihan kasus dan cara pengambilan data. Idealnya, konsep yang baik dapat menjadi penyaring untuk melihat realitas apa yang layak masuk sebagai kasus. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ragam definisi populisme di bawah.

Ilmuwan-ilmuwan sosial memiliki kesepakatan bahwa ciri umum populisme adalah sebagai ideologi politik yang menggalang massa untuk melawan elite (i.e. *the people versus the elite*). Dari definisi umum ini, ilmuwan-ilmuwan sosial cenderung menambahkan ciri-ciri khusus untuk mendefinisikan populisme. Beberapa ciri-ciri tersebut diantaranya: sebagai hasil dialektika antara wajah pragmatis dan pembebasan dari demokrasi (Canovan, 1999); keberadaan organisasi yang mengawal wacana populis (i.e., *vanguardism*) (Canovan, 2004); permusuhan terhadap politik demokrasi representatif, koneksi terhadap ide “tanah air”, ketiadaan nilai-nilai konkret dalam populisme, reaksi terhadap kondisi krisis, dan penggunaan jargon yang akrab dengan kehidupan sehari-hari rakyat (Taggart, 2004); pertentangan antara logika liberal dan populis (Abts & Rummens, 2007); dan ketidakmampuan demokrasi melindungi hak-hak individual sementara di saat yang sama memberi privilese terhadap kelompok kaya (Plattner, 2010).

Karakteristik-karakteristik khusus tersebut memengaruhi bagaimana kita mendefinisikan realitas populisme. Perdana yang mengemukakan argumen kultural oleh Huntington sedikit menekankan pada aspek pertentangan kultural (dan sub-kultural) sebagai penyulut populisme. Sementara itu, bagi Ridha dan Mughis, aspek material (dengan berbagai variasinya) tampak lebih menonjol untuk mencirikan suatu gerakan populisme. Walaupun perdebatan muncul karena aspek-aspek khusus ini, tidak ada masalah dengan perbedaan posisi tersebut selama elemen-elemen dalam sebuah definisi tercermin dalam realitas. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika realitas memang tidak lagi mampu dijelaskan oleh sebuah konsep atau teori, maka seseorang harus menilai ulang kepentasiannya membingkai realitas. Sejauh Perdebatan Populisme berlangsung, hal yang mungkin akan menguji kapasitas sebuah definisi adalah melihat sampai sejauh mana definisi itu mampu menjelaskan fenomena populisme di konteks lain. Perdana, misalnya, sudah melakukannya dengan menarik kemiripan antara populisme di AS, Eropa dan Indonesia. Kesadaran komparatif demikian tampaknya akan penting, tidak saja untuk kejelasan definisi, tapi juga keputusan menarik strategi apakah yang tepat untuk praktik politik, seperti yang disarankan oleh Ridha.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa keunggulan suatu definisi

sangat tergantung sampai seberapa jauh seseorang dapat menyajikan data yang mendukung konstruksi konseptualnya beserta argumen metodologis yang mendukungnya. Argumen seperti ini penting untuk, misalnya, mengklarifikasi mengapa Ridha bisa mengasosiasikan populisme dengan karakter lintas kelas sementara Mughis menghubungkannya dengan rasialisme dan karakteristik lintas-kelompok? Di sini argumen teoritik cenderung berhenti dan seharusnya metodologi mengambil alih. Misalnya, akan menarik bila kita mengetahui bagaimana membuktikan klaim ciri lintas-kelas populisme dengan menggunakan survei data peserta protes. Atau mengetahui apakah analisis diskursus terhadap poster atau selebaran protes dapat mengonfirmasi politik rasial populisme. Karena keterbatasan ruang menulis, tentu saja hal itu akan menjadi agenda penelitian yang menarik di masa depan.

### **Mobilisasi dan Anatomi Protes**

Dalam Perdebatan Populisme, tukar pendapat yang cukup menonjol adalah mengenai apakah mobilisasi massa dalam Aksi Bela Islam dapat diterangkan dengan teori oligarki (Mughis) ataukah memerlukan teori lain untuk melihat voluntarisme di dalam protes tersebut (Ridha). Tulisan ini berpendapat bahwa sebelum menyimpulkan peranan sentral oligarki dalam mobilisasi tersebut, ada baiknya kita mengenal kerangka yang biasa digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan protes tanpa bermaksud mendahului analisis empirik di kemudian hari.

Biasanya ilmuwan sosial akan sangat berhati-hati untuk mengatakan gerakan seperti Aksi Bela Islam sebagai suatu kesatuan yang memiliki agenda yang sama. Misalnya, kita bisa membedakan peserta (*participants*) dan penonton (*bystanders*). Kemudian, kita dapat pula membedakan antara pengikut (*adherents*) dan pendukung gerakan (*constituents*) (McCarthy & Zald, 1977). Yang pertama adalah orang yang percaya dengan tujuan gerakan sementara yang kedua, selain mempercayai, juga menyediakan sumber daya tenaga, waktu, dan materi (ibid, 1221). Struktur gerakan juga dapat dibedakan antara mereka yang menerima secara langsung (*potential beneficiaries*) dan tidak langsung (*conscience adherents, conscience constituents*) keuntungan dari gerakan tersebut (ibid, 1221-1222). Pembedaan ini terjadi karena pengalaman organisasi yang berbeda, jarak terhadap

konstituen utama dari protes, maupun latar belakang sosial seseorang. Maka hasilnya, mungkin saja setiap orang ikut dengan motivasi yang berbeda-beda. Di sini kita bisa memahami kekhawatiran Ridha bahwa "...kita perlu juga lebih jujur di sini bahwa dengan adanya keterlibatan sukarela, kita setidaknya menemukan bahwa ada situasi agensi yang tidak dapat dijelaskan dari kerangka oligarki semata."

Namun, pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah apa yang dimaksud dengan aspek sukarela dari sebuah protes? Kita bisa mengartikan sukarela dalam berbagai makna. Dalam batasan ilmu sosial, voluntarisme biasanya bermakna sebagai sebuah penjelasan yang kurang menekankan aspek struktural sehingga seolah-olah tindakan individu tidak memiliki latar belakang sosialnya sama sekali. Seolah-olah kepentingan dalam, misalnya, mengikuti aksi protes hadir dengan sendirinya. Teori pilihan rasional seringkali bersalah dalam hal ini. Karena itu, konsep struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) hadir mengisi kelemahan argumen voluntarisme. Struktur mobilisasi berarti segala relasi sosial yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001). Sampai sini, mengikuti perspektif oligarki Hadiz (Hadiz & Robison, 2004, 2013), argumen Mughis cukup sesuai karena ia mendefinisikan oligarki sebagai relasi kekuasaan yang lahir dari rahim kapitalisme dan menyebabkan mobilisasi massa. Namun demikian, argumen ini akan menemui batasan saat harus membedakan antara relasi kekuasaan oligarki sebagai produk sistem kapitalisme dan tindakan oligarki sendiri? Tanpa melihat pembedaan ini, kita cenderung akan melihat relasi oligarki yang mensosialisasikan kepentingan untuk mempertahankan kekayaan tanpa perantaraan aktor.<sup>69</sup> Perlu diingat bahwa aspek struktural kerap membutuhkan mediasi agensi untuk mewujudkan kecenderungan struktural tertentu (e.g. relasi oligarki) (Archer, 1995). Dengan kata lain, tidak ada kepentingan untuk merawat sistem oligarki tanpa ada tindakan oligarki. Struktur dan agensi justru saling melengkapi dibandingkan menegasikan, tanpa harus mereduksi eksistensi yang satu terhadap yang lain.<sup>70</sup> Di sini

---

69 Ini dilema dalam mengatakan bahwa "struktur bertindak" seolah-olah struktur atau relasi sosial memiliki karakteristik seperti manusia.

70 Ilmuwan sosial memang kerap mengutip Marx dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* untuk merujuk pengaruh struktural dalam tindakan aktor. Pada satu sisi pernyataan Marx, yang dikutip Mughis, mirip dengan argumen Giddens

muncul perbedaan antara Robison dan Hadiz (op. cit.) dan Winters (Winters, 2011) yang cenderung saling melengkapi dibandingkan saling berlawanan, seperti dikemukakan Mughis.

Dari perbedaan ini juga, kita dapat membaca kalau tidak mudah untuk mengatakan bahwa mobilisasi terjadi karena peranan oligarki semata. Ada dua arah penjelasan di sini. *Pertama*, setiap orang tidak hanya berdiri di atas ranah kapitalisme saja. Lebih tepatnya, mobilisasi selalu melibatkan institusi yang beragam seperti jaringan keagamaan atau etnis. Persoalannya lebih kepada bagaimana percampuran institusi-institusi ini memengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam sebuah protes.<sup>71</sup> Memeriksa keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam tampaknya akan lebih menarik dengan turut mempertimbangkan argumen ini. *Kedua*, kalau Aksi Bela Islam merupakan artikulasi kepentingan oligarki dalam konteks pilkada Jakarta, ada persoalan teoritik dan empirik yang penting dipertimbangkan di sini. Persoalan teoritik mengacu pada konsep tindakan kolektif (Olson, 1971), yang memahami bahwa aktor cenderung tidak bertindak kolektif saat kepentingannya sudah diwakili oleh aktor lain. Kita tentu ingin mengetahui bagaimana oligarki dan aktor lain seperti FPI dan FUI memecahkan persoalan klasik tindakan kolektif, seperti bagaimana memastikan peserta aksi yang sepakat ikut dalam aksi benar-benar, misalnya, mengerahkan massa sesuai kesepakatan sehingga

---

yang menyatakan kapasitas struktur untuk membatasi (constraining) sekaligus memberikan peluang (*enabling*) kepada aktor (Giddens, 1984). Namun demikian, kelemahan dari argumen ini adalah kurangnya mekanisme untuk menjelaskan bagaimana pengaruh struktural menubuh dalam tindakan individu dan menjelaskan bagaimana hal tersebut akan berdampak terhadap keluaran dari hasil interaksi yang dikondisikan dalam lingkup struktural dan kultural tertentu. Beberapa ilmuwan sosial sudah memberikan perhatian kepada persoalan ini melalui penekanan terhadap bermacam aspek, misalnya, refleksi dari aktor (Archer, 2003) dan mekanisme kelompok sosial dan lingkaran episteme (Ellder-Vass, 2010).

71 Dalam studi gerakan sosial, pertanyaan mengenai mengapa orang berpartisipasi dalam gerakan sosial merupakan pertanyaan klasik. Tercatat beberapa ilmuwan sosial menjelaskan bermacam faktor penting seperti kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Gurr, 1970), ikatan sosial dan afiliasi kelompok sebelum bergabung dalam gerakan sosial (McAdam, 1990; Morris, 1984; Snow, Zurcher Jr, & Ekland-Olson, 1980), nilai dan harapan seseorang (Klandermans, 1984), atau kombinasi antara afiliasi kelompok dan nilai (McAdam, 2010).

mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar. Bagaimana pula pimpinan organisasi yang terlibat memastikan anggotanya hadir dalam aksi tersebut. Dan bagaimana pula organisasi yang sama menjangkau orang yang bukan merupakan anggota organisasi untuk terlibat dalam aksi. Agenda empirik ini penting karena hanya dengan memperlihatkan pemecahan tindakan kolektif oleh aktor yang memiliki perbedaan kepentingan, maka kita bisa mendapatkan penjelasan alternatif dibandingkan dengan membebankan semuanya kepada struktur mobilisasi (relasi kekuasaan oligarki yang lahir dari kapitalisme).<sup>72</sup>

## Penutup

Sekali lagi, tulisan ini tidak bermaksud menyajikan analisis empirik yang menyeluruh dan melengkapi Perdebatan Populisme. Tulisan ini lebih bermaksud mengajukan beberapa analisis teoritik yang selama ini kerap diasosiasikan dengan tema-tema dalam Perdebatan Populisme namun kurang mendapat tempat dalam Perdebatan Populisme. Sehubungan dengan konsep populisme, tulisan ini lebih menyoroti keberagaman definisi populisme yang berdampak pada aplikasi konsep itu dalam analisis. Selanjutnya, tulisan ini mengambil beberapa diskursus dalam studi gerakan sosial dan berargumen bahwa teori oligarki akan lebih produktif untuk menerangkan mobilisasi bila mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori gerakan sosial. Hubungan antara sistem kapitalisme, oligarki dan mobilisasi tentu perlu diperiksa dan dikonfirmasi secara menyeluruh melalui kerja empirik. Tulisan ini hanya bermaksud untuk mendorong pembahasan sedikit ke arah sana. \*\*\*

## Kepustakaan:

Abts, K., & Rummens, S. (2007). Populism Versus Democracy. *Political Studies*, 55(2), 405-424.

Archer, M. S. (1995). *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*. New York: Cambridge University Press.

---

72 Beberapa proyek intelektual sudah mengarah untuk memperlihatkan mobilisasi oleh kelompok kaya (e.g. Martin, 2015; Radnitz, 2010).



Archer, M. S. (2003). *Structure, Agency and the Internal Conversation*. New York: Cambridge University Press.

Canovan, M. (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. *Political Studies*, 47(1), 2-16.

Canovan, M. (2004). Populism for Political Theorists? *Journal of Political Ideologies*, 9(3), 241-252.

Elder-Vass, D. (2010). *The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency*. New York: Cambridge University Press.

Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. California: University of California Press.

Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets* (Vol. 3). London: Routledge and Curzon.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy?: Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia* (Vol. 96, pp. 35-56). Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Klandermans, B. (1984). Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. *American Sociological Review*, 583-600.

Martin, I. W. (2015). *Rich People's Movements: Grassroots Campaigns to Un-tax the One Percent*. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, D. (1990). *Freedom summer*. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, D. (2010). *Political Process and the Development of Black Insurgen-*

cy, 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.

Morris, A. (1984). *The Origin of the Civil Rights Movement*. New York: Free Press.

Olson, M. (1971). *The Logic of Ccollective Action: Oublic Goods and the Theory of Groups* Cambridge: Harvard University Press.

Plattner, M. F. (2010). Populism, Pluralism, and Liberal Democracy. *Journal of democracy*, 21(1), 81-92.

Radnitz, S. (2010). *Weapons of the Wealthy: Predatory Regimes and Elite-led Protests in Central Asia*. Ithaca: Cornell University Press.

Snow, D. A., Zurcher Jr, L. A., & Ekland-Olson, S. (1980). Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment. *American Sociological Review*, 787-801.

Taggart, P. (2004). Populism and Representative Politics in Contemporary Europe. *Journal of Political Ideologies*, 9(3), 269-288.

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.

Sumber: <https://indoprogress.com/2017/05/beberapa-catatan-tentang-perdebatan-populisme/>

**Biodata Penulis:**

**Abdil Mughis Mudhoffir** adalah kandidat PhD di Asia Institute, The University of Melbourne Sidney Myer Asia Centre Parkville VIC 3010, Australia

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar** adalah mahasiswa Doktorat di The University of Queensland, Australia

**Ari A. Perdana** adalah mantan pengajar FEUI, sekarang tinggal di Manila, Filipina

**Made Supriatma** adalah pengamat dan peneliti politik, tinggal di Amerika Serikat

**Muhammad Fajar** adalah mahasiswa di Northwestern University, Evanston, Illinois, AS

**Muhammad Ridha** adalah anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)









